

KONFLIK DI MALUKU TENGAH

**PENYEBAB, KARAKTERISTIK, DAN
PENYELESAIAN JANGKA PANJANG**



KONFLIK DI MALUKU TENGAH

PENYEBAB, KARAKTERISTIK, DAN PENYELESAIAN JANGKA PANJANG

Oleh :

Sri Yanuarti

Yusuf

Josephine Marieta

Mardyanto Wahyu Triatmoko



**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Proyek Pengembangan Riset Unggulan /
Kompetitif LIPI / Program Isu
Jakarta, 2003**

Sri Yanuarti, dkk

Konflik di Maluku Tengah : Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang/Sri Yanuarti, Yusuf, Josephine Marieta, Mardyanto Wahyu Triatmoko - Jakarta : Proyek Penelitian Pengembangan Riset Unggulan Terpadu/Kompetitif LIPI/Program Isu, 2003

v, 150 hlm, 21 cm

Bibliografi, Lampiran

ISBN 979-3584-01-7

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Religious-social groups | 2. Social conflict |
| 3. Violence | 4. Conflict management |

I. Judul

II. Proyek Penelitian Pengembangan Riset Unggulan Terpadu/Kompetitif LIPI/Program Isu (seri penelitian)

303.69

Cetakan Kedua

KATA PENGANTAR

Penelitian "*Konflik di Maluku Tengah: Penyebab, Karakteristik, dan Penyelesaian Jangka Panjang*" ini merupakan bagian dari Penelitian Terpadu tentang "*Konflik Di Indonesia: Penyebab, Karakteristik dan Penyelesaian Jangka Panjang*". Penelitian terpadu ini adalah salah satu program riset kompetitif dan diseminasi Iptek LIPI yang diharapkan dapat menghasilkan suatu hasil penelitian multidisipliner yang komprehensif dan terfokus, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih baik bagi upaya pembangunan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Kompleksitas permasalahan konflik di Indonesia, termasuk konflik komunal bernuansa agama yang berkepanjangan di Maluku, tidak memungkinkan untuk dilakukan studi yang menyeluruh dalam waktu singkat. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan untuk studi jangka panjang antara tiga sampai lima tahun; atau bahkan mungkin lebih dari lima tahun karena sifat konflik yang dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan masyarakat.

Hasil penelitian tahun pertama ini merupakan gabungan hasil studi literatur dan studi lapangan yang mendetail dan komprehensif untuk mengidentifikasi hal-hal yang sudah diketahui dan yang belum diketahui mengenai aktor, persepsi, posisi, isu dan *fear/needs* yang berkaitan dengan sumber konflik di Maluku. Dari matrik dan skema yang dibuat dalam penelitian literatur kemudian disusun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang lebih terfokus dan mendalam untuk tahapan penelitian lapangan yang dilakukan pada bulan Agustus sampai bulan September 2003 di Maluku Tengah. Pemfokusan pada Maluku Tengah di tahun pertama ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa daerah itu merupakan daerah konsentrasi konflik yang terbesar

sejak meletusnya konflik kekerasan di Maluku. Tentu saja penelitian ini tidak akan mengabaikan pentingnya daerah-daerah lain di Maluku, termasuk Maluku Utara yang juga sarat dengan potensi konflik. Oleh karena itu daerah yang disebut terakhir ini akan dijadikan lokasi penelitian di tahun kedua, bersama-sama dengan Maluku Tengah yang masih memerlukan studi lebih lanjut dan lebih mendalam.

Secara keseluruhan, dari hasil penelitian tahun pertama ini telah dibuat *rapid assessment* dan *tentative academic guideline* yang bisa dijadikan dasar untuk pembentukan sistem (pre)manajemen konflik di Maluku, khususnya konflik yang bernuansa kekerasan, antara lain melalui penghentian kekerasan, *treatment* dan relokasi. Selanjutnya, pada tahun kedua atau ketiga diharapkan dapat dibuat sebuah model (pre)manajemen konflik yang bersifat *local-specific*, yang pada tahun-tahun berikutnya bisa diuji-cobakan secara berulang dan berkesinambungan agar di masa depan bisa terbentuk dan dikembangkan sistem manajemen konflik lokal yang selalu dinamis dan mengikuti perubahan masyarakat Maluku. Diharapkan hasil penelitian yang menekankan sejarah dan spesifikasi daerah Maluku ini pada akhirnya bisa menjadi buku panduan manajemen konflik yang komprehensif untuk daerah yang bersangkutan.

Penelitian ini dapat diselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak, baik di Jakarta maupun di daerah penelitian. Bantuan yang diperoleh antara lain kemudahan serta masukan atau informasi dari pemerintah setempat, pemimpin dan tokoh adat serta agama, kelompok intelektual, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan anggota masyarakat lainnya. Untuk itu para peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak tersebut di atas. Di samping itu para peneliti juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan selama penelitian.

Sebagai penelitian tahap pertama, tentu saja laporan penelitian ini masih mempunyai banyak kekurangan, oleh karena itu para peneliti sangat mengharapkan kritik dan masukan yang bermanfaat dari para pembaca agar hasil penelitian ini bisa lebih baik lagi.

Akhir kata, hasil penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para peneliti khususnya dan LIPI pada umumnya.

Jakarta, 19 Januari 2004,

Proyek Penelitian "Konflik Di
Indonesia: Penyebab, Karakteristik
dan Penyelesaian Jangka Panjang",

Peneliti Utama,

Ttd.

Thung Ju Lan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Permasalahan.....	3
I.3. Kerangka Pemikiran	4
I.4. Tujuan Penelitian	7
I.5. Metodologi.....	7
I.6. Nara Sumber.....	8
I.7. Pembabakan Penulisan.....	9
BAB II DESKRIPSI PERBANDINGAN KONDISI POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA PRA DAN PASCA KONFLIK DI MALUKU TENGAH	11
II.1. Struktur Sosial	13
II.2. Persebaran Agama dan Etnis.....	21
II.3. Komposisi Etnis dan Pemukiman.....	23
II.4. Tradisi Kekerabatan dan Gotong Royong	26
II.5. Peta Kekuatan Politik Masyarakat	37
II.6. Pemetaan Korban dan Kerusakan.....	40
BAB III ANALISA STRUKTUR	53
III.1. Kronologis Kerusuhan Ambon	53
III.2. Analisa Tentang Sumber Konflik.....	71
III.2.1. Masa Kolonial.....	71
III.2.2. Dari Kemerdekaan hingga Orde Baru	73
III.2.3. Pasca Orde Baru: Kebangkitan Umat Islam, RMS dan Pemilu 1999	76
III.3. Analisa Akselerator Konflik di Maluku Tengah.....	79
III.3.1. Arus Migrasi Orang Muslim non Ambon ke Maluku Tengah	80

III.3.2. Kepadatan Penduduk dan Sengketa Tanah.....	81
III.3.3. Perebutan Jabatan di Birokrasi	82
III.3.4. Tumbuhnya Kelompok-kelompok Preman.....	83
III.4. Analisa Pemicu Konflik.....	85
BAB IV ANALISIS FIGUR-FIGUR YANG BERKONFLIK.....	91
IV.1. Peta Kekuatan Kelompok yang Berkonflik.....	91
IV.1.1. Kelompok Kristen	91
IV.1.2. Kelompok Islam	96
IV.1.3. Kelompok Aparat Keamanan dan Militer.....	107
BAB V PENGHENTIAN KEKERASAN DAN REKONSILIASI..	111
V.1. Penghentian Kekerasan dan Rekonsialiasi yang Dibangun Pemerintah	111
V.2. Model Rekonsiliasi Kelompok Masyarakat/Individu ...	125
V.2.1. Model Rekonsiliasi Secara Adat	127
V.2.2. Model Rekonsiliasi Lembaga Keagamaan	127
V.2.3. Model Rekonsiliasi LSM	130
V.2.4. Model Rekonsiliasi Gerakan Akar Rumput.....	130
V.3. Penyelesaian Jangka Panjang.....	134
V.3.1. Program Kebersamaan.....	136
V.3.2. Meredam Potensi Konflik	138
V.3.3. Membagi Peran	139
BAB VI PENUTUP	141
VI.1. Kesimpulan.....	141
VI.2. Rekomendasi	144
DAFTAR PUSTAKA	145
GLOSSARY	148

Lampiran

- Peta Pulau Ambon sebelum dan sesudah konflik
- Peta Pulau Haruku sebelum dan sesudah konflik
- Peta Pulau Saparua sebelum dan sesudah konflik

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Konflik sosial yang terjadi di Maluku selama kurun waktu 1999 – 2001 telah mengakibatkan kurang lebih 5.000 orang meninggal dan sekitar 500.000 orang terusir dari tempat tinggalnya, Studi-studi yang telah dilakukan baik oleh peneliti dalam negeri maupun peneliti asing menyimpulkan akar persoalan penyebab konflik tidaklah tunggal. Persoalan kesenjangan sosial, perebutan sumber daya alam serta pertikaian elit politik dan birokrasi merupakan faktor pembungkus “konflik agama” yang selama ini diyakini oleh sebagian besar masyarakat.

Titik awal meluasnya konflik Maluku dimulai pada tanggal 19 Januari 1999, yang dipicu oleh sopir bis dan seorang pemuda di Desa Batu Merah – Ambon.¹ Perkelahian tersebut dalam waktu sekejap meluas menjadi aksi pembakaran di Desa Batu merah oleh massa serta perkelahian yang sporadis hampir di seluruh Kota Ambon. Meskipun aparat keamanan lokal maupun dari Kodam Wirabuana Makassar telah mencoba menghentikan aksi kekerasan, namun konflik di Ambon terus meluas.

Bahkan pertikaian massa tidak hanya terjadi di Kota Ambon saja, melainkan juga meluas hingga Maluku Tenggara. Di wilayah ini, pertikaian terjadi antara Suku Kao yang beragama Kristen dan Suku

¹Untuk analisis pemicu konflik kita tidak bisa mengabaikan peristiwa bentrokan dan pembakaran antara pemeluk agama Islam Desa Wailete dan pemeluk agama Kristen di Desa Hative besar pada tanggal 12 Desember 1998, akibat ulah oknum TNI dan peristiwa bentrokan antara Islam dan Kristen di Dobo Maluku Tenggara pada tanggal 14 Januari 1999.

Makian yang beragama Islam. Pertikaian antara kedua suku ini bermula dari adanya rencana pemekaran Kecamatan Malifut yang kaya akan tambang emas. Dalam pertikaian ini kurang lebih 100 orang meninggal dan 4000 mengalami pengusiran secara paksa dari tempat tinggalnya. Ekseks dari pertikaian di Ambon dan Malifut adalah adanya eksodus secara besar-besaran masyarakat Muslim khususnya mereka yang berasal dari Buton, Bugis dan Makassar, akibat pengusiran oleh masyarakat Kristen Maluku. Pada episode awal ini nuansa konflik etnis masih sangat terasa.

Konflik Maluku mereda pada bulan Mei 1999, yakni saat pemilihan umum, ketika Partai Demokrasi Indonesia- Perjuangan (PDI-P) Maluku yang dimotori oleh seorang mantan pengurus Partai Kristen Indonesia dan beberapa pimpinan klasis GPM (Gereja Protestan Maluku), menang mutlak di Ambon, tetapi pada bulan Juni 1999, konflik meledak kembali. Isu agama menjadi sangat kuat pada periode ini. Maluku menjadi hancur, luluh lantak dan terbelah. Masing-masing masyarakat membela iman dan keyakinannya, tidak peduli yang diserang adalah saudaranya sendiri.

Menurut catatan BakuBae, dalam konflik ini sistim perekonomian lumpuh total. Peralatan yang digunakan untuk berperang meningkat dari golok, tombak dan panah menjadi senjata api rakitan yang diproduksi sendiri oleh masyarakat setempat. Sedangkan suplai amunisinya sebagian besar berasal dari aparat keamanan (TNI dan POLRI) baik yang diperoleh dari perampasan, maupun melalui sumbangan dari oknum aparat yang bersimpati terhadap masing-masing kelompok.

Pada kurun ini secara jelas aparat POLRI terlibat secara intens dalam konflik. Bahkan korps terbelah berdasarkan keyakinan agama. Aparat Polisi yang berkumpul di Polres Ambon, misalnya berada di wilayah Islam dan membantu masyarakat setempat dalam memerangi orang/kelompok Kristen. Sebaliknya aparat polisi yang berkumpul di

Polda Ambon dan masuk wilayah Kristen, membela kelompok Kristen dan membantu kelompok tersebut bertikai dengan kelompok Islam.

Konflik Maluku terus berlanjut hingga tahun 2001, dan dalam periode ini didominasi oleh pertarungan antara Front Kedaulatan Maluku yang merupakan cikal bakal Laskar Kristus dengan Laskar Jihad. Kedua kelompok ini sama-sama mengatasnamakan agama dan menggunakan terminologi ideologi untuk berperang. Laskar Kristus atau FKM mengatasnamakan Kristen dan menggunakan isu separatistis (kemerdekaan Maluku) dan Laskar Jihad mengatasnamakan Islam dan menggunakan isu nasionalisme (NKRI). Pemberlakuan darurat Sipil dan penandatanganan perjanjian MALINO II tahun 2002 tidak mampu meredakan konflik di pulau mutiara ini, Konflik Maluku baru mereda setelah Laskar Jihad ditarik dari Ambon, penangkapan provokator dan operator konflik, dan adanya proses rekonsiliasi yang intens antar pihak-pihak yang bertikai yang dilakukan oleh beberapa LSM.

1.2. Permasalahan

Tingginya dinamika konflik di Maluku Tengah dan kompleksnya sumber persoalan sebagaimana diuraikan di atas, menyebabkan aktor yang berperan dalam konflik tersebut juga sangat kompleks. Dalam kaitan ini, penelitian aktor konflik di Maluku Tengah akan menganalisis secara mendalam tentang peran, jaringan, media/alat, misi dan visi aktor-aktor yang terlibat dalam konflik Maluku selama kurun waktu 1999-2002 di wilayah ini. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Kronologi konflik yang terjadi di Maluku Tengah pada tahun 1999-2002.
2. Struktur konflik di Maluku Tengah periode 1999-2002. Pada bagian ini akan dikaji sumber, akselerator dan pemicu konflik.

3. Analisa figur konflik, yang akan dibagi kedalam dua tataran yakni:
 - a. Peta kekuatan kelompok yang bertikai
 - b. Peta aktor yang terlibat dalam konflik

Permasalahan yang akan dicari dalam kajian ini adalah: apa tujuan kelompok, kepentingan, jaringan dan media yang dipakai baik oleh kelompok maupun individu dalam konflik
4. Proses penghentian kekerasan dan rekonsiliasi pihak-pihak yang bertikai/berkonflik. Permasalahan yang akan dicari adalah sejauh mana upaya yang dilakukan negara dan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses penghentian kekerasan dan rekonsiliasi. Dari itu akan ditelusuri model mana yang paling efektif sejauh ini, serta potensi konflik di masa mendatang.

Untuk memperkaya analisa, kajian ini juga akan menelusuri sejarah konflik di Maluku

1.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Louis Kriesberg kajian tentang konflik dapat dibedakan menjadi empat hal, yaitu: (1) isu yang dikonflikkan; (2) karakteristik dari kelompok-kelompok yang berkonflik; (3) hubungan antara kelompok-kelompok yang berkonflik; dan (4) cara yang digunakan oleh masing-masing kelompok dalam berkonflik.²

Isu konflik di Indonesia adalah paduan dari beberapa isu lama yang masih berlanjut dan isu baru yang muncul sebagai sisi lain dari gerakan reformasi. Isu lama yang dimaksud yakni ketidakpuasan terhadap kekuasaan dalam pemerintahan yang dianggap oleh beberapa daerah sangat sentralistik, mendikte dan diskriminatif., baik

² Louis Kriesberg, *Sosial Conflict*, Second Edition, (Englewood Clifft,N.Y: Prentice Hall, Inc,1982), Hal.36

yang menyangkut pengelolaan sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Sementara itu, isu baru yang muncul ialah berkembangnya euphoria demokrasi di kalangan masyarakat sebagai konsekuensi dari runtuhnya kekuasaan rezim Orde Baru. Konflik yang muncul pada masa transisi ini ialah lahirnya ke"aku"an kelompok yang membedakan dengan "mereka", situasi ini dipertajam manakala diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah sejak Januari 2001. Perbedaan antara "aku" dan mereka memunculkan kondisi konflik yang menurut Koentowijoyo salah satunya bersumber dari ketidakselarasan kultural (*cultural incompatibility*).³ Namun, faktor kultur sebagai sumber konflik juga dapat muncul dari tiadanya penghargaan suatu kelompok (seringkali kaum pendatang di suatu daerah) terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Atau warga pendatang menganggap rendah kebiasaan dan adat istiadat masyarakat lokal. Pada keadaan demikian, menurut Eriksen -- suatu kelompok etnis atau kelompok identitas dapat bangkit kembali karena warga kelompok tersebut menganggap diri mereka berada di bawah ancaman.⁴

Mengenai karakteristik dari kelompok-kelompok yang berkonflik dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu (1) kejelasan batas-batas antara kelompok-kelompok yang berkonflik, dan (2) derajat pengorganisasian masing-masing kelompok.⁵ Batas-batas kelompok yang berkonflik erat kaitannya dengan pola interaksi dan komunikasi yang dikembangkan dari dua belah pihak, kehidupan anggota setiap

³ Koentowijoyo, *Kar-karkar Dry Field Cultivation*, dalam: Gatra, (27 Maret, 1999)

⁴ Thomas Hylland Eriksen, *Ethnicity & Nationalism: Anthropological Perspective*, (Londonan Boulder, Colorado, Pluto Press, 1993), Hal 142.

⁵ Louis Kiesberg, *Sosial Conflict*, ...op.cit, Hal, 119

kelompok yang banyak dipengaruhi oleh komitmen anggota dalam kelompoknya.

Dalam hal derajat pengorganisasian kelompok-kelompok yang berkonflik, ada tiga hal yang perlu dianalisis: Pertama, anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berkonflik tidak mempunyai identitas bersama dan tidak terorganisir dengan baik. Kedua, anggota-anggota yang berkonflik sangat sadar dengan identitas kelompok mereka. Dalam kelompok kedua ini terdapat diferensiasi peranan dalam mempertahankan organisasi yang dikaitkan dengan spesialisasi masing-masing anggota dalam hubungan konflik dengan kelompok lawan dan kelompok-kelompok tertentu diluar mereka. Ketiga, kepemimpinan dalam kelompok-kelompok yang berkonflik. Dalam kelompok yang sangat terorganisir dan terdiferensiasi dengan baik, ada kecenderungan pemimpinnya mengklaim dirinya untuk mendapatkan legitimasi dan otoritas yang dapat mewakili seluruh anggota kelompok, diakui oleh pihak lawan, dan perannya diterima oleh mereka.

Karena suatu konflik sosial selalu melibatkan banyak pihak, maka analisis terhadap suatu konflik juga tidak terlepas dari keseluruhan hubungan antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Bagaimana bentuk dan pola hubungan yang dikembangkan dan apa tujuannya, merupakan masalah dasar yang perlu dicermati. Kelompok-kelompok yang berkonflik bisa saja *independent* dari kelompok lain yang lebih besar yang mempunyai yuridiksi atasnya, atau sebaliknya berada di bawah serta menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar yang mempunyai kekuasaan di atasnya. Walaupun pihak lain telah menentukan hubungan sistematis antara kelompok-kelompok yang berkonflik, kelompok-kelompok yang bersangkutan bisa tidak setuju, karena mungkin isu yang dikonflikkan adalah status mereka masing-masing di dalam sistem. Hal ini penting untuk diingat agar tidak membuat asumsi yang secara implisit partisan.

Hal lain yang penting dan menentukan hubungan antara kelompok-kelompok yang berkonflik ialah sistem sosial di mana kelompok tersebut berada dan menjadi bagian daripadanya. Sehubungan dengan itu, perlu pula diperhatikan "*power inequality*" dan konteks sistem karena kedua hal itu mempengaruhi kelompok-kelompok yang berkonflik. Pengaruh yang ditimbulkannya dapat berkaitan dengan derajat integrasi di antara mereka, derajat dan isi norma-norma dan kepercayaan yang diyakini bersama, serta kekuasaan relatif yang dimilikinya, penggunaan sanksi negatif atau pemaksaan baik yang nyata maupun yang berupa ancaman oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain agar bertindak sesuai dengan keinginan yang bersangkutan.

I.4 Tujuan Penelitian:

1. Melakukan pemetaan dan analisa sumber, akselerator dan pemicu konflik di Maluku Tengah periode 1999 – 2002
2. Melakukan pemetaan dan analisa kelompok-kelompok dan aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut.
3. Memetakan dan menganalisa peran sumber dan jaringan dari kelompok dan aktor yang terlibat dalam konflik di Maluku Tengah.

I.5. Metodologi

Metodologi penelitian yang akan digunakan ialah studi kepustakaan dan lapangan. Melalui studi kepustakaan diharapkan dapat dipelajari alternatif teoritis dan fakta-fakta empirik baru mengenai konflik di Maluku Tengah. Dengan metode ini pula akan ditelusuri dokumen-dokumen tertulis, terbitan khusus, maupun selebaran yang dianggap memiliki signifikansi dengan obyek penelitian.

Studi lapangan dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yang dipandu oleh sebuah pedoman wawancara terstruktur. Adapun narasumber penelitian dipilih berdasarkan perannya selama konflik maupun pasca konflik, komposisi keterwakilan kelompok yang berkonflik didasarkan posisi di masyarakat, agama dan jaringan yang dimiliki. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka nara sumber penelitian sebagai berikut:

I.6. Nara Sumber

No	Lokasi Wawancara	Nara Sumber	Agama	Kelompok
1	Jakarta	Ichsan Malik	I	Fasilitator
2	Jakarta	Piet Manoppo	K	TOGA
3	Jakarta	Abubakar Riry	I	Pemuda
4	Saparua	Raja Tuahaha - Albert Tanalepi	K	Latupati
5	Saparia	Pemuda Ulath - Co Latupatty	K	Pemuda
6	Saparua	Imam SiriSori - Yusuf Pelupessy	I	Imam
7	Saparua	Sekdes Kulur – Jaben (diskusi bersama Kewang)	I	SekDes
8	Tulehu, Ambon	Mantan SekDes – Iha (diskusi bersama dengan salah seorang tokoh pengungsi)	I	Bekas SekDes & wakil Pengungsi
9	Haruku	Raja Kailolo (diskusi bersama dengan bekas raja, kewang, TOGA dan TOMAS setempat)	I	Raja
10	Baguala	Marten Sarimanella	K	Pemuda
11	Suli,Salahutu	Pendeta Suli	K	Pendeta
12	Leihitu	Raja Negeri5 - Moh Saleh Soulissa	I	Raja
13	Hitulama	Haji Slamet	I	Pemuda
14	Ambon	Raja Kariu - Andi Patinasarany	K	Raja
15	Batumerah	Raja BatuMerah - Abdul Rahman	I	Raja
16	Ambon	Sekretaris Desa Pelauw	I	Sekdes
	Ambon	Pendeta Noce Patinaya	K	Pendeta
17	Sirimau	Ustadz Al-Fatah - Ali Fauzy	I	Imam

Bab I - Pendahuluan

18	Ambon	Polisi1 – Yc	K	Aparat K
19	Ambon	Polisi2 – Yp	K	Aparat K
20	Ambon	Imam Pohon Mangga - Harun &	I	Imam
21		Emang Nikijuluw	K	Pemuda
22	Ambon	Pemuda Mardika - Raymond Toulussa	K	Pemuda
23	Ambon	Mantan Raja Wayame - D.A. Hunihua	K	Raja

Keterangan : (I) Islam, (K) Kristen

Selain itu, studi kepustakaan dan penelitian lapangan juga dilakukan *Focus Group Discussion* dengan kalangan aktor maupun sumber yang kompeten dalam persoalan konflik di Maluku Tengah.

1.7. Pembabakan Penulisan

Laporan penulisan akan dibagi dalam lima bab. Pertama: Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang, permasalahan, kerangka teori, tujuan serta metode penelitian yang digunakan. Kedua; Masyarakat Maluku Tengah: Perbandingan Pasca & Pra Konflik, bab ini akan menguraikan lebih jauh tentang bagaimana data demografis, pemetaan teritori, pemetaan sumber daya alam, serta mobilitas sosial dan politik masing-masing komunitas. Ketiga, Analisa Struktur Konflik, dalam bab ini akan diuraikan kronologis kerusuhan, sumber konflik, faktor akselelator, faktor pemicu konflik serta kronologi konflik yang terjadi di Maluku Tengah. Keempat, Analisa Figur Konflik, bab ini akan membahas lebih jauh tentang bagaimana peta kelompok yang bertikai dan peta aktor yang bertikai. Termasuk didalamnya adalah bagaimana sesungguhnya tujuan, cara, dan jaringan yang digunakan kelompok/individu dalam konflik yang terjadi pada tahun 1999-2001. Kelima; Proses Penghentian Kekerasan dan Rekonsiliasi, bab ini akan mengulas bentuk-bentuk penghentian kekerasan dan upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat

Bab I - Pendahuluan

dalam penyelesaian konflik di Maluku Tengah, serta apa saja yang bisa menjadi potensi konflik pada masa mendatang. Keenam, Penutup; bab ini akan menyarikan semua temuan yang dihasilkan oleh penelitian ini serta beberapa rekomendasi yang diajukan oleh tim peneliti berkaitan dengan penelitian tersebut.

BAB II

DESKRIPSI PERBANDINGAN KONDISI POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA PRA DAN PASCA KONFLIK DI MALUKU TENGAH

Kepulauan Maluku yang terdiri dari gugusan pulau besar dan kecil merupakan pulau yang memiliki daya tarik yang begitu hebat bagi berbagai etnis disekitarnya maupun suku bangsa lain yang dari dulu mengenal Maluku sebagai surga rempah-rempah. Daya tarik tersebut semakin terlihat menguntungkan bagi sektor bisnis maupun bagi para pelancong ketika banyak orang tahu tentang potensi sumber daya alam yang melimpah dengan potensi mobilitas perputaran perdagangan yang relatif tinggi. Apalagi di Kecamatan Nusaniwe Ambon terdapat banyak obyek wisata yang sangat menarik untuk dikunjungi; seperti misalnya Pantai Namalatu yang memiliki pasir putih dengan air bening yang menghadap langsung ke Laut Banda.

Ketika mendengar istilah Jazirah Al Muluk dan Seribu Pulau sebagai sebutan Pulau Maluku, maka pengertian yang muncul dari pengakuan di atas adalah Maluku merupakan daerah yang banyak pulau dengan tiap-tiap komunitas memiliki struktur sistem sosial dan kebudayaan yang relatif sama satu dengan yang lainnya. Konfigurasi pemukiman dominan terfokus di sepanjang pesisir yang seolah-olah mencerminkan penghuninya memanfaatkan laut sebagai wahana sentra aktifitas mereka. Kemudian, terdiktominya daerah-daerah berdasarkan agama bukan berarti keberadaannya disengaja oleh masyarakat setempat karena faktor adat, melainkan peran dominasi kekuasaan penjajah-lah yang menimbulkan peta baru setting sosial di Maluku.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan kondisi mengenai Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon yang merupakan kawasan pusat konflik dengan intensitas tinggi dibanding dengan daerah-daerah di Kepulauan Maluku lainnya – yang lebih cenderung merupakan dampak lanjutan. Kondisi yang akan digambarkan lebih mengarah kepada persoalan mobilitas sosial, termasuk pola atau mekanisme hubungan di antara masyarakat, sebelum dan sesudah konflik horisontal yang terjadi antara tahun 1999 sampai dengan 2001.

Untuk memperjelas paparan di atas, penting untuk dicatat bahwa Maluku Tengah memiliki luas wilayah kurang lebih 257.890 Km², yang terdiri dari luas laut 238.296 Km², dan luas daratan 19.594 Km². Secara rinci luas pulau dan kepulauan di Kabupaten Maluku Tengah sesuai hasil survei persemakmuran tahun 1954 terdiri dari; Pulau Ambon 384 Km² + 377 Km² wilayah Kota Ambon, Pulau Haruku 150 Km², Pulau Saparua dan Nusalaut 209 Km², Kepulauan Banda 172 Km², serta Pulau Seram dan pulau-pulau kecil 18.679 Km².

Kondisi demografis Maluku Tengah sebenarnya tercipta dari peradaban Pulau Seram dan Pulau Buru. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat di kedua pulau tersebut bermigrasi ke pulau-pulau sekitarnya, termasuk kemudian membentuk peradaban baru di Kepulauan Lease (Pulau Haruku, Pulau Saparua, dan Pulau Nusalaut) dan Pulau Ambon. Hal itulah yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan mengintroduksi kebijakan baru agar dapat berasimilasi dengan *Kebudayaan Seram* yang sudah mendapat pengaruh dari kebudayaan sekitarnya, yaitu pengaruh kebudayaan Melanesia (tradisi *Kakean*) dan Melayu, serta kekuasaan Ternate dan Tidore.⁶

⁶ <http://www.fica.org/hr/ambon/idRusuh1.html>

Pola kebijakan pengawasan (kontrol) Pemerintah Kolonial yang dilakukan dengan cara memindahkan lokasi pemukiman penduduk yang dulunya tersebar di pedalaman atau di pegunungan menjadi terkonsentrasi di pesisir pantai bertujuan mempermudah pengawasan terhadap masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan produksi rempah-rempah. Istilah Negeri yang menunjukkan pelbagai komunitas di Maluku sebenarnya merupakan bentukan Belanda juga – yang dulunya berasal dari sebutan *Hena* atau *Aman*. Pemberian istilah tersebut diikuti pula dengan pembentukan teritori komunal berdasarkan dikotomi agama (Islam – Kristen). Tujuan dari Pemerintah Kolonial Belanda sebenarnya adalah untuk mempermudah hegemoni, memanfaatkan penduduk yang loyal dan juga melakukan misi keagamaan (Kristenisasi). Warga protestan yang berpendidikan masuk dalam birokrasi Belanda, sementara yang tidak berpendidikan bergabung dengan tentara kolonial Belanda. Sedangkan warga Islam yang tidak mau pindah agama dianggap identik dengan aktivis pemberontak dan seringkali dijadikan obyek pembantaian.

II.1 Struktur Sosial

Pembentukan formasi negeri yang dilakukan oleh kolonial Belanda sebenarnya tidaklah disebabkan untuk lebih menunjukkan organisasi sosial yang didasarkan atas garis keturunan (*geneologis*). Memang sebenarnya setiap negeri memiliki sejumlah suku/marga eksogami (perkawinan campuran) yang bersifat patrilineal. Suku/marga itulah yang disebut sebagai *mata rumah*⁷. Mata rumah menjadi sangat penting dalam suatu negeri karena tidak hanya merupakan refleksi garis keturunan, namun juga penetapan status

⁷ Mata rumah merupakan sebutan dari bahasa Melayu yang bahasa asli sebenarnya adalah *rumah tau*, dan istilah *fam* sebenarnya berasal dari Belanda. Cooley 1962:36. Richard Chauvel, *Nationalists, Soldiers and Separatists*, KITLV Press, Leiden, Netherlands, 1990, hlm. 5.

kelompok utama dalam *familie* yaitu hubungan antara dua mata rumah yang menjadi ikatan darah karena suatu pernikahan. Hubungan turun-temurun mata rumah inilah yang juga kemudian memberikan dampak terhadap pengorganisasian atas kontrol dan penggunaan *tanah dati* yang dianggap sebagai warisan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak luar.⁸ Selain itu, status mata rumah tertentu sangat berpengaruh kedudukannya dalam administrasi negeri dan administrasi masjid (*kasisi*) di dalam negeri Islam.

Salah satu bagian terpenting dalam administrasi suatu negeri adalah *soa*. *Soa* terdiri dari sejumlah mata rumah yang hubungannya tidak begitu memerlukan ikatan kekeluargaan. Kata *soa* berasal dari bahasa asli Ternate yang berarti bagian geografis dari suatu kota atau desa. Tiap-tiap *soa* dipimpin oleh *kepala soa* yang kedudukannya di bawah *raja*. Kepala *soa* dan begitu juga dengan *raja* pada awalnya ditunjuk oleh rejim kolonial. Beberapa kedudukan lain yang penting dalam administrasi suatu negeri adalah *tuan tanah* yang merupakan representatif dari pendiri keluarga, *mauweng* yang mengurus kaitannya dengan kegiatan kepercayaan (ritualisme), *kapitan* merupakan pemimpin perang, dan *kewang* yang dipercaya untuk memelihara keamanan negeri.

Van Hoëvell memberikan gambaran bahwa ada lima kelompok tingkatan status dalam administrasi suatu negeri. Kelima kelompok tingkatan itu adalah:

⁸ *Tanah dati* yang dikontrol oleh mata rumah sebenarnya telah diatur sejak awal abad ke 17 sebagai hasil dari *hongitochten* (pembersihan yang dilakukan oleh Belanda dengan dibantu oleh orang-orang Ambon untuk melindungi kebijakan monopoli cengkeh). Tanah tersebut diberikan sebagai hadiah atas kesediaan mata rumah dalam penyediaan tenaga kerja. (Cooley 1962:235) Selain tanah dati, ada dua tipe tanah yang sangat penting di dalam negeri. Kedua macam tanah itu adalah *tanah negeri* yang dimiliki oleh Negeri, dan *tanah pusaka* yang dimiliki oleh masing-masing kepala keluarga. Dikutip dari Richard Chauvel, *Ibid.*

- a. *Bangsa Raja*, baik berasal dari mata rumah yang sedang atau lampau sebagai raja.
- b. *Bangsa hatsil*, di mana kepala soa dipilih.
- c. *Bangsa kepala kawang*, mata rumah yang menghasilkan penjaga negeri yang dipilih.
- d. *Bangsa mesing*, penduduk biasa.
- e. *Bangsa budak*,

Menurutnya, kelima golongan tersebut tidaklah memiliki perbedaan yang besar dan bahkan perkawinan terjadi diantara status tersebut.⁹

Kedudukan yang memiliki peran paling penting dalam suatu negeri adalah raja. Tentu saja peran yang dimainkan oleh raja memiliki variasi kepentingan dalam beberapa periodisasi. Pergeseran tersebut terutama berkaitan dengan kompleksitas mekanisme pemilihan, kewajiban dan tanggung jawab, serta dalam hal pengambilan kebijakan. Di era sebelum kolonialisme, peran raja begitu sentral dalam hubungan sosial di suatu negeri. Raja mampu mengayomi masyarakat dengan kebijakannya yang populis. Demokratisasi mampu diciptakan dengan tetap memperhatikan pandangan kebijakan dari tetua negeri, yaitu dari kepala soa ataupun dari *saniri-negeri* (dewan adat)¹⁰. Kestabilan dari sirkulasi pergantian raja juga terlihat tidak ada gejolak karena secara populis, legitimasi yang diberikan bersandar pada nilai-nilai supranatural. Meskipun pemilihan hanya memunculkan kontestan dalam satu klan, komunitas adat tetap berkeyakinan bahwa raja harus berasal dari suatu mata

⁹ G.W.W.C. Baron Van Hoëvell, *Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers, geographisch, ethnographisch, politisch en historisch geschetst*, dalam Richard Chauvel, *Ibid*,..

¹⁰ *Saniri-negeri* merupakan dewan adat yang juga terdiri dari kepala soa ditambah dengan beberapa perangkat negeri lainnya. Jumlah dan perangkat negeri yang terlibat dalam *saniri-negeri* memiliki variasi yang berbeda di tiap-tiap negeri.

rumah yang secara turun-temurun dianggap pantas, karena telah dipercaya memiliki kesaktian dan karisma.

Pada masa kolonial, posisi raja mengalami perubahan fungsi yang mengarah pada dilema tanggungjawab. Disatu sisi raja harus mampu mengayomi negeri dari ancaman pihak luar, dan sisi lain harus tunduk kepada kepentingan pemerintah kolonial. Dalam terminologi kolonial Belanda, raja dianggap memiliki kekuatan sentral (*popular chief*) yang bisa dipakai untuk mengkooptasi pelbagai elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu, sebagai representasi kewenangan tertinggi Negara Belanda dengan asumsi penunjukan langsung oleh kepala *House of Orange*, raja memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan sekaligus mengkoordinir tenaga kerja yang dipakai dalam pengolahan cengkeh.
- b. Sebagai agen untuk mendapatkan permintaan pasar atas hasil monopoli cengkeh.

Peran raja kembali mengalami perubahan setelah monopoli cengkeh dihapuskan pada tahun 1863. Pada masa ini peran raja berfungsi sebagai penjaga hukum dan peraturan, mengumpulkan pajak, dan mengurus atau mengorganisasi korve/tobang. Penghapusan monopoli dan perubahan administratif mempengaruhi pula hubungan kekuatan di dalam negeri secara signifikan. *Pittisgeld* dan *hasilgeld* (persentase hasil panen cengkeh yang dibayarkan untuk raja) dihapuskan bersamaan dengan penghapusan monopoli tersebut. Sebagai gantinya, raja diberi kompensasi secara finansial yang didasarkan pada rata-rata cengkeh pertahun pada suatu negeri diawal tahun. Raja juga menerima 8% dari pajak perkepala (5 guilders per rumah tangga per tahun), dan sepertiganya didistribusikan kepada kepala soa. Dalam hal ini Raja Kristen lebih diuntungkan karena dari tahun 1875 – 1932 mereka mendapatkan 50 guilders untuk setiap warganya yang bergabung menjadi tentara kolonial. Yang tentunya penting dari masa ini adalah dihapuskannya

tenaga kerja pelayanan seperti *kardjo trop* dan *kwartodienst* (pekerja pribadi untuk raja). Pengemuka negeri sengaja didesain untuk menyediakan tenaga kerja dalam pengolahan cengkeh. Hal tersebut tergantung dari ukuran luas negeri, dan biasanya dibagi menjadi dua atau empat kelompok, di mana laki-laki dewasa menjadi alternatif dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Beberapa raja memang sengaja menggunakan keuntungan para tenaga kerjanya sendiri langsung untuk pengolahan cengkih kepada pemerintah. Di Pelauw, negeri muslim di Haruku misalnya, raja memiliki 70 orang (*kwartodienst*) yang bekerja padanya setiap hari secara sah dan legal. Beberapa raja terkadang menggiring *kardjo trop* mereka untuk bekerja pada orang-orang Eropa dan Arab di Kota Ambon. Para pekerja tersebut juga dipakai dan tidak dibayar sebagai manusia perahu untuk mengantarkan para pejabat keliling pulau. Penghapusan kewajiban pengelolaan dan pemesanan membuat keuntungan besar bagi raja tetapi tidak bagi para warganya. Kenyataan ini berlangsung hingga tahun 1881, ketika Resident J.G.F. Riedel mengeluarkan suatu nota instruksi baru bagi raja untuk menghentikan permintaan pelayanan *kardjo trop* dari rakyatnya. Nota juga menyebutkan secara detail batasan kekuasaan yudisial raja. Hal tersebut ternyata memprovokasi protes dari beberapa raja. Banyak raja yang tetap menginginkan kompensasi peningkatan pelayanan pribadinya (*kwartodienst*). Kenyataannya reformasi Riedel berlaku efektif dalam meredam kekuasaan raja atas rakyatnya, dan juga kontrol atas sumberdaya ekonomi negerinya.

Di tahun 1920 pelayanan *kwarto* dan *hakikil* dihapuskan karena penyebaran penyalahgunaan dan diganti dengan kontribusi pemerintah (*toelage*) yang berupa pemberian secara adil lima guilders setiap orang dewasa per tahun. Penghapusan ini tentunya banyak menimbulkan protes dari raja. Menurut anggapan para raja bahwa pelayanan tersebut merupakan bagian integral dari sistem penggunaan tanah datu. Hak untuk menggunakan datu (*makan datu*) juga terbersit kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada raja

dan rumahtangganya. Jika kwarto tersebut ditarik maka sistem dati juga akan ikut punah. Hal tersebut dilakukan oleh orang-orang Eropa untuk mengurangi pengaruh raja terhadap lingkungannya sebagai patron. Akibatnya, secara ekonomi raja menjadi sangat buruk jika dibandingkan dengan pegawai pemerintah dalam negeri, para guru, dan pendeta. Dengan adanya sistem ini maka raja tidak lagi populer atau tidak memiliki legitimasi dari warganya.

Dalam perkembangan selanjutnya, raja menggunakan *Ambonsraad* dan *volksraad* sebagai forum untuk membicarakan keadaan yang menyedihkan tersebut agar bisa diperhatikan pemerintah. De Queljoe sebagai perwakilan dari *Voolksraad* misalnya mengusulkan agar sistem toelage diganti dengan suatu pajak. Dengan adanya stimulan dari De Queljoe maka pada tahun 1932 *volksraad* memberikan masukan kepada pemerintah agar kondisi ekonomi raja ditingkatkan. Kemudian pada akhir tahun 1935 resident mengusulkan kepada *Ambonsraad* agar toelage diganti dengan biaya yang berasal dari pendapatan *Ambonsraad*.

Memang banyak pihak yang menyatakan bahwa peran raja tidaklah begitu signifikan dalam membawa kemajuan suatu negeri. Perubahan peran raja kembali berubah pada era Orde Baru terutama pada saat penerapan Undang-undang (UU) No. 5 tahun 1979 mengenai pemerintahan desa. Penerapan UU tersebut berimplikasi pada penghancuran sistem adat beserta perangkatnya karena adanya struktur sentralis telah diseragamkan di seluruh daerah di Indonesia. Tak heran jika negeri kemudian diganti dengan desa atau kelurahan, raja diganti kades atau lurah, Saniri diganti LKMD, Kepala Soa diganti Ketua RW dan lain-lainnya. Perubahan itu bukan saja terletak pada sisi semantik belaka melainkan secara esensial berpengaruh pada struktur dan fungsi kelembagaan. Kades tidak memiliki nilai adat yang sama dengan Raja, begitu juga saniri tidak memiliki nilai yang sama dengan LKMD. Memang pada awalnya dualisme pemerintahan masih terjadi antara desa dengan negeri, atau lurah dengan raja. Namun

karena perubahan-perubahan yang dilakukan oleh lurah/kepala desa dengan biaya dan program dari pemerintah, terkesan fungsi nyata yang dilakukannya lebih efisien dan efektif daripada yang dilakukan oleh raja. Fungsi birokrat yang dilakukan oleh kepala desa seperti misalnya membangun prasarana jalan, sekolah, tempat ibadah, pasar, mengurus KTP, menyelesaikan surat-surat tanah, dan sebagainya lebih dirasakan masyarakat dibandingkan dengan fungsi raja yang hanya mengurus persoalan adat yang makin lama makin ditinggalkan orang. Penyeragaman ini merupakan semacam “paksaan” bagi komunitas lokal untuk secara perlahan meninggalkan keharmonisan sistem yang telah terpelihara dalam ikatan adat. Kenyataan tersebut juga memaksa masyarakat mencari bentuk-bentuk ikatan baru seiring dengan “pembangunanisme” yang dilancarkan oleh pemerintah Orde Baru. Ikatan-ikatan baru tersebut lebih muncul pada aras lokal (desa) seperti misalnya koperasi desa, ikatan nelayan desa dan bahkan ikatan dalam hal politik.¹¹ Sedangkan asosiasional lintas agama sudah mulai pudar dengan pengentalan *etno religi* di masing-masing komunitas.

Dengan berakhirnya Orde Baru maka peraturan tentang desa dan segala pengaturan di dalamnya tidak lagi diseragamkan. Lewat UU No. 22 Tahun 1999 maka status negeri beserta peran raja dan fungsi yang lainnya di Maluku dikembalikan untuk berjalan sesuai dengan adat aslinya. Desentralisasi yang berlangsung ternyata juga dilandasi dengan “modernisasi” yang telah diciptakan oleh Orde Baru. Peran raja sudah sangat susah menjadi figur perekat hubungan sosial masyarakat yang terjalin secara lintas negeri maupun agama.

¹¹ Mus Huliselan, “Pemberdayaan Kebudayaan Maluku Tengah : Untuk Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru”, Makalah yang disampaikan pada “Dialog Nasional tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal demi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, yang diselenggarakan bersama oleh The Go-East Institute, Crisis-Center-Ambon, Pemda Tingkat I Maluku, di Langgur, Maluku Tenggara, 14-17 Maret 2001.

Demarkasi pemukiman berdasarkan segregasi agama kini semakin nyata dengan pengentalan egosektoral atau etnosentrisme masing-masing kelompok. Sangat jelas bahwa pengembalian status negeri ternyata tidak sinergis dengan totalitas kesadaran masyarakat Maluku Tengah untuk kembali pada toleransi kesatuan adat sebagaimana yang telah terjalin erat dalam hubungan diantara nenek moyang mereka.

Perlu dicatat bahwa struktur sosial (pada tataran atas) negeri Islam dengan Kristen memiliki perbedaan. *Pendeta* dalam komunitas Kristen sebenarnya merupakan guru sekolah dan juga tetua gereja. Namun sebagai perwakilan gereja, pendeta memiliki status yang sama dengan raja, tetapi diluar struktur adat. Cooley menggambarkan bahwa pola-pola konflik kepentingan antara pendeta dengan raja sering terjadi pada masa kolonial. Hal tersebut tidaklah terjadi dalam negeri Islam, di mana peran Imam (pemimpin agama Islam) merupakan subordinat dari raja. Tetapi raja hanya memberikan kewenangan pengawasan dan pertanggungjawaban dalam persoalan penting agama. Perbedaan yang sangat penting juga adalah perlindungan terhadap nilai-nilai asli kebudayaan setempat lebih dipertahankan oleh negeri Islam dibandingkan dengan komunitas negeri Kristen. Bagaimanapun juga *bahasa tanah* misalnya masih bisa dipegang oleh negeri Islam sebagai suatu simbol perbedaan dengan negeri Kristen yang telah terpengaruh oleh budaya asing. Bagi negeri Kristen telah terpengaruh oleh ajaran Pastor-pastor Eropa dalam aktifitas Kristiani. Sedangkan pada komunitas Islam sampai dengan menjelang akhir abad ke 19 masih dengan peradaban menemukan nilai-nilai sendiri sebagai hasil dari akomodasi keyakinan Islami dengan adat.¹²

Dikotomisasi setting komunitas sosial yang membentuk Negeri-negeri *Sarani* (Kristen) dan Negeri-negeri *Salam* (Islam) sebenarnya merupakan segregasi yang sejak awal sangat rentan,

¹² Richard Chauvel, *Ibid.*

yang pada tahap selanjutnya dapat menimbulkan konflik antar komunal. Namun begitu, konflik yang terjadi tidaklah sampai muncul ke permukaan karena manajemen pengelolaan sumberdaya alam maupun aktualisasi nilai-nilai agama tetap didasarkan pada nilai-nilai solidaritas sosial yang terbungkus dalam tradisi adat, dan menjadi pegangan di kedua komunitas. Masing-masing Raja menyadari betul arti pentingnya jalinan persaudaran antar negeri, sehingga kekuasaan yang mereka miliki adalah dalam rangka mempertahankan kohesi sosial.

II.2. Persebaran Agama dan Etnis

Komposisi penduduk berdasarkan agama di Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon sebenarnya sangat bervariasi. Namun pemeluk secara umum didominasi oleh perimbangan jumlah yang relatif sama antara Islam dan Kristen. Di Maluku Tengah tahun 2001 misalnya terdapat 60,81% dari total jumlah penduduk yang menganut agama Islam, 35,80% menganut agama Kristen Protestan, dan 2,04% yang memeluk agama Kristen Katolik.¹³ Sedangkan di Ambon, pada tahun 2001 jumlah umat beragama tercatat 220.988 orang, dengan perincian yang beragama Kristen Protestan 121.843 orang (55,14%), Islam 85.778 orang (38,82%), dan Katolik 13.020 orang (5,89%). Mayoritas pemeluk agama Kristen Protestan mendiami Kecamatan Nusaniwe dan Teluk Ambon Baguala. Sedangkan mayoritas yang beragama Islam berada di Kecamatan Sirimau.¹⁴ Kemudian untuk peta persebaran pemukiman penduduk berdasarkan agama bisa dilihat dalam lampiran.

Perlu diketahui bahwa agama Islam mulai masuk ke Maluku sekitar awal abad ke 14 Masehi yang diperkenalkan oleh saudagar

¹³ Maluku Tengah dalam Angka, BPS, 2001

¹⁴ Kota Ambon dan Angka, BPS, 2001

Arab, India, dan Samudera Pasai yang merupakan rumpun Abraham. Namun Islam baru diterima sebagai agama kerajaan di kesultanan Ternate pada akhir abad ke 14 Masehi ketika Sultan Ternate Zainal Abidin Syah kembali dari Giri. Sebab itulah pemeluk agama Islam terbanyak di Maluku bermukim di Ternate (Maluku Utara).

Kedatangan Agama Kristen di Maluku dibawa oleh kolonial Eropa (Portugis dan Belanda). Masuknya Portugis di Maluku (1512 – 1605), selain bertujuan mencari rempah-rempah, juga melakukan misi penyebaran agama Kristen (Katolik). Misi yang dijalankan berhasil menciptakan segregasi komunal atas dasar agama. Begitu halnya dengan Belanda, yang dalam perkembangannya tidak hanya melakukan pengkristenan beberapa daerah namun juga mengusir misionaris Katolik yang mempengaruhi rakyat untuk beralih ke Protestan (Calvinisme). Contoh daerah yang di-Kristen-kan oleh Belanda adalah Desa Iha Mahu yang terletak di Pulau Saparua. Desa Iha Mahu awalnya berasal dari Desa Iha yang sejak awal menganut agama Islam. Maka dari itulah sebutan Desa Iha Mahu merupakan sebutan bagi mereka yang mau masuk agama Kristen. Sedangkan sebutan untuk Negeri Iha yang tidak mau ikut Kristen disebut dengan Iha Luhu.

Selain pemberlakuan segregasi komunal berdasarkan agama, konfigurasi etnis yang terutama tercermin dari keberadaan penduduk migran ternyata juga dikategorikan. Di Maluku Tengah, dikenal adanya dua kelompok atau kategori sosial berdasarkan migran dan lokal, yaitu *Orang Dagang* dan *Anak Negeri*. Istilah Anak Negeri dipakai untuk penyebutan penduduk asli Maluku Tengah yang hereditasnya di negeri (desa adat) itu. Sedangkan yang bisa dikategorikan sebagai Orang Dagang adalah para pendatang dari luar Negeri, baik karena ikatan perkawinan dengan Anak Negeri, karena tugas-tugas pelayanan masyarakat dari pemerintah (guru, mantri kesehatan, mantri pertanian, dan lain-lain), ataupun karena aktivitas ekonomi (penggarap tanah atau pemungut hasil hutan, atau

pedagang). Jadi, Orang Dagang di sebuah Negeri, dapat berasal dari Orang Maluku Asli yang berasal dari Negeri lain, ataupun pendatang dari luar Maluku. Sebagai contoh pendatang yang dominan karena faktor kepentingan ekonomi yaitu mereka yang berasal dari Buton, dan suku bangsa Cina serta Arab. Orang Dagang dari luar Maluku ini datang dan menetap dalam Negeri, baik berbaur dengan Anak Negeri, maupun membentuk suatu komunal lain dalam *Petuanan Negeri*.

II.3. Komposisi Etnis dan Pemukiman

Secara rinci komposisi penduduk di Maluku terdiri dari beberapa etnis yang antara lain adalah etnis Maluku keturunan Arab, penduduk asli blasteran Negroid-Melayu, dan etnis pendatang dari Bugis, Buton, Makassar, Sumatra, Jawa, Madura, Bali, Toraja, Cina. Di antara etnis pendatang tersebut yang paling dominan adalah Bugis, Buton, dan Makassar (BBM). Etnis Buton merupakan etnis yang paling banyak dan lama menetap di Maluku. Pendatang Buton pertama kali datang ke Maluku sekitar tahun 1800-an. Pada awalnya kedatangan mereka adalah untuk membantu etnik Islam yang ada di Maluku dalam melawan Belanda. Dalam perkembangan berikutnya, orang-orang Buton memilih untuk menetap di Maluku karena daerah asal mereka – mayoritas dari Pulau Binongko (Pulau Tukangbesi) Sulawesi Selatan – merupakan daerah yang secara geografis sangat tidak mendukung untuk lahan pertanian. Para pendatang Buton tersebut tersebar di Pulau Ambon, Haruku, Pasir Panjang, di Saparua (sebagian besar memeluk agama Kristen).¹⁵

¹⁵ Tim Peneliti Ambon-Maluku, Keberadaan TNI dalam Konflik Antar Etnik di Indonesia (Kasus Ambon – Maluku), Kerjasama OTI/USAID dengan Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) dan Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK), Jakarta, 2000.

Pada awalnya Orang Dagang yang berasal dari etnik Buton mendiami lahan-lahan perkebunan daerah perbukitan di belakang Negeri daerah pesisir. Mereka berjumlah puluhan kepala keluarga, dan hampir seluruhnya datang dan menetap dalam kawasan yang cukup luas di sekitar Negeri Kristen. Kehadirannya dapat diterima oleh Anak Negeri Islam maupun Kristen dan dianggap sebagai kelas rendah sebagai petani penggarap lahan, baik *Tanah Dati* maupun *Tanah Negeri*. Sejak kedatangan etnis ini hingga tahun 1970an, mereka ini membentuk komunal yang terpisah dengan Anak Negeri, dan hidup dengan tradisi maupun agama yang dianutnya, secara bebas.

Dalam perkembangan selanjutnya, proses interaksi dan perkawinan terjadi antara orang-orang Buton dengan muslim setelah lama tinggal dalam beberapa generasi dan telah bisa menyesuaikan dengan adat setempat. Meskipun begitu, orang-orang Buton tersebut tidak ikut andil dan berpengaruh dalam persoalan politik, namun tetap berpengaruh besar dalam sektor ekonomi sebagai petani dilahan-lahan yang kurang subur atau bekerja sebagai buruh kota.

Secara berturut-turut pendatang yang menetap di Maluku – setelah Buton - adalah Bugis, Makassar, Muna, Sumatera, Tator, Cina, dan kemudian Jawa. Etnis Bugis dan Makassar datang ke Ambon sekitar tahun 1960-an dengan tujuan utama berdagang. Sedangkan etnis Jawa pada umumnya datang ke Ambon antara tahun 1960 – 1970-an karena terkait dengan program transmigrasi dari pemerintah, atau juga karena adanya droping pegawai dari pusat.

Seperi telah diutarakan di atas, pola pemukiman penduduk yang sejak awal penjajahan telah dikapling dan diatur berdasarkan agama, dalam perkembangan berikut seiring dengan kedatangan berbagai etnis, maka segregasi tersebut menjadi lebih kompleks karena tidak lagi didasarkan oleh agama *an sich*, namun juga didasarkan pada etnisitas. Pengelompokan etnis pendatang Bugis dan Makassar lebih terpusat dan bermukim di perkotaan, daerah-daerah

transit dan pelabuhan. Begitu juga etnik Buton, Cina, dan umumnya para migran yang bekerja di sektor jasa dan di sektor informal, kebanyakan bermukim di wilayah perkotaan. Sedangkan etnis Jawa mayoritas tinggal di pemukiman-pemukiman transmigrasi, kecuali orang Jawa yang bekerja di pemerintahan, tinggal membaur di perkotaan. Pada awalnya hubungan mereka begitu harmonis, namun ketika isu persinggungan agama dan etnis dihembuskan, maka batas-batas demarkasi pemukiman tampak semakin jelas.

Orang Dagang yang berasal dari keturunan Arab atau Cina, datang dan mendiami sebuah Negeri dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu hanya satu atau beberapa kepala keluarga. Mereka ini, hadir sebagai pedagang yang tidak membentuk komunal yang terpisah dari Anak Negeri, tetapi berbaur dalam komunitas Anak Negeri. Walaupun mereka berbaur dengan Anak Negeri, pada umumnya, tradisi nenek moyang tetap dipertahankan, terutama yang berasal dari keturunan Cina. Demikian juga agama yang dianutnya, terutama keturunan Arab, pada umumnya tetap mempertahankan agamanya, sekalipun mereka mendiami sebuah Negeri yang pemeluk agama Anak Negerinya berbeda. Saat akan melaksanakan ibadah berjamaah misalnya, umumnya mereka melakukan ibadah di Negeri yang sama agamanya, atau ke kota terdekat.

Para transmigran yang khususnya berasal dari Jawa ditempatkan pada Unit Penempatan Transmigrasi di Kecamatan Kairatu (Waimital dan Waihatu). Jumlah mereka mencapai 807 Kepala Keluarga (KK) atau 3.187 Jiwa Di Kecamatan Seram Utara (Kobisonta, Wailoping, Wailete, Waiputih, Samal, Waitonipa, Marasahua, Namto, Aketernate, Tanah Merah, Sari Putih dan Karlutu) jumlah mereka sebanyak 7.409 KK atau 29.198 orang. Mereka yang ditempatkan di Kecamatan Bula (Benggoi, Air Matakabo, dan

Tanjung Silat) berjumlah 2.761 KK atau 10.581 orang. Penempatan para transmigran tersebut sudah dimulai sejak tahun 1954.¹⁶

Kontak sosial antar Anak Negeri dari dua Negeri atau lebih terjadi karena hubungan kekerabatan, yang terakomodasi dalam berbagai wujud, termasuk pela-gandong, atau karena hubungan ekonomi dan hubungan sosial lain, seperti pendidikan anak, atau acara-acara keagamaan maupun hari-hari besar kenegaraan. Sebaliknya, kontak sosial antara Anak Negeri dengan Orang Dagang, terutama yang berasal dari luar Maluku, terjadi karena kegiatan ekonomi, sehingga pola hubungan kedua kelompok masyarakat ini, lebih dimotivasi oleh kepentingan ekonomi semata.

Sebab itu, pandangan Anak Negeri terhadap Orang Dagang yang berasal dari Negeri lain, berbeda dengan pandangan terhadap yang berasal dari luar Maluku Tengah. Orang Dagang dari Negeri lain, masih dilihat sebagai suatu kesatuan budaya, sedangkan terhadap Orang Dagang dari luar Maluku Tengah, dilihat sebagai pendatang dan orang diluar kesatuan budaya. Karena itu, ada perlakuan yang berbeda dari Anak Negeri terhadap Orang Dagang yang berasal dari Negeri lain dengan yang berasal dari luar Maluku Tengah. Namun ada perlakuan yang sama kepada kedua subkelompok Orang Dagang ini, ialah bahwa kedua-duanya tidak diberikan hak dalam penguasaan *Tanah Dati* atau *Tanah Negeri*.

II.4. Tradisi Kekerabatan dan Gotong-royong

Masyarakat Maluku Tengah memiliki keyakinan tentang adanya dualisme kosmologi yang harus dijaga eksistensi dan keseimbangannya. Dualisme itulah yang banyak disebut masyarakat sebagai budaya *siwalima*. Pembagian atas langit dan tanah atau gunung (mewakili dunia atas) dan pantai (mewakili dunia bawah)

¹⁶ Maluku Tengah dalam Angka 2001.

misalnya digolongkan juga ke dalam pembagian atas dasar jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Bagian yang berkaitan dengan tanah, darat, dan pantai, digolongkan dalam jenis kelamin perempuan, sebaliknya, laut, gunung dan langit digolongkan ke dalam jenis kelamin laki-laki.

Dualisme itulah yang juga mempengaruhi mereka dalam pembentukan kelompok, organisasi dan hubungan antarkelompok. Hal ini dapat dilihat pada:

1. Pengelompokan berdasarkan kekuasaan, *Patasiwa* (laki-laki) dan *Patalima* (perempuan).
2. Pengelompokan penduduk berdasarkan teritorial, *Aman* (aman = ayah) dan *Hena* (ina = ibu).
3. Pembagian teritorial negeri (desa), *lau* (laki-laki) dan *dara* (perempuan).
4. Pembagian rumah adat (*baileu*) atas bagian perempuan dan laki-laki.
5. Penggolongan jabatan-jabatan adat: *Kapitan* (laki-laki), *Maweng/pendeta adat* (perempuan), *Tuan tanah* (perempuan), *Raja* (laki-laki).
6. Pengelompokan *Mata ruma* (marga) ke dalam kelompok laki-laki dan perempuan pada upacara adat komunal.

Dalam pandangan kebudayaan lokal Maluku Tengah, laki-laki membawakan atau mewakili karakter kejantanan, kekerasan, peperangan, dan keributan, sedangkan perempuan membawakan atau mewakili karakter kesuburan, kelembutan, kedamaian, dan kesejukan. Dualisme karakter tersebut bukan mengandung arti sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi justru melalui dualisme tersebut dapat ditemukan satu kesempurnaan totalitas yang memunculkan interdependensi. Kesempurnaan hanya didapat melalui kerjasama dengan teratur dan baik antar keduanya (laki-laki dan

perempuan). Itu berarti secara hereditas orang Maluku diajarkan oleh kebudayaannya untuk saling menerima dan memberi dalam konteks bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu ada saling ketergantungan satu bagian dengan bagian yang lain.¹⁷

Untuk membuat keseimbangan dan mengatasi terjadinya disfungsi sosial maka muncullah beberapa tradisi penting yang telah lama disepakati dan diyakini memiliki sifat sakral. Beberapa tradisi yang dipakai sebagai manajemen sosial untuk mempertahankan solidaritas sosial yang penting diantaranya adalah tradisi sasi, masohi dan pela gandong. Sasi merupakan suatu tradisi dalam mengatur sumberdaya alam yang dimiliki suatu komunitas. Tradisi ini boleh dibilang paling tua diantara masohi dan pela gandong. Menurut hikayat di Haruku, tradisi sasi dimulai sejak abad 14. Sasi bisa diartikan sebagai larangan untuk tidak memasuki suatu kawasan tertentu demi kepentingan bersama. Kawasan yang dimaksud bisa berupa tempat hasil panen, bisa juga hutan, mangrove, terumbu karang, kawasan penangkapan ikan, maupun kawasan lain yang sangat bermanfaat bagi kemaslahatan bersama. Sasi ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Adat. Biasanya sasi akan diumumkan di masjid bagi komunitas Islam, dan di gereja bagi komunitas Kristen. Kemudian pengawasan implementasinya diserahkan kepada Lembaga Kewang. Lembaga ini disebut juga dengan “Korps Kewang” yang berfungsi sebagai polisi adat dan memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan sasi. Sanksi atas pelanggaran sasi ini juga diputuskan oleh dewan adat. Hukuman yang biasanya diterapkan adalah dicambuk. Tradisi sasi ini masih dapat ditemukan di Pulau Ambon, Pulau Haruku, Pulau Nusa Laut, Pulau Saparua, Pulau Seram, Pulau Buru, Pulau Watubela, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan Halmahera.

Selain sasi, tradisi yang dipakai masyarakat Maluku untuk mempererat solidaritas adalah *masohi*. *Masohi* merupakan tradisi

¹⁷ Dalam Mus Huliselan, *Ibid*.

gotong-royong, saling membantu dalam mengerjakan ataupun membangun sesuatu. Misalnya saja saling membantu dalam membangun tempat-tempat sosial – termasuk tempat ibadah – dan lainnya.

Tradisi yang dianggap paling penting dalam menjaga kohesi sosial masyarakat Maluku adalah *Pela*. *Pela* merupakan fakta suci dalam mengangkat saudara antara suatu komunal dengan komunal lainnya yang kekerabatannya sangat khas. Perjanjian atau pengangkatan tersebut dilakukan antara beberapa warga petuanan atau marga yang berbeda – akibat adanya pertalian darah karena perkawinan, maupun untuk perdamaian setelah perang ataupun karena alasan lain. *Pela* dianggap begitu penting karena keberadaannya tidak hanya mengikat persaudaraan didalam suatu negeri yang memiliki kesamaan karakteristik etnis atau agama. Lebih dari itu, lingkup ikatan tersebut mencakup perbedaan agama, lintas negeri dan bahkan antar pulau. Dari sisi semantik, *Pela* berasal dari kosa kata dialek asli atau “bahasa tanah” Uli Hatuhaha, di belahan utara Pulau Haruku, Maluku Tengah. Artinya, *melindungi, mengawasi, mengamankan, dan menjaga*. Dalam percakapan sehari-hari kata ini kadang dibubuhi dengan vokal *au*, menjadi *Pelau*. *Au* artinya saya. Jadi, *Pelau* artinya melindungi saya, mengawasi saya, mengamankan saya, dan menjaga saya.¹⁸ Jadi ketika masa pendudukan Portugis dan

¹⁸ Dari akar sejarahnya, kata *Pelau* ini pernah menjadi nama ibukota kerajaan Islam Hatuhaha sejak abad ke 15, yang sekarang menjadi nama ibukota Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Kota *Pelau* sendiri punya arti sebagai tempat yang aman, damai, dan sejahtera Tuhan. Hal itu bermula dari peristiwa seperti diceritakan dalam *Lani* (nyanyian leluhur) berasal dari abad 15. Diceritakan, waktu itu Belanda mengadakan sidang dengan para Latupati di Amarina. Salah satu agendanya adalah membunuh Raja *Pelau* (Islam) bernama *Ronesina*. Beruntunglah, raja *Titawey* (*Kristen*) menyadari bahaya politik pecah belah ini, dan menyelamatkan raja *Pelau* dengan membocorkan rahasia busuk itu. Dari sinilah lahir persekutuan yang dikenal sebagai *Pela*, yang berarti hidup damai saling melindungi, mengawasi, mengamankan, dan saling menjaga antara kelompok agama yang berbeda.

Belanda, tradisi pela ini digunakan untuk saling membantu dan memperkuat pertahanan dan keutuhan etnis dari serangan pihak asing, maupun pada saat krisis.

Pela merupakan ikatan perjanjian atau fakta persaudaraan dan suatu semboyan bersama yang memiliki kekuatan pengikat dalam membentuk persatuan dan kesatuan di antara mereka yang ber-Pela. Dalam pelaksanaan tradisi pela ini, ada beberapa hal yang harus dipatuhi bersama yaitu antara lain :

1. Antara sesama Negeri yang ber-Pela diwajibkan untuk saling membantu jika ada yang terancam atau mengalami bencana (perang, bencana alam, dsb) baik diminta maupun tidak.
2. Saling membantu dalam hal pembangunan untuk kemaslahatan bersama, baik itu pembangunan gereja, masjid, dan fasilitas umum lainnya.
3. Jika ada seseorang berkunjung ke suatu negeri yang memiliki hubungan pela, maka negeri yang didatangi tersebut wajib menjamu dengan baik dan membiarkan pengunjung (saudara se-pela) tadi membawa pulang hasil tanah atau buah-buahan apapun yang dia suka meskipun tanpa ijin.
4. Antara pihak yang ber-pela sudah saling menganggap sebagai saudara sedarah. Maka dari itu, saudara se-pela dilarang keras untuk saling menikah.

Sanksi yang akan terjadi apabila larangan-larangan (yang ditabukan) dilanggar, maka akan berakibat fatal bagi yang bersangkutan. Konon yang melanggar peraturan akan terkena sakit, bahkan mati, ataupun kesusahan lain yang datangnya dianggap merupakan kutukan nenek moyang. Untuk pelanggaran larangan kawin sesama saudara se-pela, maka sanksi yang akan diberikan berupa diarak berjalan mengelilingi negeri-negeri yang bersangkutan

sambil dicaci maki oleh masyarakat setempat. Sanksi ini akan terasa berat lagi karena kesalahan yang dilakukan tidak bisa dilupakan oleh kedua masyarakat yang terikat pela, dan konsekuensinya adalah dikucilkan dari komunitas.

Tradisi pela sebenarnya digolongkan menjadi tiga macam, yaitu pela keras, pela gandong atau bungso, dan pela tempat sirih.¹⁹ Pela keras diartikan sebagai suatu ikatan persaudaraan akibat adanya peristiwa yang sangat penting. Peristiwa itu bisa berupa peperangan yang dahsyat dan berlarut-larut, di mana suatu negeri memberikan bantuan kepada negeri yang lain. Pela gandong atau bungso merupakan ikatan perjanjian antara satu negeri dengan negeri lainnya karena masing-masing menganggap masih merupakan keturunan yang sama, dan bahwa sebaiknya persaudaraan mereka dipererat. Sedangkan pela tempat sirih terjadi karena suatu peristiwa yang tidak begitu penting. Misalnya saja perdamaian yang dilakukan setelah adanya insiden kecil antar kedua negeri, atau karena suatu negeri telah berjasa kepada negeri yang lain dalam hal kecil. Pela tempat sirih biasanya digunakan untuk memperlancar hubungan perdagangan.

Berbeda dengan kedua macam budaya pela di atas, maka budaya pela tempat sirih memiliki ikatan yang tidak kuat. Pela tempat sirih bisa dikatakan bukan merupakan fakta persaudaraan namun lebih kepada jalinan keakraban pertemanan. Pela tempat sirih tidak menggunakan sumpah/janji, upacara simbolisnya hanya saling menukar dan mengunyah sirih untuk mempererat persahabatan antara kedua belah pihak. Dengan begitu hubungan kawin diantara keduanya diperbolehkan, dan juga tradisi tolong-menolong tidak diwajibkan atau hanya bersifat sukarela. Jadi tidak ada ketakutan hukuman yang berhubungan dengan kutukan nenek moyang.

¹⁹ Bartels, Dieter, "Hubungan 'Pela' Di Maluku-Tengah dan di Netherland", Yavapai College, Arizona, 2001.

Sangat jelas bahwa ketiga pela tersebut di atas merupakan sistem yang tidak mendiskriminasikan agama maupun suku tertentu. Sistem ini akan mengikat kedua belah pihak untuk saling setia, membantu, dan membela dalam suka maupun duka, seperti layaknya saudara sekandung. Oleh sebab itu, segregasi komunal berbasis agama yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan konflik manifest, bisa diredam dengan tradisi pela sebagai alat proteksinya.

Kemudian tradisi apa yang dipakai untuk bisa mempertahankan pela antar dua komunitas atau lebih tersebut? Penduduk Maluku Tengah biasa menggunakan “Panas Pela” sebagai media rekonsiliasi antar warga yang se-pela. Panas pela merupakan suatu upacara yang digunakan untuk mempererat atau mengingatkan kembali tentang hubungan mereka yang telah diikat dengan sumpah, dan juga ditujukan untuk menyadarkan para pemuda tentang hubungan kekerabatannya. Panas pela biasa dilakukan antar warga yang se-pela selama satu minggu di dalam suatu negeri, dan dirayakan dengan penuh suka cita serta biasanya dengan memperbaharui sumpah mereka.

Pada prinsipnya sasi, masohi, dan pela gandong merupakan tradisi Maluku yang dipakai sebagai proteksi konflik. Sistem sosial ini melahirkan loyalitas dan afiliasi titik temu antara pihak-pihak yang berbeda latar belakang, termasuk juga dengan para pendatang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka jelas bahwa secara sosiologis dan antropologis, pola hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Maluku Tengah, sebagaimana masyarakat dimanapun di dunia ini sebenarnya tidak bisa terlepas dari potensi konflik. Potensi tersebut bisa muncul kapan dan di mana saja karena alasan apapun, terlebih apabila kekuatan sentimen kelompok (primordial) terpolarisasi dengan jelas baik sebagaimana yang terjadi di Maluku (khususnya) dalam konteks hubungan Salam-Serani, Anak Negeri-Orang Dagang, maupun antara kesatuan-kesatuan budaya yang berbeda. Namun demikian, sentimen kelompok ini bisa

tereliminasi oleh kearifan budaya lokal, maupun kepentingan ekonomi yang substitusional dalam batasan kewajaran, sehingga konflik sosial sebelumnya tidak terbuka (manifest). Dengan kata lain, potensi tersebut dapat diredam dan mengendap pada bagian terdalam struktur kepribadian masyarakat, karena institusi sosial budaya lokal masih berfungsi dengan baik sebagai katup pengaman yang mampu meminimalkan eksplosif sosial yang bernuansa primordial.

Adanya gesekan kepentingan yang mengarah kepada konflik horisontal sebenarnya telah dimulai dengan munculnya perselisihan antara pendatang dan etnis lokal Islam dengan etnis lokal Kristen. Permasalahan yang sering muncul adalah mengenai kepemilikan tanah, dan juga karena munculnya kesadaran etnis lokal, dalam hal dominasi pendatang di bidang ekonomi dan birokrasi pemerintahan.

Benih-benih konflik atas dasar kepemilikan tanah lebih disebabkan karena penduduk pendatang (generasi baru pendatang Buton) sering mempermasalahkan lahan yang telah ditanami oleh pendahulu mereka. Padahal berdasarkan peraturan yang sebelumnya telah disepakati bersama, status kepemilikan tanah masih dikuasai oleh etnis pribumi. Akibat pemaksaan penguasaan tanah oleh pendatang tersebut, maka kemudian muncul reaksi dari orang lokal (Kristen) untuk melakukan pengusiran sebelum para pendatang berhasil menguasai tanah mereka.

Selain itu keterdesakan etnis lokal (Kristen) dalam jabatan birokrasi bisa juga diperkirakan menjadi pemicu munculnya konflik horisontal. Hal tersebut diawali dengan bangkitnya etnis pendatang (Buton) dan etnis lokal Islam untuk mendapatkan tingkat pendidikan yang selama masa kolonial tidak bisa didapatkan karena adanya sistem diskriminasi agama yang diterapkan pemerintah kolonial. Akibat dari keberhasilan mereka dalam menikmati pendidikan pada level yang paling tinggi pada masa Orde Baru, maka lambat laun mereka pun mampu menduduki jabatan-jabatan strategis di birokrasi –

yang pada masa kolonial cenderung didominasi oleh orang-orang Kristen, sehingga banyak pihak berpendapat bahwa etnis lokal Kristen pasti merasa tersingkir. Memang sudah sejak kira-kira tahun 80-an, orang-orang Kristen tidak lagi memonopoli pekerjaan di instansi pemerintahan karena sudah tersaingi oleh para pendatang dan penduduk lokal Islam.

Pergeseran dominasi jabatan dalam birokrasi tersebut terutama terjadi di tingkat propinsi (dahulu Tk. 1). Di mana dominasi Islam ditandai dengan naiknya Akib Latukonsina sebagai Gubernur Maluku yang kemudian diikuti pula dengan penggantinya Saleh Latukonsina. Dengan duduknya orang Islam dalam posisi strategis tersebut menimbulkan implikasi berupa diangkatnya orang-orang Islam (pendatang maupun pribumi) untuk duduk dalam posisi strategis pula. Meskipun sebenarnya orang-orang Kristen telah menuntut untuk tetap diikutkan dalam jabatan strategis, namun tetap saja diposisikan oleh pejabat Islam dalam formasi yang kurang substantif – seperti misalnya jabatan wakil gubernur. Sedangkan posisi yang berkaitan langsung dengan penentuan kebijakan seperti misalnya Sekretaris Wilayah Daerah maupun Kakanwil, tetap saja diduduki oleh etnis lokal Islam dan pendatang (terutama Buton). Formasi elit Islam tersebut semakin kuat ketika pemerintah pusat melakukan *dropping* pejabat. Hal semacam inilah yang kemudian menimbulkan rasa iri di kalangan etnis lokal Kristen.

Ketidakpuasan terhadap dominasi oleh penduduk lokal Islam dan pendatang tersebut mendorong etnis lokal Kristen melakukan aksi terbuka untuk menuntut ketidakadilan. Aksi tersebut biasanya terkemas dalam bentuk demonstrasi ketika ada pelantikan pejabat lokal maupun *dropping* dari Pusat. Penolakan etnis lokal Kristen terhadap etnis Buton, misalnya terjadi ketika Zua Fasihu (orang Buton yang Islam) dilantik menjadi Kakanwil Depdikbud Maluku. Meski ada keinginan masyarakat Buton untuk melakukan reaksi (balasan) atas

protes dari orang-orang Kristen, namun hal itu masih bisa diredam sehingga tidak menimbulkan aksi saling membalas.

Hal serupa juga terjadi dalam tingkat pemerintahan yang lebih bawah. Misalnya saja yang terjadi di Ambon, perdebatan yang sering mengemuka dalam hal formasi birokrasi tetap saja mempermasalahkan kepentingan kelompok agama dan etnis yang bermain disana. Semenjak itulah konflik antara etnik lokal Kristen dengan etnik pendatang Buton (Islam) kian terasa.

Kedatangan orang-orang Bugis dan Makassar pada tahun 1960-an bagi orang-orang pribumi tidaklah seperti pendatang dari Buton. Orang-orang Bugis dan Makassar yang datang karena keinginan melakukan perdagangan, tidak bisa lepas dari karakter dasarnya. Mereka merupakan orang-orang yang ulet dalam memanfaatkan sektor informal yang ada. Sehingga dengan perlahan namun pasti, mereka mampu mendominasi sektor usaha informal dan mulai berkeinginan untuk menetap dengan jalan membeli tanah atau lahan yang dimiliki oleh penduduk lokal. Kawasan yang dahulunya begitu segregatif dengan pemisahan berdasarkan agama dan etnis, kemudian menjadi agak plural dengan kehadiran para pendatang tersebut.

Meskipun demikian, ternyata kehadiran orang-orang Bugis dan Makassar tersebut membuat penduduk lokal menjadi gusar. Pasalnya orang Makassar dan Bugis lebih merusak tatanan adat dan kebiasaan penduduk asli dibandingkan jika berbaur dengan orang-orang Buton. Para pendatang dari Bugis dan Makassar lebih berorientasi pada uang daripada memperhatikan hubungan kemanusiaan dalam lingkungan bisnis, kekeluargaan maupun sosial kemasyarakatan. Apalagi Orang Bugis dan Makassar memiliki sifat dendam yang merupakan bagian dari kebudayaan mereka.²⁰ Berbeda

²⁰ Budaya dendam tersebut disebut juga dengan *siri*. *Siri* diartikan sebagai suatu budaya malu yang biasanya merupakan ekses dari pelanggaran atas hak-hak

dengan orang Buton yang masih memperhatikan hubungan kemanusiaan yang saling membantu dengan penduduk lokal.

Dominasi orang-orang Bugis dan Makassar dalam sektor ekonomi dilakukan seiring dengan perlakuan diskriminasi terhadap penduduk lokal (Kristen). Meskipun menurut kelompok Bugis dalam melakukan hubungan tersebut sudah dilakukan dengan adil, namun bagi penduduk lokal, perlakuan tersebut tidak bisa diterima. Sebagai contoh, jika orang Kristen mendapat kredit mobil dari PT. Bosowa Motor (milik orang Bugis yang Islam), kemudian tidak bisa dilunasi kreditnya, maka mobil langsung ditarik lalu diberikan kepada orang Bugis atau Makassar. Begitu juga misalnya petugas kepolisian yang berasal dari Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugasnya, cenderung memihak kepada orang-orang se-etnis, termasuk misalnya dalam menyelesaikan administrasi mobil, urusan perpajakan dan lain sebagainya.

Ketidak puasan terhadap perlakuan para pendatang tersebut menyebabkan orang-orang Kristen termasuk dari kalangan pejabat melakukan intimidasi kepada orang-orang pendatang dari Bugis dan Makassar. Kondisi yang memanas ini ternyata meluap pada saat kerusuhan pertama di Ambon tanggal 19 Januari 1999, di mana pada saat itu terjadi pengusiran yang disertai dengan pembantaian terhadap orang-orang Buton, Bugis, dan Makassar di seluruh Ambon.

pribadinya yang dilakukan oleh orang lain. Seperti misalnya terjadi saudara yang kawin lari (melanggar adat), saudara dibunuh atau dianiaya, dimaki dengan bahasa kasar atau dipermalukan oleh orang lain. Balasan dari pelanggaran itu adalah nyawa bagi orang yang bersalah (bersangkutan). Tetapi *siri* dilakukan dalam batas-batas pelanggaran atas hak-hak saudara dekat. Jika hanya famili jauh atau satu suku yang dilanggar haknya, maka hanya akan sebatas mendendam. Dikutip dari Tim Peneliti Ambon-Maluku, Op.Cit.

II.5. Peta Kekuatan Politik Masyarakat

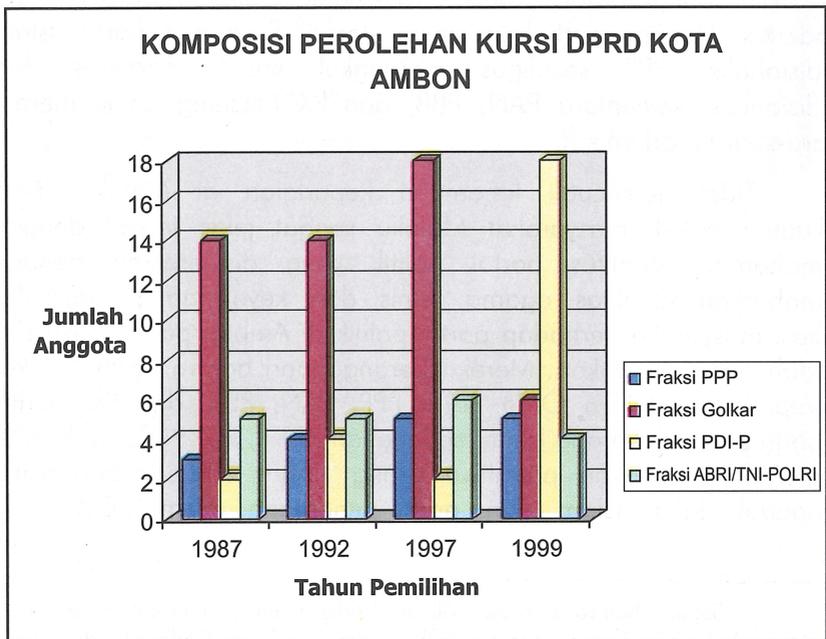
Kehidupan perpolitikan Indonesia setidaknya sampai dengan pemilu 1999 masih bisa dikatakan bernuansa primordial. Apalagi partai-partai yang ada pada saat itu muncul dengan mengatasnamakan pelbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Kebangkitan partai-partai besar dengan strategi menarik sektor-sektor populis di daerah tampaknya sinergis dengan keinginan masyarakat untuk lebih mudah mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka. Menariknya, setting sistem kepartaian di Indonesia tampaknya juga terdiktomi menjadi kelompok partai-partai Islam dan partai-partai Kristen. Semua partai besar pemenang pemilu, meskipun samar-samar tetap masih bersifat primordial. PDI-P mewakili abangan dan pemilih non-Islam, Golkar mewakili Islam modernis, khususnya di luar Jawa, dan PKB adalah partai Islam tradisional. PPP sekaligus merangkul kaum modernis dan tradisional, sementara PAN, PBB, dan PK bersaing untuk meraih suara-suara modernis.²¹

Tidak terkecuali fenomena kepartaian di Maluku. Peta kekuatan politik masyarakat Maluku sangat jelas terkait dengan pemahaman identitas partai politik yang disinergikan dengan pemahaman identitas agama, etnis dan keyakinan primordialis. Afiliasi masyarakat terhadap partai politik di Ambon pada khususnya mudah untuk dipetakan. Mereka beranggapan bahwa Partai Golkar merupakan partainya Orde Baru. PPP, PAN, PBB, dan PK identik dengan partainya orang Islam, sedangkan PDI-P, PDKB, Partai Krisna, dan PKP merupakan partainya orang Kristen. Bagi orang-orang penduduk lokal Islam dan para pendatang Islam BBM akan

²¹ Seperti halnya analisis William Liddle tentang primordialisme sistem kepartaian Indonesia yang sebenarnya diilhami dari penemuan Clifford Gertz di Jawa tentang aliran santri, priyayi, dan abangan yang kemudian berafiliasi dengan partai politik. Dikutip dari R. William Liddle, "Pemilihan Presiden dan Primordialisme", <http://www.tempointeraktif.com/harian/kolom/25082000-1.html>

cenderung memilih partai yang bernuansa Islam dan Golkar. Karena bagaimanapun juga Golkar pada saat itu dipersonifikasikan dengan Habibie yang merupakan representasi dari BBM. Sementara untuk kelompok Kristen baik yang pendatang maupun lokal - mayoritas lebih berafiliasi dengan PDI-P. Kenyataan ini juga ditunjukkan oleh banyaknya anggota DPRD dari kalangan Pendeta.

Kemudian, dari hasil Pemilu 1999 - yang menggambarkan konfigurasi keanggotaan DPRD Kota Ambon - diperoleh jumlah anggota dewan sebanyak 35 orang, dengan urutan sebagai berikut : fraksi PDI-P 19 orang (54,29 %), fraksi PP dan Golkar masing-masing 6 orang (17,14 %) dan fraksi TNI/Polri 4 orang (11,43 %).



Jika primordialisme dijadikan sebagai basis pembenaran perubahan perolehan suara, maka sangat menarik jika dibuat beberapa catatan analisis dari perbandingan perolehan suara hasil pemilu 1999 dengan pemilu sebelumnya (era Orde Baru), dan juga dengan komposisi jumlah penduduk Kota Ambon berdasarkan agama. Hasil pemilihan Umum Orde Baru memang selalu menunjukkan kemenangan mutlak atas Golongan Karya. Namun perlu dilihat bahwa perolehan hasil suara kedua partai lainnya (PDI dan PPP) pada saat itu hampir selalu PPP yang lebih unggul. Beberapa hal yang bisa digarisbawahi dari hasil perbandingan tersebut adalah :

1. Ini membuktikan bahwa birokrasi Kota Ambon, setidaknya saat Orde Baru memang didominasi oleh orang-orang Kristen. Perlu diingat bahwa birokrasi pada saat Orde Baru identik dengan Golkar, sedangkan jika dilihat dari komposisi pemeluk agama di Kota Ambon, terbanyak diduduki orang Kristen.
2. Kemenangan besar PDI-P – yang konon sebagai representasi orang-orang Kristen – dalam pemilu 1999 adalah masuk akal karena suara masyarakat muslim terbagi antara Golkar dan PPP.

Jika dilihat dari perbandingan perolehan suara yang sangat mencolok tersebut, logis juga jika kemudian muncul isu kemungkinan keterkaitan kemenangan PDI-P (Kristen) dengan upaya pengusiran etnis BBM pada awal tahun 1999. Dengan banyaknya etnis BBM atau warga Islam yang eksodus keluar Ambon, maka peluang pemberian suara kepada Partai-partai Islam maupun Golkar bisa diminimalisir. Sehingga kemenangan dominan ada pada PDI-P. Pengusiran terhadap penduduk pendatang ini juga dianalisis oleh banyak pihak sebagai langkah mendudukkan orang-orang Kristen untuk mendominasi kursi badan legislatif daerah dan akan lebih strategis dalam mempengaruhi kebijakan publik.

II.6. Pemetaan Korban dan Kerusakan

Lamanya kerusakan yang terjadi di Maluku telah mengakibatkan banyak kerugian materi yaitu berupa hancurnya harta benda masyarakat, dan terlebih lagi tidak berfungsinya infrastruktur pemerintahan maupun pelayanan publik. Data dari Kompas misalnya, menyebutkan bahwa Selama kerusakan di Maluku, tercatat paling tidak 29.414 unit rumah penduduk, 251 unit rumah ibadah, 129 unit sarana pendidikan, 13 unit sarana kesehatan, 106 unit sarana perkantoran, dan 636 unit pertokoan, kios, dan pasar yang hancur, terbakar, dan dijarah.²²

Banyak pihak yang masih memperdebatkan tentang jumlah korban jiwa akibat kerusakan yang terjadi di Maluku pada umumnya atau di Ambon pada khususnya.²³ Dari pelbagai data yang ada dapat diambil rata-rata jumlah korban kerusakan di Maluku kurang lebih antara 4.000 – 8.000 jiwa – dari mulai Januari 1999 sampai dengan 2002. Diperkirakan 40 persennya merupakan korban yang ada di Maluku Tengah. Ketidak pastian tersebut diakibatkan karena banyak korban jiwa yang meninggal bersama tenggelamnya kapal mereka di laut, korban hangus terbakar, maupun korban tak dikenal lainnya yang langsung dikubur secara massal.

Konflik bernuansa SARA tersebut juga menyebabkan paling tidak sekitar 860.000 jiwa mengungsi, 280.000 tinggal di tempat-tempat penampungan di Maluku bagian selatan, dan sekitar 78.000 di Maluku Utara.²⁴ Di Ambon sendiri dari data lima tahun terakhir,

²² "Maluku Pascakonflik, Layak Memperoleh Bonus Khusus", *Harian Kompas*, 5 September 2003.

²³ Khusus mengenai jumlah korban jiwa terdapat perbedaan yang sangat besar antara jumlah versi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disampaikan Kepala Polri ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, 3 Juni 2002 dengan laporan dari beberapa LSM. Laporan Kepala Polri ini menyebutkan "hanya" 1.797 jiwa melayang sepanjang tiga tahun konflik kekerasan di wilayah itu. Lihat di lampiran.

²⁴ Dari sumber resmi didapatkan bahwa jumlah pengungsi di seluruh Propinsi Maluku sejak Januari 1999 – Juni 2000 (sebelum pemberlakuan Darurat

jumlah pengungsi akibat bencana alam terus mengalami peningkatan. Dari data yang ada tahun 2001 saja tercatat 71.735, jika dibandingkan dengan tahun 1997/1998 yang masih berjumlah 28 orang. Sedangkan total jumlah pengungsi korban kerusakan data tahun 2001/2002 berjumlah 170.590 jiwa dengan kecenderungan jumlah pengungsi terbesar dari Kecamatan Sirimau.²⁵

Eksodus penduduk yang terjadi sangat tidak menentu dalam arti banyak pengungsi yang keluar dari Ambon dan banyak juga yang masuk ke Ambon. Tetapi yang jelas pergerakan pengungsi ini cenderung memusat pada komunitas masing-masing agama, khususnya bagi para pengungsi yang mencari tempat pemukiman di Pulau Maluku saja. Sedangkan etnis pendatang banyak yang mengungsi keluar Maluku. Pengungsi yang merupakan etnis pendatang Bugis dan Makassar umumnya kembali ke daerah asalnya, yaitu Sulawesi Tenggara dan Selatan. Sedangkan pengungsi Kristen banyak yang menuju Sulawesi Utara (sebanyak 16.293 jiwa). Hanya ada dua tempat pengungsian yang menampung campuran penduduk (Islam-Kristen) adalah Markas Angkatan Laut Halong dan Rindam (Pusat Pendidikan Militer) Suli.

Sipil) adalah 104.186 jiwa. Setelah pemberlakuan Darurat Sipil (1 Juli 2000), terjadi penambahan pengungsi sebesar 110.926 jiwa, sehingga total pengungsi adalah 215.061 jiwa. Kemudian sejak bulan September - Oktober 2000, terdapat penambahan sebanyak 10.000 pengungsi baru lagi, setelah terjadi penyerangan ke Desa Suli, Hative Besar, Iha, Pia, dan Sirisori-Amalatu. Data diambil dari URL : http://www.geocities.com/chosye/Themes/Prahara_Maluku_1.htm

²⁵ Laporan Walikota Ambon Chris Tanasale (20/02/01) kepada Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah menyebutkan bahwa jumlah pengungsi di Ambon saat itu 131.879 jiwa, tersebar di 112 lokasi penampungan. Barak yang dibangun hanya mampu menampung 1.092 KK, sedangkan yang belum tertampung sekitar 25.284 KK. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Ambon dibutuhkan dana sekitar Rp. 311.153 milyar. Ibid.



Masjid yang rusak akibat konflik



Gereja yang rusak akibat konflik

Ketika Laskar Jihad mulai melakukan aksi terhadap perkampungan Kristen di Ambon, maka jumlah pengungsi menjadi bertambah dengan lokasi tujuan yang lebih bervariasi. Gelombang baru pengungsi mulai berangkat ke Papua sekitar 18.000 sampai 30.000 jiwa, dan sekitar 4.000 lainnya ke Nusa Tenggara Timur dan Bali. Negeri Belanda juga menjadi tempat pengungsian dari 500 – 600 pengungsi Maluku yang berangkat kesana dengan menggunakan visa turis. Bahkan ada sekeluarga yang mengungsi ke Australia dengan menggunakan motor ikan, yang sekarang tinggal di Kota Adelaide.

Berikut adalah sebagian data persebaran pengungsi di Maluku

No	Tahun	Daerah Asal	Lokasi Pengungsian	Jumlah
1	1999-2003	Waiheru, Maluku Tengah	Lantamal Halong Ambon	6,180
2	1999-2003	Waii	Rima Raya Passo	1.800 KK
3		Maluku Utara (Oba, Jailolo, Morotai, Tobole, Bacan dan Ternate)	Manado, Sulawesi Utara	66.266 jiwa
4		Iha, Saparua	Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, P. Ambon	114 KK
5		Desa Hatiwe Kecil, Latta, Poka-Rumah Tiga, Tihu, Tantai, Lateri dan Batu Merah, serta dari Pulau Buru dan Seram (Maluku Tengah).	Lantamal Halong Ambon	1.680 jiwa
6		Tobelo	Kabupaten Biak Numfor, Papua	ribuan KK
7		Karang Panjang, Kecamatan Sirimau (Kodya Ambon)	Belakang Soya	Ratusan jiwa
8		Desa Poka, Kecamatan Baguala (kodya Ambon),	Desa Passo	
9		Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Masohi dan Wahai Kabupaten Maluku Tengah, bahkan Pulau Bacan, Propinsi Maluku Utara.	Sorong	3.491 jiwa

10		Timor Timur, Ambon, dan Poso	Sulawesi Selatan (Kota Makassar, Kabupaten Pangkep, Parepare, Sidrap, Bone, dan Gowa)	9,063
11		Aceh, Ambon, dan Sampit	Desa Tambak Padi I, Aluh-Aluh, Banjar, Kalimantan Selatan	55 KK
12	2002	Tobelo, Maluku Utara	Jawa Timur	318

Data diambil dari pelbagai sumber (*Republika, Media Indonesia, Kompas, Liputan 6, Maluku Media Center*)

Persoalan pengungsi memang memberikan dampak lanjutan yang cukup serius bagi kondisi sosial pasca konflik. Dampak lanjutan yang terjadi adalah bukan hanya menimbulkan konflik kepentingan yang bersifat horizontal, melainkan juga konflik vertikal akibat pola kebijakan yang tidak populis maupun akibat pemanfaatan kondisi oleh pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan materi. Persoalan-persoalan yang dimaksud misalnya adalah :

1. Munculnya konflik (horizontal) baru antara pengungsi dengan penduduk mukim (setempat). Meskipun daerah tujuan pengungsi memiliki karakter ideologis yang sama dengan para pengungsi, namun tetap ada perasaan tidak nyaman karena peningkatan populasi setempat. Terlebih lagi kondisi pasca konflik yang bercirikan pertumbuhan negatif di segala sektor, mau tidak mau penduduk setempat harus berbagi bahan kebutuhan hidup dengan para pengungsi. Kondisi pasca konflik yang sangat minim dengan bahan kebutuhan sehari-hari, baik itu berupa bahan makanan, kesehatan dan lain-lain, harus "diperebutkan" dengan para pengungsi. Secara otomatis bisa dikatakan bahwa minimal penduduk mukim pada akhirnya akan memiliki standar hidup yang sama dengan para pengungsi.
2. Terhambatnya perkembangan pendidikan anak-anak. Kondisi kekacauan sosial memaksa anak-anak untuk ikut

terlibat dalam aktifitas pemenuhan ekonomi dasar bagi keberlangsungan hidup mereka dan keluarga. Banyak anak-anak yang berprofesi sebagai pengemis, ikut menjadi buruh pelabuhan, dan sektor lainnya yang sebenarnya bukanlah lahan pekerjaan yang pantas bagi mereka. Selain itu memang banyak fasilitas sekolah yang hancur akibat kerusuhan. Ditambah lagi dengan banyaknya guru yang enggan mengajar karena faktor keselamatan jiwa. Para guru ini banyak juga yang ikut mengungsi ke luar Maluku.

3. Konflik vertikal yang terjadi bisa disebabkan karena kenakalan pengungsi maupun implementasi kebijakan dari pemerintah yang terkadang distortif. Distorsi yang paling sering dirasakan oleh para pengungsi menyangkut masalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Banyaknya kebocoran, atau tidak konsistennya bantuan menimbulkan protes yang terkadang diiringi bentrokan dengan aparat. Di samping itu, meskipun karena ketakutan-ketakutan akibat trauma kerusuhan memang wajar apabila kemudian pengungsi tidak bersedia kembali ke daerah asalnya, namun jika alasan ketakutan itu kemudian dijadikan alasan pembenar untuk tetap tinggal karena secara empiris daerah pengungsian lebih strategis dibanding daerah asal, maka jelas akan menimbulkan permasalahan sosial baru. Di Ambon bahkan jumlah pengungsi telah melebihi penduduk aslinya. Pada tahun 2002, angka kemiskinan Maluku mencapai 715.700 orang yang berarti jumlahnya lebih dari 50 persen total penduduknya. Pengangguran terbuka mencapai 34.739 orang, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tercatat

10.911 orang.²⁶ Oleh sebab itu pemerintah memutuskan untuk melakukan kebijakan relokasi.²⁷ Akan tetapi permasalahan pengungsi di Maluku, dan di Ambon khususnya, telah begitu kompleks hingga mengalami kendala relokasi. Permasalahan relokasi ini terhambat bukan saja karena persoalan psikologis masyarakat pengungsi, namun juga karena banyak dari pemukiman yang telah hancur dan didominasi oleh suatu komunitas tertentu, sehingga tidak memungkinkan pengungsi untuk kembali ke tempat asal.

Kerugian akibat kerusuhan yang melanda Maluku khususnya Kota Ambon dan Maluku Tengah yang dimulai pada awal tahun 1999, tidak hanya menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk yang negatif.²⁸ Banyaknya penduduk yang mengungsi, dan suasana yang belum pulih total memang menyebabkan tingkat produksi dan mobilitas masyarakat masih sangat kecil untuk meningkatkan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Ambon. Secara substansial, konflik sosial tersebut telah kembali menelantarkan potensi daerah dan menimbulkan kesengsaraan baru bagi rakyat, setelah dahulu dieksploitasi oleh penjajah. Perekonomian Ambon yang sejak lama didasarkan pada sektor perdagangan, saat ini sudah mengalami perubahan orientasi. Kota Ambon mengalami kerugian yang sangat signifikan dari sektor perdagangan. Hal ini disebabkan banyak pusat perdagangan hancur terkena imbas kerusuhan. Banyak investor (kecil, sedang, besar) terpaksa keluar dari Kota Ambon. Tahun 2001 banyaknya pedagang tetap yang tercatat pada Dinas Perindustrian

²⁶ Dikutip dari "Pengungsi Saling Serobot Rumah", Kompas, Jumat, 05 September 2003.

²⁷ Kebijakan ini tertuang dalam Inpres No. 51 Tahun 2001. Inpres ini dikeluarkan untuk menata Indonesia agar bebas dari pengungsi. Dalam kebijakan ini ada tiga pilihan untuk pengungsi. Pilihan itu adalah kembali ke tempat asal, transmigrasi, dan relokasi.

²⁸ Tabel pertumbuhan penduduk bisa dilihat pada lampiran.

dan Perdagangan Propinsi Maluku hanya 550 pedagang, terdiri dari pedagang kecil 511 orang dan sedang 39 orang, sedangkan pedagang besar tidak tercatat. Padahal pada tahun 2000, jumlah pedagang kecil sudah mencapai 8.974 dan pedagang besar 841. Pada tahun 1998 perdagangan sudah menjadi kontributor kedua setelah sektor pertanian, dan memberikan sumbangan sebesar 21.38 persen PDRB. Akan tetapi, dua tahun kemudian (1999 dan 2000), posisinya menurun hingga berada di peringkat ketiga dari total PDRB.²⁹

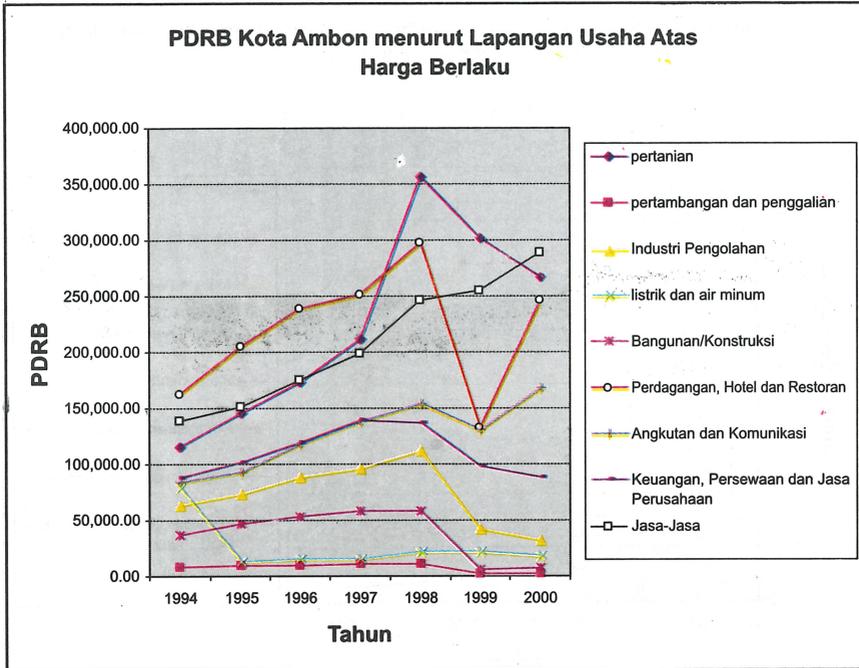
Selama ini, sektor pertanian masih belum memiliki peranan yang strategis di Kota Ambon. Hasil pertanian tanaman pangan yang diunggulkan, seperti beras, tidak mampu dihasilkan oleh lahan-lahan di Ambon yang memiliki topografi bergelombang yang terbentuk dari batu kapur dan karang. Sesuai kondisi geografis serta kemampuan lahannya maka usaha pertanian rakyat yang utama adalah pengembangan tanaman palawija dan tanaman holtikultura seperti ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan jagung. Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Ambon sampai dengan tahun 2001, dari luas keseluruhan tanah kering sebesar 35.944,80 ha, 15.455,6 ha digunakan untuk usaha pertanian, sedangkan 20.489,20 ha sisanya untuk usaha non-pertanian.

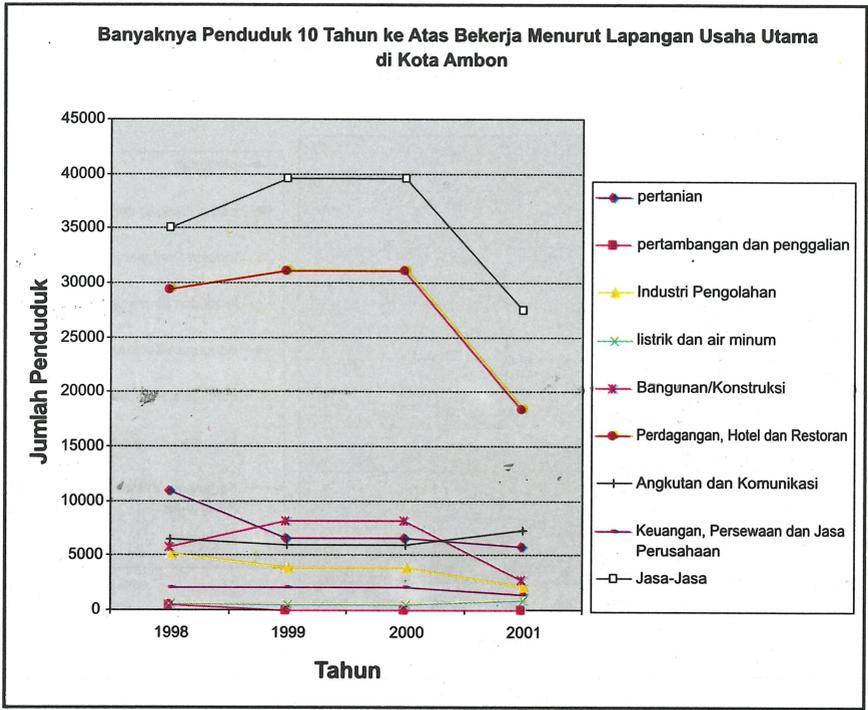
Saat ini perekonomian Ambon didukung oleh sektor perikanan, walaupun potensi perairan memang masih menghasilkan keuntungan yang fluktuatif bagi daerah. Namun, potensi ini merupakan kontribusi yang menjanjikan sebagai sumbangan alternatif di tahun-tahun berikutnya, dan sektor ini sangat diminati oleh penduduk Ambon. Terbukti dengan jumlah Rumah Tangga Nelayan yang tercatat pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Ambon pada tahun 2001 sebanyak 4.236 RT dengan perahu penangkap ikan ukuran kecil 1.154 buah, perahu ukuran sedang 153 buah dan

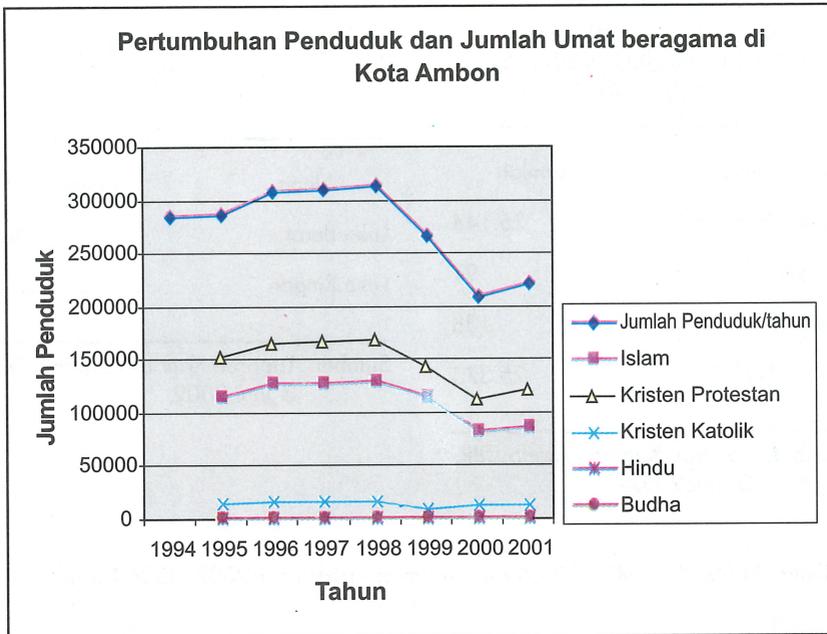
²⁹ Lihat Grafik PDRB Kota Ambon menurut lapangan usaha atas harga berlaku.

perahu ukuran besar 175 buah. Peningkatan jumlah rumah tangga nelayan naik sebesar 2.89%, diiringi pula dengan peningkatan jumlah perahu tanpa motor rata-rata di atas 2,67%. Pada tahun 2001, jumlah perahu/kapal penangkap ikan di pusat pendaratan di Kota Ambon tercatat 1.482 buah, meningkat sebesar 2,92% dari tahun 2000. Peningkatan jumlah perahu/kapal penangkap ikan di pusat pendaratan Ambon seiring dengan meningkatnya produksi perikanan. Selama tahun 2001, produksi perikanan di Kota Ambon tercatat 16.227,42 ton dengan nilai produksi sejumlah Rp.229.934.440.000,-. Dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, baik jumlah produksi maupun nilai produksi meningkat sebesar 2.89%. Selanjutnya dari produksi perikanan di atas, urutan tertinggi adalah udang sebesar 7.357,98 ton (45,34%) dan terendah adalah ikan ekor kuning sebesar 49,71 ton (0,31%).

Berdasarkan hasil analisa mengenai perubahan lapangan usaha serta kemampuan produksi penduduk yang tercermin dari PDRB, maka jelas bahwa korban telah memilih lapangan pekerjaan yang paling memungkinkan di saat krisis ini, karena pertanian darat misalnya sudah tidak dimungkinkan lagi dilakukan akibat terlalu sering gagal panen. Salasatu alternatif di sektor pertanian yang masih memungkinkan tambahan produksi adalah perikanan karena adanya permintaan ekspor. Selain itu, kemampuan penduduk, khususnya para pengungsi, hanya bisa berusaha di sektor jasa, maka tidak heran jika sektor jasa selalu mengalami peningkatan.







KORBAN TEWAS AKIBAT KONFLIK MALUKU 1999-2002 VERSI POLRI

Kelompok	Jumlah
Masyarakat	1.797
Polisi	32
TNI	13
TOTAL	1.842

Sumber: Laporan Kapolri kepada DPR 3 Juni 2002

KORBAN AKIBAT KONFLIK MALUKU VERSI BAILEO MALUKU

Jenis	Jumlah
Korban Tewas	8 000
Korban Luka-luka	4 000
Pengungsi	692.000

Sumber: Yayasan Baileo Maluku, 2002

BANGUNAN RUSAK AKIBAT
KONFLIK MALUKU 1999-2002
VERSI POLRI

Jenis	Jumlah
Rumah Penduduk	25.144
Masjid	91
Gereja	138
TOTAL	25.373

Sumber: Laporan Kapolri kepada DPR,
3 Juni 2002

KORBAN LUKA AKIBAT KONFLIK
MALUKU 1999-2002
VERSI POLRI

Jenis	Jumlah
Luka Berat	1.881
Luka Ringan	2.213

Sumber: Laporan Kapolri kepada DPR,
3 Juni 2002

Data diambil dari URL : http://www.elsam.or.id/txt/asasi/2002_0506/03.html

BAB III

ANALISA STRUKTUR

III.1. Kronologis Kerusuhan Ambon

Beberapa referensi maupun penelitian mengenai kerusuhan Ambon biasanya membagi konflik Ambon ke dalam tiga periode, yaitu: (1) periode pertama dimulai pada tanggal 19 Januari 1999 dengan adanya peristiwa Idul Fitri Berdarah, (2) periode kedua adalah periode pasca PEMILU di bulan Juni 1999 dan (3) periode ketiga pada akhir bulan April/awal bulan Mei 2000 ditandai dengan masuknya Laskar Jihad (LJ) ke Ambon.³⁰ Pembagian di atas cukup menggambarkan dinamika yang terjadi selama konflik, namun dirasa masih kurang lengkap karena tidak mengikutsertakan kondisi yang mendorong proses pematangan konflik ataupun dinamika yang terjadi setelah masuknya LJ di Ambon. Untuk memberikan dinamika konflik Ambon secara lebih lengkap maka pembahasan kronologis konflik Ambon dalam penelitian ini akan dibagi ke dalam enam periode, yaitu fase pematangan kondisi, peristiwa Idul Fitri Berdarah, pasca pemilu, masuknya LJ di Ambon, pemberlakuan Darurat Sipil dan fase de-eskalasi konflik masal.

Periode pertama adalah periode pematangan kondisi, di mana konflik-konflik kecil sudah terjadi pada bulan Desember 1998 di beberapa desa di Ambon (Desa Bak Air, Wailete) maupun pulau sekitarnya (Pulau Dobo). Periode kedua pada bulan Januari 1999 dimulai dengan peristiwa Idul Fitri Berdarah, dan mereda pada bulan Maret/April 1999. Periode ketiga pada Juli 1999 atau periode pasca PEMILU, kerusuhan merebak dengan adanya konflik di pemukiman Poka. Sempat terjadi upaya rekonsiliasi yang seolah-olah akan

³⁰ Versi Gerakan Baku Bae

membuahkan hasil, tetapi ternyata gagal pula. Periode keempat, akhir bulan April/ awal bulan Mei 2000, ditandai dengan masuknya Laskar Jihad (LJ) di Ambon yang menyebabkan stagnannya proses rekonsiliasi yang sedang terjadi. Masuknya LJ menimbulkan perubahan peta kekuatan kelompok yang bertikai. Pada periode ini intensitas konflik boleh dikatakan mencapai puncaknya. Periode ke lima, pada bulan Juni 2000 dimulai dengan adanya Pemberlakuan Status Darurat Sipil (PSDS) di Maluku yang pada kenyataannya tidak mampu meredam kerusuhan. Pola kerusuhan pada periode ini sudah mengalami perubahan, antara lain dengan sudah digunakannya ranjau, bom, maupun teknik gerilya kota ala ninja dalam berbagai penyerangan. Periode keenam, dimulai pada bulan Oktober 2002, gejala yang ditangkap dalam periode ini adalah timbulnya kesadaran kritis di kalangan masyarakat untuk tidak bersikap reaktif terhadap teror yang terjadi. Secara sporadis masih terjadi teror bom di sana sini namun masyarakat sudah tidak lagi terpancing untuk melakukan tindak balas atas kerusakan yang terjadi. Hal-hal lain yang mendorong kondisi kondusif tersebut adalah dengan pembubaran dan ditariknya Laskar Jihad keluar dari Ambon.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa pembagian kronologi ke dalam enam periode ini dimaksudkan untuk mendapatkan dinamika kerusuhan Ambon secara lebih lengkap, dimulainya sejak timbulnya gejala-gejala berupa konflik-konflik kecil di berbagai tempat, kemudian pecah konflik secara besar-besaran dan pada akhirnya intensitas konflik mulai meredup. Pada periode pertama, misalnya ditemukan proses pematangan kondisi berupa maraknya konflik-konflik dengan pola yang sama di beberapa tempat di Ambon ataupun di luar Ambon pada bulan Desember 1998 ataupun awal Januari 1999. Sebuah hal yang patut dicatat adalah konflik tersebut bersifat lokal dan tidak merembet ke daerah lain. Dalam kelanjutannya terjadi proses pematangan kondisi dan menimbulkan konflik intensitas kecil ataupun sedang. Dengan timbulnya faktor-faktor yang mendorong eskalasi konflik, maka

pecahlah konflik intensitas tinggi. Setelah konflik intensitas tinggi maka yang akan terjadi adalah proses de-eskalasi konflik, dan dalam kerusuhan Ambon ditandai dengan menurunnya intensitas kerusuhan masal antar kelompok, timbulnya kesadaran kritis di kalangan masyarakat untuk tidak bersikap reaktif terhadap pengrusakan-pengrusakan yang masih terjadi. (Burton, 1990 p.107)

III.1.1. Periode Pertama

Dalam periode pertama, kerusuhan terjadi di Ambon dan di Pulau Aru. Penyebab kerusuhan bervariasi mulai dari masalah hubungan antar tetangga, seperti di Desa Bak Air (27 September 1998) yang bermula dari pelemparan ternak babi milik warga Tawiri dan dibalas dengan pelemparan rumah penduduk Bak Air yang mayoritas Muslim. Kerusuhan juga terjadi dalam sebuah pesta rakyat di Wailete (13 Desember 1998). Kampung Wailete penduduknya sebagian besar etnis Buton dan Bugis. Pada sebuah pesta perkawinan, seorang prajurit melanggar adat dengan berjoget memakai topi. Teguran untuk sang prajurit merembet menjadi perkelahian. Ketika malam tiba, Desa Wailete diserang dari arah Desa Hative Besar. Di Dobo, Pulau Aru (15-16 Januari 1999) kerusuhan dipicu oleh perkelahian antar dua warga yang mabuk minuman keras. Dalam ketiga kerusuhan tersebut, walaupun faktor penyebabnya berbeda-beda, namun dampak yang terjadi selalu sama, yaitu pengelompokan warga berdasarkan agama. Sikap reaktif warga ditunjukkan dengan adanya konsolidasi warga seagama yang kemudian melakukan tindak balasan terhadap kelompok lain.

Pada periode ini sudah terjadi provokasi antar warga dengan menggunakan simbol-simbol agama.³¹ Selain merusak rumah tinggal

³¹ Pada peristiwa Dobo, kaum Kristen memiliki lagu perjuangan "Laskar Kristus Maju", sedangkan kelompok Islam memiliki slogan: "Kaum Muslim bangun, kita berperang melawan orang Kristiani", hal. 73 Netralitas Yang Semu, PSPK.

juga sudah terjadi pengrusakan/ pembakaran masjid. Reaksi aparat keamanan dinilai lamban, dan/ataupun justru terlibat dalam kerusuhan tersebut, seperti misalnya dalam kerusuhan Dobo. Nara sumber di lapangan menyatakan bahwa sebenarnya proses pematangan kondisi ini tidak hanya terjadi di Ambon tapi juga terjadi di beberapa tempat lain di Indonesia, misalnya di Sampit, Situbondo, Sampang dan lainnya.³² Apabila di tempat lain kerusuhan bisa langsung diredam dalam waktu yang relatif singkat ternyata Ambon baru bisa tenang setelah 3½ tahun.

Kerusuhan massal di Kota Ambon dimulai ketika pada tanggal 18 November 1998 gerakan mahasiswa Ambon pro-reformasi mencapai puncaknya. Waktu itu 7000 mahasiswa dari beberapa universitas di Ambon melakukan demo di depan kantor Korem 174/Patimura menuntut dwifungsi ABRI. Selain bentrokan, terjadi pengrusakan fasilitas militer oleh mahasiswa dan jatuhnya korban jiwa di kalangan mahasiswa. Isu penting lainnya yang terjadi pada waktu yang bersamaan adalah masuknya preman-preman Ambon dari Jakarta yang diusir akibat adanya kerusuhan Ketapang.³³ Dampak kerusuhan Ketapang tersebut adalah meningkatnya sentimen negatif terhadap preman Ambon di Jakarta sehingga Pemda DKI Jaya memutuskan untuk memulangkan mereka ke Ambon. Beberapa preman yang disegani ada dalam rombongan yang dipulangkan tersebut, misalnya Milton Matuanakota, Sadrakh Mustamu (kelompok Kristen) serta Ongen Sangaji (Islam). Dari beberapa saksi mata di atas KM Bukit Siguntang diperoleh indikasi bahwa preman yang

³² Wawancara Bapak Pendeta Noce Patinaya

³³ Kerusuhan Ketapang dimulai dengan keributan antara preman Ketapang yang mayoritas asal Ambon yang menjaga rumah-rumah perjudian di Daerah Ketapang bentrok dengan warga sekitar. Warga sekitar dibantu dengan FPI (Front Pembebasan Islam) bangkit melawan kelompok preman tersebut.

dipulangkan ini berniat untuk melakukan balas dendam terhadap musuh-musuh mereka di Ambon.³⁴

III.1.2. Periode Kedua

Periode kedua terjadi ketika konflik antar preman yang biasa terjadi di Ambon merembet menjadi pertikaian antar kelompok agama, dan meledak di seluruh kota, pulau dan bahkan pulau sekitarnya. Pada tanggal 19 Januari 1999, yang juga merupakan hari raya Idul Fitri, terjadi keributan antar Yopi dan Usman (kasus ini akan dibahas secara terinci dalam Analisa Pemicu Konflik). Pertikaian antar pribadi tersebut kemudian menyeret kelompok masing-masing, dalam hal ini khususnya warga Batu Merah dan Mardika.

Menjelang malam ada isu pembakaran Masjid Al-Fatah maupun Gereja Silo, sehingga masing-masing kelompok berkumpul dan mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan. Dalam waktu yang relatif singkat pecahlah kerusuhan massal di Ambon yang diikuti dengan penyerangan, pembantaian, pembakaran rumah penduduk, mobil dan rumah ibadat. Pada kerusuhan tersebut terdapat indikasi bahwa pengrusakan terutama dilakukan terhadap warung/kios maupun becak milik warga Buton, Bugis, Makassar.

Dari Bapak Pendeta Noce Patinaya (wawancara 14 Agustus 2003) maupun Imam Pohon Mangga (wawancara 15 Agustus 2003) diperoleh keterangan bahwa bentrok antara pemuda Batu Merah dan Mardika adalah suatu hal yang biasa. Seluruh warga Ambon sudah mengetahui bahwa di daerah tersebut sering terjadi konflik dan biasanya langsung rujuk. Namun pada kejadian kali ini intensitas kerusuhan tidak seperti biasanya, pada saat yang relatif singkat sudah terjadi pembakaran becak, mobil, rumah dan bahkan pembantaian. Massa sudah saling berhadap-hadapan di jalan-jalan dengan

³⁴ George J. Aditjondro, *Orang-orang Jakarta dibalik tragedi Maluku* (2001).

menggunakan tanda pengenal berupa ikat putih bagi warga Muslim dan ikat merah bagi warga Kristen.

Isu santer mengenai pembakaran Masjid Al-Fatah yang merupakan simbol warga Muslim di Ambon membangkitkan amarah warga jazirah Leihitu, dan dalam semangat persaudaraan mereka berusaha menolong sesama warga Muslim di Ambon.³⁵ Keesokan harinya (20 Januari 1999) massa dari beberapa desa di Leihitu (Hitu, Wakal, Mamala, Morella) mengkoordinasikan diri kedalam beberapa kelompok. Semua lapisan mengambil peran masing-masing, misalnya kaum ibu serta anak perempuan bertanggung jawab terhadap logistik. Dengan peralatan seadanya massa mulai merangsek masuk Ambon. Pada saat itu massa berhasil ditahan aparat di Daerah Passo, namun beberapa desa Kristen yang berada dalam rute perjalanan telah dibumi hanguskan, antara lain Dusun Telaga Kodok, Hunuth, Benteng Karang, Hila dan Waiheru.

Saling menyerang antara warga Muslim dan Kristen dilakukan dengan menggunakan senjata primitif buatan sendiri (panah, parang), termasuk bom rakitan. Diperoleh indikasi adanya isu³⁶ serta penyebaran pamflet yang pada intinya memperingatkan kedua belah pihak, bahwa pihak lain sedang merencanakan untuk membakar rumah ibadah dan merencanakan untuk membinasakan kelompok lawan.³⁷ Ucapan-ucapan 'Hidup RMS' dan anti BBM-JS sudah senantiasa didengung-dengungkan. Selain itu juga terjadi penyaluran handy talkie di kalangan pemimpin kelompok setempat untuk mempermudah koordinasi antar kelompok.

³⁵ Wawancara dengan Haji Slamet, 13 Agustus 2003.

³⁶ Isu santer di Daerah Batu Gantung Waringin, Kelurahan Kuda Mati bahwa akan terjadi perang antar warga Islam dan Kristen sudah beredar pada awal Januari 1999.

³⁷ Kurun waktu 19-25 Januari 1999: korban jiwa sebanyak 95 orang, 226 orang luka-luka dan 44,244 orang harus hidup sebagai pengungsi, UNSFIR 2002

Aparat yang seharusnya menjadi *buffer* antara kelompok yang bertikai ternyata malah seringkali menjadi pemicu konflik. Misalnya dalam insiden di Desa Aruhu (23 Januari 1999), beberapa anggota Brimob melakukan penembakan terhadap warga Muslim dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.³⁸ Dalam insiden terminal Mardika (3 Februari 1999), aparat melepaskan tembakan membabi buta dalam sebuah kasus pengejaran copet sehingga menimbulkan kepanikan diantara warga dan memicu terjadinya kerusuhan. Pada penghancuran Desa Kariu (14 Februari 1999) terdapat indikasi kuat peran aparat dalam menggalang massa penyerang.

Intensitas kerusuhan menurun di bulan Maret dan memasuki bulan April 1999 boleh dibilang kondisi sudah berangsur-angsur pulih. Namun telah pula terjadi segregasi di antara masing-masing kelompok, sehingga dalam kondisi tenang tersebut sebenarnya demikian sudah mulai timbul dendam diantara para warga karena banyaknya jumlah korban yang meninggal/terbunuh dari masing-masing kelompok.³⁹ Kota Ambon dan beberapa desa di sekitarnya mulai terbagi dalam dua wilayah: Islam dan Kristen. Masyarakat mulai hidup secara terpisah, dengan pembagian layanan publik untuk masing-masing kelompok, misalnya bank untuk kelompok merah dan putih, angkutan kota bagi masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok berjaga di lingkungannya, menyaring ketat setiap orang yang tidak dikenal yang akan masuk ke daerahnya.

Pada periode ini kedua peran provokator sudah mulai terlihat, sebagaimana diceritakan oleh Bapak Pendeta Noce Patinaya (wawancara 14 Agustus 2003) dalam kasus perayaan hari Pattimura

³⁸ Dari isu yang beredar disebutkan bahwa warga ditembak aparat didalam masjid. Hal ini kemudian di blow up oleh media nasional dan isu ini yang digunakan oleh tokoh Islam dalam menggalang semangat solidaritas maupun himbauan untuk jihad di Maluku. Namun versi ini ditolak oleh pihak Kristen Pusat Penanggulangan Krisis PGI membuat pernyataan yang menyebutkan bahwa versi Subuh Berdarah tidak benar dan merupakan pemutarbalikan fakta (hal. 16 – Media dan Konflik Ambon)

³⁹ Wawancara Pendeta Noce Patinaya

pada tanggal 13 Mei 1999.⁴⁰ Pada acara tersebut, tepatnya di Daerah Batu Merah, obor yang seharusnya dibawa ke Ambon ditahan oleh massa, dan bapak pendeta berhadapan dengan seorang pemuda yang sedang membakar semangat pemuda Muslim. Dua hari kemudian pemuda yang sama ditemukan di Galala sedang memberikan semangat kepada pemuda Kristen untuk melakukan penyerangan. Pemuda tersebut sempat ditangkap dan diserahkan kepada aparat untuk diperiksa namun dikatakan bahwa aparat tidak menemukan bukti yang cukup sehingga pemuda tersebut akhirnya dilepas kembali; walaupun dari pengakuan yang diperoleh bapak Pendeta Noce Patinaya terdapat indikasi yang kuat tentang peran pemuda tersebut sebagai provokator.⁴¹

Selama periode tenang (April - Mei 1999), kegiatan warga Ambon kembali berlangsung normal. Namun dalam bulan-bulan tersebut segresi antar warga sudah mulai terasa.

III.1.3. Periode Ketiga

Suasana kampanye pemilu 1999, menumbuhkan kembali situasi panas di Ambon. Ditengarai bahwa upaya untuk memenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di Propinsi Maluku telah menyebabkan terusirnya puluhan ribu warga BBM dari Maluku Tengah.⁴² Upaya kelompok Kristen yang selama ini tersingkir untuk meraih posisi kunci di pemerintahan melalui PDI-P yang identik dengan Kristen menimbulkan kembali bibit-bibit konflik di antara para warga.

⁴⁰ Kasus obor Pattimura dipicu unsur rekayasa dari panitia pelaksana hari Pattimura yang diketuai oleh Sekretaris Kota. Dalam perjalanan obor yang seharusnya dibawa ke daerah warga Islam direbut oleh Pemuda Kristen (hal. 75) Netralitas yang Semu, PSPK

⁴¹ Wawancara Bapak Pendeta Noce Patinaya

⁴² ICG: Indonesia The Search For Peace, ICG Asia Report no. 31, February

Seusai pemilu ketegangan semakin meningkat dan periode ke tiga dibuka dengan kerusuhan antar warga Desa Ulath yang Kristen dan warga SiriSori Islam di Saparua (15 Juli 1999), dan kerusuhan besar di Poka (24 Juli 1999). Perumahan Poka yang selama ini dianggap tempat aman dan tidak tersentuh dengan kerusuhan pada periode sebelumnya menjadi rusuh ketika terjadi insiden lempar melempar batu antar warga Desa Poka dengan daerah sekitarnya. Kerusuhan Poka menyebabkan pembakaran rumah warga Kristen (kompleks Perumnas Poka) yang kemudian dibalas dengan pembakaran rumah dosen Muslim di Desa Poka dan Kompleks Universitas Pattimura. Warga Islam berbondong-bondong mengungsi ke Masjid Al-Fatah. Selain itu juga terjadi pembakaran toko di sekitar Jl. AY Patty dan bahkan kerusuhan merembet ke wilayah lain di seluruh Ambon.

Intensitas kerusuhan semakin meningkat dan menyebabkan aktivitas sosial ekonomi berhenti total. Segregasi sebagai warisan kerusuhan periode kedua menjadi semakin kuat, bahkan di Daerah Ambon hanya tersisa satu desa (Wayame) yang masyarakatnya terdiri dari warga Islam dan Kristen. Pada periode ini koordinasi antar aparat sudah sangat buruk, seperti misalnya pada tanggal 26-27 November 1999 terjadi bentrok antara aparat Kepolisian dan Militer di Ambon yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit.

Konflik paling besar dalam periode ini adalah kasus pembakaran Gereja Silo dan Masjid An-Nur pada tanggal 26 Desember 1999. Dimulai dengan raibnya jenazah seorang anak raja yang diserempet di jalan Dr. Tamaela. Massa yang tidak puas mulai berkerumun di depan Gereja Silo dan menuntut agar jenazah anak tersebut dikembalikan kepada keluarganya. Massa menjadi tidak terkendalkan ketika terjadi aksi penembak gelap (*sniper*) dari atap-atap gedung perkantoran yang berada di dekat Gereja Silo.

Pada periode ini juga mulai dikenal sebutan Obet (asal kata Robert yang identik dengan warga Kristen) dan Acang (asal kata

Hassan dan identik dengan warga Muslim), peran milisi sangat menonjol dan ditandai pembagian warga berdasarkan kelompok umur dan jender dalam upaya pengaturan strategi penyerangan. Misalnya, kelompok milisi anak dikenal sebagai kelompok Agas yang bertugas sebagai penyusup dan menaruh bom rakitan di daerah kelompok lawan secara diam-diam. Kelompok pemuda/remaja sebagai kelompok Linggis.⁴³ Kelompok ibu-ibu dan remaja wanita biasanya bertanggung jawab terhadap logistik. Jadi boleh dibilang bahwa masing-masing kelompok memiliki tugas dan tanggung jawabnya secara jelas. Peran milisi sangat menonjol dari kedua kelompok dan terorganisir dengan baik. Dengan lumpuhnya perekonomian, maka kesibukan kaum pria pada umumnya membuat senjata rakitan.

Pada awal tahun 2000 sebenarnya sudah terjadi beberapa upaya rekonsiliasi yang tampaknya dapat membuahkan hasil yang positif. Untuk beberapa waktu kondisi Ambon relatif tenang tanpa kerusuhan besar yang berarti. Tidak demikian halnya dengan warga Islam di daerah lain, terjadi upaya pembentukan opini publik terhadap kondisi warga Islam di Ambon, khususnya akibat kerusuhan di Desa Gorua, Maluku Utara (30 Desember 1999). Informasi yang berkembang adalah bahwa warga Islam dibantai di dalam masjid. Hal ini tentu saja membangkitkan semangat solidaritas di antara warga Islam di daerah lain. Pada tanggal 7 Januari 2000 di Jakarta diselenggarakan acara tabligh akbar yang dihadiri oleh antara lain Amien Rais, Fuad Bawazier, Hamzah Haz, dan Jaffar Umar Thalieb. Tabligh akbar inilah yang pada akhirnya dijadikan sebagai platform awal pengiriman pasukan untuk berjihad di Maluku.

⁴³ Konflik Antaragama atau politisasi agama, Margawati & Aryanto (2000)



Aktivitas kelompok Islam pada saat konflik



Aktivitas kelompok Kristen pada saat konflik

III. 1.4. Periode Keempat

Dalam penyelenggaraan tabligh akbar, disampaikan mengenai kegagalan Presiden Abdurahman Wahid dalam mendamaikan Ambon dan pembunuhan warga Islam di Ambon. Pada kesempatan tersebut dimaklumkan jihad untuk membantu warga Islam di Ambon. Beberapa kelompok Islam yang menanggapi maklumat tersebut antara lain adalah FPI (Front Pembela Islam)

Jakarta dan Laskar Jihad (LJ).⁴⁴ Kedua kelompok tersebut membuka pendaftaran bagi warga yang ingin berjihad di Ambon, dan LJ melakukan latihan-latihan perang di Bogor.⁴⁵

Ja'far Umar Thalib, selaku pimpinan Laskar Jihad menyatakan bahwa 10,000 anggota LJ sudah diberikan pelatihan ala kemiliteran. Disampaikan bahwa LJ akan melakukan bantuan kemanusiaan dan upaya dakwah di Maluku. Presiden Abdurrahman Wahid telah berupaya untuk menghalangi kepergian LJ ke Maluku, namun pemerintah tersebut tidak ditanggapi. Periode keempat ini ditandai dengan masuknya Laskar Jihad ke Maluku pada tanggal 26 April 2000. Masuknya Laskar Jihad menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan kekuatan antara kedua kelompok yang bertikai. Laskar Jihad masuk dengan menggunakan senjata modern, terorganisir dengan baik dan dukungan dana yang kuat. Hal ini diperburuk lagi dengan sikap aparat keamanan yang terpancing untuk melakukan pembelaan terhadap masing-masing kelompok. Terjadi upaya untuk mendorong warga Kristen keluar dari daerah-daerah yang berbasis Muslim, misalnya dengan penghancuran Desa Galala, Hative Kecil (12 Juni 2000), Aruhu, Karang Panjang (26 Juni 2000), Waai (Juli 2000), dan Hative Besar (25 September 2000). Penyerangan terhadap beberapa desa Kristen menjadi sangat terorganisir dengan menggunakan senjata otomatis, radio komunikasi, dan serangan terkoordinasi dari laut dan darat. Kelompok Kristen berusaha mengimbangi kehadiran laskar Jihad dengan mengorganisir kekuatan pemudanya dalam Laskar Kristus.

Keuntungan dari kehadiran Laskar Jihad adalah desa Muslim yang terjepit diantara desa-desa Kristen seperti misalnya Desa Pohon Mangga menjadi aman. Sebelumnya desa mereka sering diserang oleh warga desa lain, walaupun sudah ada aparat yang menjaga (wawancara Imam Pohon Mangga, 13 Agustus 2003). Dari berbagai

⁴⁴ Laskar Jihad didirikan Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah

⁴⁵ Hal. 131, Media dan Konflik Ambon

narasumber ditemukan bahwa selain bantuan keamanan, pasukan LJ juga memberikan bantuan medis, bahan pokok. Karakteristik yang cukup mencolok dari pasukan LJ adalah bahwa mereka tidak terlalu banyak mengadakan kontak dengan warga.

Persepsi yang semakin mengental pada saat itu adalah keberadaan aparat militer di belakang kelompok Putih, dan keberadaan kepolisian di belakang kelompok Merah. Ada upaya masing-masing kelompok untuk memperlemah kelompok tandingannya, seperti misalnya dalam penyerangan Asrama Polisi di Tantui, 21 Juni 2000. Pada saat itu terjadi penembakan terhadap seorang anak yang sedang mencari buah sukun di dekat asrama. Kematian anak itu memicu kemarahan warga dan beberapa saksi mata menyatakan bahwa sang penembak lari masuk ke dalam asrama. Warga yang marah melakukan aksi balas dendam dengan mengepung kawasan Tantui. Massa bersama-sama dengan LJ dibantu oleh Kopassus berhasil menghancurkan asrama Brimob, yang dihuni oleh 2000 anggota Polri dan keluarganya. Dua gudang amunisi dibobol, 823 pucuk senjata, 8000 butir peluru dan lusinan seragam Polri dicuri. Terjadi korban jiwa di kalangan aparat Polri, selain itu gereja dan rumah penduduk juga dibumi hanguskan.

Pada periode keempat ini bisa dikatakan intensitas konflik mencapai puncaknya, dilihat dari besarnya kehancuran yang ditimbulkan. Strategi yang digunakan oleh warga Muslim dan LJ adalah melakukan pengosongan desa Kristen sebelum dilakukan penyerangan sehingga walaupun kerusakan yang terjadi cukup dahsyat namun korban jiwa relatif tidak terlalu banyak. Setelah warga desa dikeluarkan baru dilakukan aksi bumi hangus.

III.1.5. Periode Kelima

Periode kelima ditandai oleh gencarnya upaya pemerintah untuk menumbuhkan perdamaian di Ambon. Dimulai dengan

pemberlakuan status daerah darurat sipil bagi Maluku oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 27 Juni 2000 dengan dikeluarkannya Keppres No. 88, 2000.⁴⁶ Diharapkan dengan pemberlakuan status ini, maka penguasa bisa menekan kerusuhan. Namun status ini ternyata hanya menjadi macan kertas karena intensitas kerusuhan masih tetap tinggi dan korban yang jatuh masih cukup banyak. Bahkan dalam hitungan hari (4 Juli 2000) sejak diberlakukannya status ini, Universitas Pattimura yang merupakan simbol kebanggaan pendidikan di Ambon diratakan dengan tanah.⁴⁷ Kondisi di Ambon bagaikan di medan peperangan, dengan penembak jitu beraksi di atas rumah maupun kantor, letupan senjata setiap saat dan teror bom merebak di mana-mana. Serangan terkoordinasi terhadap satu desa menjadi semakin marak, dan diperkirakan dalam bulan-bulan pertama diberlakukannya Status Daerah Darurat Sipil jatuh korban jiwa setidaknya mencapai 110 orang.⁴⁸

Pada tanggal 18 Desember 2000, Alex Manuputty mendeklarasikan berdirinya Front Kedaulatan Maluku (FKM) yang salah satu agendanya adalah pembebasan masyarakat Maluku dari Indonesia.⁴⁹

Pada awalnya aparat tidak melakukan tindakan apapun terhadap berbagai aksi yang dilakukan Laskar Jihad walaupun sudah ada perintah dari Presiden selaku Panglima Tertinggi. Insiden antar aparat masih terjadi, misalnya dalam kejadian di Batu Merah (20 Januari 2001) di mana YonGab TNI yang terdiri dari unsur Kopassus, Marinir serta Paskhas terlibat baku tembak dengan aparat Polri yang menyebabkan jatuhnya korban warga sipil. Penyerangan ala ninja dari kelompok Islam semakin marak, yang ditandai dengan

⁴⁶ ICG Asia Report no. 31, 8 February 2002

⁴⁷ Hal. 130, Media dan Konflik Ambon

⁴⁸ ICG Asia Report no. 31, 8 February 2002

⁴⁹ Hal. 134, Media dan Konflik Ambon

pemutusan arus listrik pada daerah yang diserang. Penyerangan di daerah pemukiman Kristen di Mardika, Belakang Soya dan Karang Panjang (20 Mei 2001), menimbulkan jatuh korban jiwa sebanyak 18 orang. Penyerangan yang sama terjadi di Wisma Gonzalo, Karang Panjang (12 Juni 2001).⁵⁰ Setelah listrik diputus dan daerah menjadi gelap gulita, pasukan ala ninja masuk dan melakukan penembakan-penembakan terhadap warga.

Dalam perkembangan selanjutnya aparat mulai mengambil tindakan tegas dengan melakukan sweeping terhadap daerah-daerah yang menjadi basis LJ, misalnya sweeping di Daerah Kebon Cengkeh oleh YonGab (14 Juni 2001). YonGab menyatakan telah menemukan 4 senapan AK-47, bom rakitan dan pistol di Puskesmas yang didirikan oleh LJ. Pada saat yang bersamaan radio LJ, Suara Perjuangan Muslim Maluku (SPPM) dihancurkan.⁵¹

Pada periode ini emosi masyarakat masih relatif tinggi sehingga mudah dipicu oleh berbagai kejadian, seperti misalnya pada kasus peledakan Kapal California (11 Desember 2001) yang menyebabkan puluhan warga Kristen meninggal. Dari beberapa saksi mata diperoleh keterangan bahwa selain meninggal akibat bom, banyak korban jatuh diantaranya akibat luka tembak dari kapal-kapal yang merapat dekat Kapal California tersebut. Hal tersebut mendorong warga Kristen untuk melakukan tindakan emosional, yaitu membakar kantor DPRD Ambon.

Upaya lain pemerintah adalah dengan disepakatinya Perjanjian Malino 2 pada tanggal 12 Februari 2002. Perjanjian Malino melibatkan berbagai unsur yang terlibat dengan konflik, walaupun sudah ada kesepakatan ternyata masih timbul kerusuhan misalnya ketika pawai sosialisasi Malino pada bulan Maret 2002.⁵²

⁵⁰ ICG, no. 31, 8 Februari 2002

⁵¹ ICG, no. 31, 8 Februari 2002

⁵² Hal. 15 Media dan Konflik: Ambon

III.1.6. Periode Keenam

Periode keenam, yang dapat dikatakan sebagai periode de-eskalasi konflik. Teror dalam bentuk bom serta ranjau masih marak, namun masyarakat sudah tidak terpancing. Model perang gerilya di dalam kota dengan penyerangan ala ninjapun masih terjadi di Daerah Soya (27 April 2002), di mana para penyerang memakai seragam militer dan menggunakan senjata organik, sehingga jatuh korban jiwa sekurang-kurangnya 12 warga Soya serta terbakarnya rumah penduduk dan gereja. Sekali lagi warga tidak terpancing untuk melakukan penyerangan balasan terhadap kelompok lain. Kondisi menjadi semakin kondusif ketika dalam perkembangan selanjutnya ditemukan adanya keterlibatan Kopassus dan kelompok Coker dalam penyerangan Soya dan juga peledakan kapal California. Momentum penting lainnya dalam periode ini adalah pembubaran Laskar Jihad dan penarikan Laskar Jihad dari Maluku pada tanggal 26 Oktober 2002.

Bom dan ranjau terus menimbulkan korban jiwa. Di sekitar Desa Suli, Galala, seorang laki-laki berumur 30 tahun tewas karena menginjak sebuah ranjau. Ranjau juga memakan korban di Karang Panjang, dekat Desa Soya, Daerah Nania/Negeri Lama, Porto, Kulur. Lokasi ranjau biasanya berada di hutan, dan umumnya merupakan ranjau rakitan yang masih baru diletakkan. Begitu juga dengan ledakan bom di di tribun Lapangan Merdeka Ambon (5 September 2002), yang memakan korban jiwa empat orang gadis yang baru saja mengikuti latihan olah raga dalam rangka persiapan Pelatnas di Jayapura.

Pada periode keenam ini beberapa konflik komunal justru terjadi antara desa-desa yang seagama, seperti antara Desa Porto-Haria pada bulan April dan Mei 2002. Karena warga sudah jenuh hidup dalam kondisi konflik, akhirnya timbul tekad yang besar untuk tidak mudah terpancing terhadap berbagai isu yang muncul di luar. Terlebih lagi setelah diperoleh indikasi bahwa ada pihak-pihak yang

ingin kondisi Ambon tetap rusuh melalui kasus Soya dan peledakan kapal California. Kondisi kondusif semakin meningkat dengan peranan gerakan rekonsiliasi perdamaian yang mendukung terciptanya daerah-daerah netral bagi ke dua kelompok untuk bertemu dan berinteraksi. Sehingga, ketika pada tahun 2003 ada penembakan gelap maupun bom-bom rakitan, kondisi Ambon relatif tenang.

Dalam kunjungan ke Desa Kulur di Saparua (11 Agustus 2003), pemilik mobil sewa yang beragama Kristen pada mulanya merasa keberatan apabila yang bersangkutan harus menyetir sampai ke Kulur. Namun, dengan kawalan seorang aparat kepolisian, perjalanan ke Desa Kulur bisa berjalan dengan lancar. Sesampainya di Kulur, mobil dikelilingi oleh beberapa orang anak yang berteriak-teriak, "Ada mobil Obet, mobil Obet", namun demikian rombongan peneliti dapat diterima dengan baik oleh Sekretaris Desa Kulur dan wawancara berlangsung dengan baik. Di Pulau Ambon, arus transportasi antara Passo dan Leihitu yang sebelumnya terputus kini juga sudah mulai normal kembali.

Dalam perkembangan selanjutnya, segregasi yang terjadi selama masa kerusuhan sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Hasil polling BB tahap II menunjukkan bahwa warga sudah bosan dengan konflik dan menginginkan adanya kondisi damai dan tentram di seluruh Ambon. Pemda setempat juga semakin aktif mendorong komunikasi antar raja, antara lain dengan menggunakan acara-acara pelantikan raja sebagai ajang silaturahmi sehingga menumbuhkan kembali rasa persaudaraan yang pupus selama masa konflik. Pekerjaan rumah yang masih tersisa hingga saat ini adalah proses pemulangan kembali pengungsi ke daerah asalnya. Beberapa LSM, seperti misalnya YPPM yang didominasi oleh putra dan putri daerah setempat, memainkan peranan aktif dalam proses pemulangan pengungsi ini.

PERIODE DALAM KERUSUHAN AMBON

	PERIODE I	PERIODE II	PERIODE III
Waktu	19 Jan '99	Jun '99	Jan '00
Isu utama	Ekonomi-Etnis	Agama	Separatis
Faktor Penebus	Idul Fitri, berderah	PDI-P menang	FKM berdiri (?)
Mobilisasi Massa	Pulau Ambon	Dari pulau sekitar Maluku	U
Media yang digunakan untuk menyebarkan isu	Telpon, HP/HT	Telpon, HP/HT, Brosur/Pamflet	Telpon, HP/HT
Peran Militer			
Pengrusakan pusat2 ekonomi	Skala kecil	Pusat Perbelanjaan & Pasar dibakar habis	
Senjata yang digunakan	Pisau, porang, panah	Senjata api, bom rakitan	Senjata api modern
Tipe Kerusuhan	Penyerangan Antar Desa, Kekuatan berimbang,		Kekuatan tidak berimbang. U & tentara TNI yang Muslim terlibat langsung
...rban/Jumlah Korban	Kematian disebabkan senjata tradisional atau kebakaran rumah	Kematian akibat senjata tradisional, kebakaran	Luka tembak di kepala/jantung

Sumber:

- George J. Adiondro – Help Ambon in Nood 6 Jul'01
- Keterlibatan Militer (70% korban meninggal karena tembakan senjata organik militer & polisi)
- 3 kesatuan Tentara (Kostrad, Brawijaya, Kopassus), 1 kesatuan polisi (Brimob)
- Kopassus: samaran jubah Arab, jenggot palsu (ciri khas UJ)/Kaos Laskar Maluku (Kristen)
- Kehadiran diantara U terbukti dari: menembak/tempor granat dari dalam drum minyak yang digelindingkan anggota U ketika menyerang UKIM (Universitas Kristen Indonesia Maluku) – menembak gelap
- Tanpa dukungan militer, U tidak pada tanggal 21-22Jun'00 tidak mungkin menghancurkan markas Brimob di Tantu.

III.2. Analisa Tentang Sumber Konflik

Sudah cukup banyak kajian dilakukan tentang konflik Maluku, termasuk untuk berusaha mencari sumber atau akar permasalahan yang menjadi penyebab konflik di kawasan ini. Sayangnya, hasil pengamatan dan kajian ini sering menunjukkan bias dan kecenderungan yang agak berlebihan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan dari pihak-pihak yang melakukan studi untuk membela satu kelompok dan menyerang atau menyudutkan kelompok yang lain. Di samping nilai negatif berupa bias tadi, hasil kajian semacam ini memiliki nilai plus berupa ketajaman analisis.

Tulisan ini akan mencoba merangkum hasil kajian tentang sumber Konflik Maluku dari berbagai pihak, ditambah dengan hasil peninjauan lapangan dan wawancara mendalam yang dilakukan di Ambon, Saparua, dan Haruku pada awal Agustus 2003. Pemetaan sumber konflik ini akan dibagi dalam tiga periode, yaitu: 1) Masa Kolonial, 2) Masa Orde Baru, dan 3) Masa Pasca Orde Baru.

III.2.1. Masa Kolonial

Smith Alhadar memberikan uraian cukup menarik tentang produk sejarah kolonial sebagai sumber kekerasan di Maluku, termasuk awal pemunculan konflik bernuansa agama. Ini dimulai dengan kedatangan bangsa Portugis yang membawa misi agama Katolik di samping misi dagangnya. Bangsa Belanda memulai petualangannya di Maluku dengan tujuan dagang dan penguasaan sumberdaya, lewat praktek monopoli dan kolonisasi, tetapi ternyata juga aktif menyebarkan agama Kristen Protestan. Dengan konsentrasi pada perdagangan dan kekuasaan, cengkeraman Belanda dalam urusan agama ternyata lebih kokoh dibanding yang dilakukan oleh bangsa Portugis.

Kalau dirinci atau dianalisis secara mendalam, maka sisa sejarah kolonial ini dapat diklasifikasi ke dalam empat permasalahan,

yaitu : Pertama, masalah kekuasaan dan perdagangan. Yang kedua, masalah penyebaran agama Katolik dan Kristen. Yang ketiga, adalah masalah penganak emasan kelompok Kristiani. Di satu sisi ini masih terkait dengan upaya pengukuhan kekuasaan dan monopoli perdagangan, tetapi di sisi lain terkait dengan misi penyebaran agama. Yang keempat adalah politik pecah belah, sesuatu yang mirip dengan politik penganak emasan, tetapi dengan cakupan yang lebih luas dan cara-cara yang lebih kompleks.

Masalah kekuasaan dan perdagangan sangat terkait dengan sistem penjajahan yang diterapkan oleh bangsa Belanda. Lewat usaha dagangnya VOC Belanda menebar kekuasaan ke seluruh kepulauan Nusantara, termasuk Maluku. Dalam mengukuhkan kekuasaannya ini Belanda menerapkan sistem monopoli dan tanam paksa yang di lindungi dengan kekuatan militer yang cukup besar. Orientasi pada kekuasaan ini telah menimbulkan perseteruan dengan para penguasa dan pedagang lokal. Sultan Nuku dari Tidore tidak berkeberatan untuk berdagang dengan siapapun, tetapi sangat menolak cara-cara Belanda yang ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku.

Seperti telah dibahas di muka, misi agama dijalankan oleh orang-orang Portugis yang sambil berdagang menyebarkan agama Katolik. Orang-orang Portugis ini cukup luwes dalam perdagangan, tetapi misi penyebaran agamanya menimbulkan cukup banyak reaksi. Tetapi ketika orang Belanda juga mulai memasukkan unsur penyebaran agama, dengan segala kaitan masalah kekuasaan dan perdagangan di dalamnya, maka keberadaan bangsa Portugis terasa lebih lunak. Dengan menganak emaskan penduduk yang mau memeluk agama Kristen dan melakukan politik pecah belah, ditambah dengan dukungan kekuatan militer yang sangat masif, Belanda berhasil menguasai kepulauan Nusantara termasuk Maluku yang semula memiliki lima kerajaan Islam yang cukup besar dan berpengaruh : Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, dan Iha. Dari perspektif

ini kita melihat bahwa Belanda menjadikan agama sebagai salah satu alat politik, dan karena itu menjadi bagian dari sumber konflik yang bersifat laten.

Sebagai alat politik, Belanda memberlakukan sistem anak emas pada kelompok Kristen dalam hal: pendidikan, birokrasi, militer, dan polisi. Dalam hal pendidikan, kesempatan hanya diberikan pada kelompok Kristen dan raja-raja Islam. Dengan sistem ini kesempatan kelompok Kristen untuk memperoleh pendidikan, dan seterusnya memasuki birokrasi, militer, dan polisi menjadi terbuka. Sementara pemberian kesempatan pada raja-raja Muslim bahkan menimbulkan kesenjangan dan semacam konflik terpendam antara yang berkuasa dengan rakyatnya. Inilah salah satu bentuk politik pecah belah yang dilakukan oleh Belanda, di samping upaya pecah belah antar kerajaan (baik yang besar-besar maupun kerajaan-kerajaan kecil di Maluku Tengah yang artinya desa), internal kerajaan, maupun bentuk-bentuk perpecahan lain yang di dorong dengan iming-iming harta dan kekuasaan.

III.2.2. Dari Kemerdekaan hingga Orde Baru

Dari masa awal kemerdekaan hingga masa awal Orde Baru (sebelum 1990) masih terasa sebagai masa keterpinggiran umat Islam. Hal ini sangat terkait dengan sisa-sisa peninggalan masa kolonial di samping keterbatasan kualitas sumberdaya manusia. Tertutupnya kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebagian besar umat Islam Maluku (kecuali kalangan keluarga raja) telah memantapkan keterpinggiran umat Islam ini. Pada saat umat Kristen bisa memasuki birokrasi (sipil, militer, dan polisi) umat Islam hanya bisa hidup sebagai petani dan nelayan. Ketika umat Kristen tinggal di wilayah perkotaan dengan bangunan yang dilengkapi listrik dan air bersih, umat Islam tinggal di pedesaan atau di pinggiran perkotaan yang relatif kumuh. Kesempatan memperoleh pendidikan yang mulai terbuka sejak zaman kemerdekaan, membutuhkan waktu untuk secara

nyata meningkatkan kualitas sumberdaya manusia umat Islam. Keterbatasan dalam kemampuan ekonomi dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan merupakan kendala utama peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini.

Di awal Orde Baru sesungguhnya keadaan belum juga banyak berubah. Kekuatan militer yang didominasi oleh kelompok Beni Murdani, kekuatan politik yang dikuasai oleh Golkar dan CSIS, serta kekuatan ekonomi yang dikuasai oleh Grup Prasetia Mulia dan Jimbaran bukanlah kekuatan yang memberi kenyamanan bagi umat Islam, tetapi di Maluku kekuatan ini dirasakan sebagai kekuatan Jawa yang Islam. Sistem dan kebijakan yang sentralistik, program transmigrasi yang cukup intensif, ditambah dengan program aneh semacam pendirian masjid-masjid YABMP (Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila) tentu lebih mengukuhkan kecurigaan tentang Jawanisasi dan Islamisasi ini.

Keadaan menjadi sangat mencolok ketika di tahun 1990-an pemerintah Soeharto mulai mendekati umat Islam. Upaya Islamisasi atau penghijauan (yang konon telah membuat birokrasi dan militer pada saat itu menjadi hijau royo-royo) membuat perubahan sangat mengagetkan di Jakarta. Belum lagi dengan munculnya kekuatan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia) yang dimotori oleh BJ Habibie, yang bergerak secara informal tetapi sangat didukung oleh birokrasi. Di Maluku (khususnya Maluku Tengah dan Selatan) yang selama ini menunjukkan dominasi yang kuat dari kelompok Kristen perkembangan ini tentu dirasa sangat meresahkan.

Pada masa Orde Baru ini, Maluku sempat menerima transmigran dari Jawa dalam dua gelombang. Pertama, terkait dengan penetapan Pulau Buru sebagai lokasi Tahanan G30-S/PKI golongan A dan B. Dan yang kedua, adalah program transmigrasi yang cukup gencar dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru sebelum krisis moneter. Kedatangan transmigran dari Jawa yang Islam ini tentu mengubah perimbangan komposisi penduduk Islam Kristen, tetapi

tampak tidak membuat guncangan dan ketegangan yang berarti. Mungkin ini disebabkan oleh sikap orang Jawa yang cukup akomodatif, atau karena mereka adalah sebagai petani yang ditempatkan di kawasan yang penduduknya mayoritas beragama Islam. Hal serupa juga terjadi ketika datang orang-orang Buton sebagai petani.

Keadaan baru terasa agak berubah, ketika datang transmigran Bugis dan Makassar dari Sulawesi Selatan. Mereka adalah pekerja-pekerja sektor informal yang masuk ke daerah-daerah perkotaan yang mayoritas penduduknya adalah Kristen. Ditambah dengan sikap budaya yang agak keras dan keberanian mengekspresikan identitas ke-Islamannya, keberadaan mereka sering menimbulkan benturan dan ketegangan dengan penduduk asli Ambon (dan sekitarnya) yang beragama Kristen. Secara lengkap, potensi konflik dari migran Bugis Makassar (kemudian ditambah dengan orang Buton yang juga berasal dari Sulawesi dan Islam), dapat dirinci dalam tiga hal : ketegangan budaya, kesenjangan ekonomi, dan perubahan perimbangan.

Ketegangan budaya disebabkan karena adat mereka yang cukup keras, khususnya yang berkaitan dengan budaya Siri. Ketegangan muncul karena orang Sulawesi (BBM) ini dianggap kurang menghargai budaya penduduk asli, khususnya dari kelompok Kristen. Potensi konflik berikutnya adalah dalam hal kesenjangan pendapatan. Bekerja di sektor informal dengan etos kerja yang tinggi, menyebabkan rata-rata migran dari Sulawesi ini memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik. Ini dapat menjadi sumber kecemburuan pada penduduk asli. Sementara perubahan perimbangan antara penduduk Islam dan Kristen menjadi sangat menyolok karena migran Sulawesi ini konon sangat rajin mendirikan masjid. Keberadaan 4-5 keluarga BBM di suatu desa telah memberi mereka cukup alasan untuk segera mendirikan masjid atau mushalla. Ini tentu bisa dianggap ancaman di daerah yang mayoritas Kristen.

III.2.3. Pasca Orde Baru: Kebangkitan Umat Islam, RMS dan Pemilu 1999

Umat Islam yang merasa tertidas di zaman penjajahan dan merasa terpinggirkan di masa kemerdekaan hingga akhir 1980-an, merasa mendapat momentum kebangkitan sejak awal 1990-an. Ada paling tidak tiga hal yang mewarnai kebangkitan ini. Pertama, kesadaran akan kuantitas, khususnya dengan pertumbuhan karena proses migrasi Umat Islam (Jawa dan BBM) ke Maluku. Kedua, peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang tumbuh seiring dengan kebebasan memperoleh pendidikan di zaman kemerdekaan ini. Meskipun lambat, kebebasan ini memberi kesempatan tumbuhnya umat Islam yang berpendidikan. Ketiga, munculnya keberanian berekspresi dan menipisnya rasa rendah diri. Hal ini makin terasa dengan dukungan kuantitas dari migran muslim dan dukungan kualitas dari kesempatan memperoleh pendidikan bagi umat Islam paska kemerdekaan.

Terkait dengan kebangkitan ini muncul fenomena ICMI yang mengusung warna intelektual yang meredam perbedaan ideologis umat Islam. Dengan ICMI, umat Islam (secara politis direpresentasikan oleh PPP) yang semula kurang nyaman dengan kiprah politik Golkar tiba-tiba merasa memperoleh kawan untuk bekerjasama. Tentu kita tidak dapat menutup mata terhadap eksistensi kekuatan ICMI ini dalam perebutan posisi birokratis di Maluku, yang kemudian menjadi sangat tajam sebagai persaingan antara Islam dan Kristen. Padahal sebelum fenomena ICMI, Golkar adalah kekuatan nasionalis yang relatif netral.

Fenomena lain yang terkait dengan kebangkitan Islam adalah munculnya kelompok Islam yang diidentifikasi sebagai Islam garis keras. Keinginan mendirikan negara Islam atau bahkan Khilafah (kekhalifahan) Islam yang berskala global sering dikaitkan dengan kelompok garis keras ini. Meskipun kelompok garis keras ini secara kuantitas tidak terlalu besar, tetapi dampaknya bisa menonjol di masa

konflik. Pertama, karena dari dampak aktivitas yang dilakukan. Dan kedua, dari kemampuannya mempengaruhi massa. Aktivitas menonjol yang sporadis sering menjadi panutan atau sekedar mode bagi massa di saat konflik dan krisis. Cobalah perhatikan bagaimana sambutan umat Islam terhadap figur Osama bin Laden yang dituduh mendalangi penyerangan terhadap menara kembar WTC.

Fenomena kebangkitan umat Islam ini tentu dipandang sangat meresahkan bagi kelompok Kristen. Pandangan superfisial dan kecenderungan memandang kelompok sebagai *stereotype* bisa melipatgandakan keresahan atau kekhawatiran ini.

Upaya umat Islam Maluku untuk bangkit dan bersaing dengan umat Kristen di satu sisi diperparah dengan munculnya gagasan untuk menghidupkan gerakan RMS kembali sebagai *counter* atas gerakan yang dilakukan oleh komunitas Islam.

Gagasan atau gerakan yang bertajuk Republik Maluku Selatan ini merupakan produk yang berkembang sejak awal kemerdekaan. Orang-orang Maluku yang dekat dengan kekuasaan Belanda merasa kurang nyaman berada di bawah Negara Republik Indonesia yang dikendalikan oleh orang Jawa dan Islam yang di Maluku sendiri mendapat posisi yang relatif rendah. Bagi pengusung panji RMS ini, merdeka di bawah lindungan Belanda tentu lebih nyaman dan memuaskan. Gagasan RMS yang didirikan oleh Dr Soumokil ini ternyata dapat dipatahkan secara militer oleh pasukan TNI yang dipimpin Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Dr Soumokil lari ke Belanda.

Dengan larynya Dr Soumokil ke Belanda, gagasan RMS secara formal dapat dianggap habis, dan masyarakat Maluku menerima keberadaan Negara Republik Indonesia. Keberadaan orang-orang Maluku (Ambon) yang memiliki kedudukan dan penghidupan yang baik di Jakarta, mengukuhkan posisi Maluku sebagai bagian dari Indonesia. Posisi ini didukung oleh tingkat pendidikan yang relatif tinggi bagi masyarakat Kristen Maluku yang memang diberi

kesempatan lebih oleh pemerintah penjajah Belanda di masa lalu. Sepanjang hubungan Ambon dan Jakarta tidak bermasalah, maka gagasan tentang RMS ini tidak akan muncul ke permukaan.

Tetapi bagi beberapa pihak, kerinduan akan RMS itu tidak dapat dihapuskan sama sekali. Mungkin sekedar nostalgia akan zaman normal di bawah Belanda, tetapi akan mengental pada saat mereka menghadapi berbagai kekecewaan yang mereka rasakan di bawah pemerintah RI. Kekecewaan itu bisa berupa kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah, beban ekonomi yang makin berat, atau represi pihak militer. Kebijakan pemerintah yang dirasakan mengganggu terutama terkait dengan sistem yang sangat sentralistik yang tidak mengakomodasi keberadaan lembaga-lembaga adat dan menimbulkan kesenjangan yang menyolok antara pusat dan Daerah. Pentrok penguasaan sumberdaya antara perusahaan-perusahaan besar (PMA, BUMN, dan perusahaan swasta besar) yang didukung pemerintah pusat dengan masyarakat adat Maluku. Beban ekonomi yang makin berat, terasa sejak komoditas unggulan mereka berupa cengkeh mengalami hantaman oleh tata niaga yang dimonopoli oleh BPPC, kemudian menjadi semakin berat sejak krisis moneter menimpa negeri kita. Sementara represi pihak militer banyak terkait dengan pemaksaan kebijakan pemerintah yang tidak sepenuhnya bisa dimengerti dan diterima oleh masyarakat.

Kerinduan itu juga bisa mengental dalam aspek agama. Simpatisan RMS adalah masyarakat Kristiani yang pada zaman penjajahan pernah memperoleh *privilege* dan fasilitas lebih dari masyarakat Muslim, sejak zaman kemerdekaan merasa bahwa kedua hal tadi mulai memudar. Ketika *privilege* untuk memperoleh pendidikan yang membuka kesempatan memasuki birokrasi dan militer terlepas, maka persaingan mulai terbuka. Tetapi pada saat pertumbuhan dan kemajuan komunitas Muslim ini hanya terjadi pada masyarakat Maluku sendiri, maka keseimbangan masih relatif terjaga. Keseimbangan mulai goncang, ketika masyarakat Muslim mulai

berinteraksi dengan pendatang dari Jawa dan Sulawesi (Bugis, Buton, Makassar). Pada saat itu mereka melihat kekuatan komunitas muslim yang mulai dirasakan mengancam dominasi mereka.

Menjelang Pemilu 1999 dirasakan sebagai momentum untuk merebut kembali kejayaan yang pernah mereka alami sebelum kebangkitan Islam di akhir era Orde Baru. Untuk itu Parkindo (Partai Kristen Indonesia) bersama PDIP merasa perlu untuk dapat merebut mayoritas kursi legislatif di Kotamadya Ambon dan Propinsi Maluku. Hal ini akan mudah dilakukan bila keberadaan warga muslim non Ambon (khususnya BBM) bisa di kurangi. Ini kemudian dijabarkan dengan semacam program intimidasi atau bahkan pengusiran warga BBM dari Maluku.

Pada awal kerusuhan Maluku, isu etnis inilah yang dilontarkan oleh pihak Kristen, lengkap dengan alasan budaya dan pemojakan warga BBM sebagai biang kerok kesenjangan ekonomi. Pihak Kristen berharap agar semua orang Maluku, khususnya di Ambon ikut memusuhi warga BBM. Tetapi pihak Islam melihat bahwa isu etnis ini hanyalah alasan untuk menghalalkan penyerangan pada kelompok BBM yang Islam, di samping nuansa politisnya untuk memenangkan Pemilu 1999. Alasan budaya dan kesenjangan ekonomi yang dikemukakan, sulit diterima oleh pihak Islam karena dirasa kurang adil. Kalau dua hal itu yang mengemuka, mestinya etnis Cina harus lebih dimusuhi daripada warga BBM.

III.3. Analisa Akselerator Konflik di Maluku Tengah

Berdasarkan studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan, ada beberapa faktor yang mempercepat eskalasi (akselerator) konflik di Maluku Tengah pada periode 199-2001. Faktor-faktor tersebut adalah: arus migrasi orang Muslim Non Ambon ke Maluku Tengah, kepadatan penduduk dan sengketa tanah,

perebutan jabatan di birokrasi, dan tumbuhnya kelompok-kelompok preman.

III.3.1. Arus Migrasi Orang Muslim Non Ambon ke Maluku Tengah

Derasnya arus masuk orang non-Ambon Muslim yang secara resmi didorong oleh pertumbuhan ekonomi Ambon yang tinggi terutama di pulau paling besar di Maluku Tengah yakni Seram. Migrasi tersebut tidak hanya condong menguntungkan orang Muslim dalam keseimbangan populasi tetapi juga menambah tekanan atas tanah bagi populasi pedesaan dan perkotaan yang sudah kritis.

Kedatangan kaum migran, terutama dari Buton, Bugis, dan Makassar pada akhirnya mampu mengubah komposisi penduduk di Maluku Tengah pada umumnya dan Ambon pada khususnya. Warga Buton, Bugis, dan Makassar hampir semuanya beragama Islam. Di tahun 1995, komposisi pemeluk agama Islam dan Kristen kurang lebih seimbang. Pemeluk agama Kristen sebesar 59%, pemeluk agama Islam 41,7%, Katolik 5,2%. Sisanya Hindu dan Budha, masing-masing sebesar 0,1%. Di banding sepuluh tahun yang lalu, jumlah penduduk Islam meningkat, sementara penduduk Kristen menurun.⁵³

Migrasi penduduk muslim non Ambon ini selain merubah komposisi penduduk, juga mengubah pelapisan sosial penduduk di wilayah ini. Kaum migran yang berasal dari Buton, Bugis, dan Makassar ini bermukim di pesisir pantai, dan kebanyakan melakukan usaha perdagangan. Perlahan-lahan, timbul pembagian kerja secara etnis dan Agama di Ambon. Kebanyakan kaum mendatang ini juga secara ekonomis mampu berkembang secara cepat, terutama pada sektor-sektor yang sifatnya informal. Ini berkaitan dengan kultur dari etnik lokal yang khususnya mereka yang berasal dari kalangan non

⁵³ Data pegawai Kodya Ambon berdasarkan agama tahun 1995.

muslim yang secara turun-temurun lebih menyukai bekerja di sektor formal seperti bekerja di kantor-kantor birokrasi pemerintahan, akademik, maupun staf administrasi di perusahaan-perusahaan swasta

Krisis ekonomi yang mulai melanda Indonesia pada tahun 1997, mengakibatkan terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal, bahkan tidak sedikit yang melakukan pemutusan hubungan kerja maupun langkah *zero growth* dalam penerimaan tenaga kerja yang baru dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi. Dalam kondisi semacam inilah sektor informal menjadi katup pengaman yang secara ekonomis cukup menjanjikan. Namun kesempatan untuk bekerja di sektor informal bagi etnik lokal, terutama non muslim sangatlah sempit karena sektor ini telah didominasi oleh saudara-saudara mereka yang beragama Islam maupun oleh mereka yang berasal dari luar Ambon.⁵⁴

III.3.2. Kepadatan Penduduk dan Sengketa Tanah

Kepadatan penduduk yang meningkat, karena pertumbuhan alamiah dan migrasi dari pulau-pulau lain ke Maluku Tengah semakin meningkatkan tekanan atas kebutuhan tanah di perkotaan maupun pedesaan. Ini diindikasikan dengan meningkatnya frekuensi konflik antar desa mengenai sengketa tanah baik dari komunitas Islam maupun dari komunitas Kristen. Komunitas Islam Desa Iha Mahu di Pulau Saparua misalnya, kembali menuntut hak tanah mereka seperti pada abad 17 sebelum penjajahan Belanda.

“Kita dulu punya tanah yang cukup luas di Desa Iha, namun karena kita tidak mau ikut Belanda dan ikut keyakinan mereka akhirnya tanah itu dirampas Belanda dan dibagi-bagikan kepada saudara-sadudara kita yang mau berpihak ke Belanda. Sebagian dari kita akhirnya mendiami

⁵⁴ Selanjutnya lihat uraian Bab II.

daerah-daerah pantai seperti di Sepa yang dari dulu merupakan wilayah komunitas Islam”, tutur salah seorang narasumber dari Desa Iha.⁵⁵

Tuntutan yang sama muncul di kalangan komunitas Kristen. Desa Kariu yang merupakan daerah subur yang kini dikuasai oleh komunitas Islam, merupakan area sengketa yang paling alot dalam perundingan antar komunitas pasca konflik. Komunitas Kristen menginginkan daerah itu kembali pada masyarakat Kariu, namun sebagian komunitas Islam menolaknya dengan argumen bahwa wilayah yang ditempati oleh Kariu saat ini merupakan wilayah Muslim pada masa lalu.

“Orang-orang Kariu itu dulu hanya menyewa hutan-hutan kami untuk digarap mereka. Istilah di sini daerah yang dikelola oleh orang-orang Kariu sesungguhnya hanya petuanan saja. Jadi bukan milik mereka”, papar seorang narasumber dari komunitas Islam.

III.3.3. Perebutan Jabatan di Birokrasi

Pertambahan jumlah muslim non Ambon yang pesat, selain mengakibatkan perubahan komposisi penduduk juga mengakibatkan perubahan pelapisan sosial di sektor ekonomi dan sektor birokrasi. Hal ini nampak dari komposisi pegawai pemerintah yang beragama Islam sejak tahun 1990-an yang terus meningkat. Pada tahun 1999, sekitar 74% pegawai eselon I golongan IVA sampai IV E di tingkat propinsi beragama Islam. Di eselon II, 69 % baik tingkat propinsi maupun kabupaten juga beragama Islam. Sedangkan eselon II, jumlah pegawai yang beragam Islam mencapai angka 53%. Kondisi ini kian mengurangi pengaruh orang Ambon Kristen yang secara

⁵⁵ Wawancara dengan Sekretaris Desa yang merangkap sebagai koordinator pengungsi Iha Mahu.

tradisional kuat dalam struktur politik propinsi dan kabupaten. Bahkan memperburuk situasi perebutan kekuasaan pada tingkat propinsi.⁵⁶

Selama masa pemerintahan Sukarno, elit politik Kristen dapat terpuaskan dengan pengangkatan dua orang gubernur dan seorang komandan militer. Dalam era Soeharto, hilangnya kekuasaan mereka disimbolisasikan dalam kenyataan bahwa tidak ada orang Ambon Kristen yang pernah diangkat untuk kedua posisi penting ini. Sementara itu, orang Ambon Muslim telah memiliki tiga orang gubernur. Perluasan kekuatan politik dari kalangan Muslim Modernis semakin leluasa geraknya pada masa pemerintahan Habibie. Gerakan “penghijauan” yang dilakukan oleh Habibie dengan ICMI-nya, menjadikan kartu-kartu keanggotaan HMI maupun ICMI menjadi kartu-kartu yang digdaya untuk memasuki lingkaran institusi apapun di wilayah ini. Untuk mencapai tujuan politik tersebut tidak jarang kelompok maupun individu memanipulasi dan mengeksploitasi agama untuk membentuk aliansi-aliansi politik dan memperluas jaringannya. Sehingga tidak mengherankan apabila kelompok muslim modernis dapat dengan mudah berbaur dengan kelompok tradisionalis dan bahkan dengan kelompok muslim militan seperti Laskar Jihad.

III.4. Tumbuhnya Kelompok-kelompok Preman

Krisis ekonomi yang parah yang melanda Indonesia sejak 1997/1998 memunculkan banyak kelompok preman di Kota Ambon. Rendahnya tingkat pendidikan dan langkanya lapangan pekerjaan menjadikan budaya “kongkow-kongkow” yang dulunya hanya sebagai simbol pergaulan dan arena tempat minum para pemuda di “legalisasi” menjadi teritori kelompok untuk menguasai dunia hitam

⁵⁶ Disarikan dari Lambang Triyono, *Keluar dari Kemelut Maluku*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001), hal. 14-27; Gerry van Klinken, *The Maluku Wars: Bringing Society Back In* (The Indonesia No.17, April 2001).

di wilayah yang mereka duduki guna mencari keuntungan ekonomi dengan cara melakukan pemerasan, maupun pemungutan upeti yang beralih keamanan. Beberapa geng yang tumbuh pesat di kota, antara lain Van Boomen, Papi Coret, Sex Pistol, dan Geng Arizonal. Geng-geng tersebut pada akhirnya dapat dilebur menjadi satu dengan nama baru Coker (Cowok Keren). Anggota dari geng ini didominasi dari pemuda-pemuda Kristen.

Dalam konflik sepanjang tahun 1999-2000, keterlibatan anggota geng ini sebagai provokator maupun operator lapangan sangatlah besar. Berdasarkan pengakuan beberapa tersangka yang berhasil ditangkap dalam kerusuhan dua komunitas agama di Ambon mengakui "order" melakukan provokasi, penyusupan serta penyerangan selama konflik di Ambon didapat dari Berty Loupatty dan Agus Wattimena. Bahkan diakui oleh mereka bahwa Berty dan Agus mempunyai relasi yang kuat dengan Koppassus, dan ada dugaan keduanya juga merupakan orang Koppasus yang ditanam untuk melakukan kerusuhan di Ambon. Selain dua nama di atas, konflik di Ambon juga melibatkan dua tokoh preman Ambon di Jakarta yang cukup disegani yakni Milton (Kristen) dan Ongen Sangaji (Islam). Kedua tokoh ini dikenal mempunyai koneksi kuat dengan keluarga Cendana. Mereka dicurigai mengerahkan anak buahnya ke Ambon dan membuat kerusuhan. Dugaan yang banyak berkembang menyebutkan, kerusuhan di Ambon dan Maluku Tengah adalah bagian dari desain besar untuk menggagalkan pemilu 1999. Ambon hanya satu dari sekian proyek kerusuhan yang bernuansa suku, agama, dan ras, selain Banyuwangi, Sambas dan Kupang.

Dugaan ini banyak mendapat dukungan dari komunitas Kristen. Sedangkan komunitas Islam menganggap gerakan Republik Maluku Selatan (RMS)-lah yang berada dibelakang semua kerusuhan di Maluku. Isu ini mula-mula dihembuskan oleh Yusuf Rahmi, Ketua Masyarakat Muslim Ambon di Jakarta, yang bersama-sama Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Ahmad

Soewargono menggelar jumpa pers di Jakarta tanggal 28 Januari 1999. Isu sparatis RMS ini dibantah pihak Kristen, yang mengatakan RMS hanya hantu jadi-jadian yang sengaja dimunculkan untuk membenturkan kalangan Kristen dengan militer.

Beberapa faktor tersebut bertumpuk menjadi satu. Pemilahan sosial berdasarkan etnis dan agama menyimpan potensi konflik tersendiri. Pembagian kerja di sektor perdagangan dan perebutan jabatan politik di birokrasi sipil, militer, maupun organisasi politik lainnya berbaur menjadi isu soal etnis dan agama. Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat lokal tetapi juga di tingkat nasional. Hal ini semakin diperparah dengan krisis ekonomi yang melanda negeri ini sejak tahun 1997/1998, yang ditandai dengan makin sedikitnya lowongan pekerjaan dan tajamnya persaingan di sektor birokrasi. Isu soal Islamisasi, isu keserakahan pendatang Buton, Bugis, dan Makassar, sudah terdengar sebelum konflik meledak. Semua kondisi itu menemukan pematiknya saat Soeharto jatuh -- di mana isu agama yang sebelumnya rapat ditutup, tiba-tiba meletup dasyat.

III.4. Analisa Pemicu Konflik

Pada kebanyakan warga Muslim terdapat keseragaman pendapat yang menyatakan bahwa peristiwa tanggal 19 Januari 1999, yang lebih dikenal sebagai peristiwa Idul Fitri Berdarah merupakan faktor pemicu utama kerusuhan Ambon yang terjadi selama lebih kurang 3½ tahun.⁵⁷ Sedangkan di kalangan Kristen ada yang beranggapan bahwa peristiwa tersebut bukanlah pemicu konflik yang utama karena beberapa upaya perdamaian yang dilakukan pada saat itu cukup membuahkan hasil, yaitu dengan tercapainya kondisi damai selama beberapa bulan (Maret – Mei 1999). Menurut

⁵⁷ Wawancara Ustadz Ali Fauzy

mereka, konflik secara intens baru mulai merebak setelah PEMILU di pertengahan tahun 1999.⁵⁸

Dalam penelitian ini, faktor pemicu yang akan dianalisa adalah peristiwa tanggal 19 Januari 1999, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai peristiwa Idul Fitri Berdarah tersebut. Terdapat dua buah versi cerita yang berbeda mengenai kronologis kejadian tersebut (versi Muslim dan Kristen). Versi Kristen dan juga versi yang banyak disitir oleh laporan LSM maupun NGO asing menyatakan bahwa penyebab kerusuhan dimulai ketika seorang supir angkot asal Aboru (Yopi) diperas oleh preman Bugis yang bernama Usman. Kejadian dimulai pada pukul 14:30 ketika Yopi yang sedang mangkal di terminal Batu Merah dimintai uang oleh dua orang preman Bugis, Usman dan Salim. Karena tidak punya uang maka Yopi tidak memberikan dan kedua preman tersebut mengancam Yopi dengan badiknya. Yopi yang merasa terancam lari pulang ke rumahnya di Mardika dan mengancam balik dengan parang. Usman kemudian lari ke Desa Batu Merah dikejar oleh Yopi yang berusaha menangkapnya, namun tidak berhasil. Ketika lari ke perkampungan Batu Merah, Usman sempat berteriak bahwa ia mau dibunuh oleh orang Kristen.⁵⁹

Versi Muslim dan Polisi memaparkan bahwa Yopi adalah supir angkot milik orang Bugis yang tinggal di Batu Merah Bawah. Ketika diminta kondektur (orang suruhan pemilik mobil) untuk membayar uang sewa, Yopi menolak dan dibantu oleh beberapa penumpangnya malah menganiaya kondektur yang kemudian lari ke Batu Merah Bawah. Kondektur segera mengumpulkan teman-temannya dan timbulah kerusuhan antar kedua kelompok.

Dari wawancara dengan beberapa narasumber diperoleh informasi bahwa perkelahian antar warga Mardika dan Batu Merah

⁵⁸ Wawancara Pendeta Noce Patinaya

⁵⁹ Hal, 78 Netralitas yang Semu PSPK – Usman ternyata tidak dikenal oleh lingkungan warga setempat dan bukan penduduk desa yang bersangkutan

adalah suatu hal yang sangat biasa. Peristiwa malak-memalak di terminal bukan suatu hal yang aneh. Yang menjadi pertanyaan bagi sebagian besar warga Ambon dan juga masyarakat luas adalah mengapa sebuah peristiwa kriminal biasa bisa menjadi faktor pemicu sebuah kerusuhan besar yang merembet ke seluruh pelosok pulau dalam waktu yang sangat singkat?⁶⁰

Versi lain menggambarkan bahwa awal kerusuhan justru terjadi antar warga Batu Merah Dalam dan warga Batu Merah. Pada sore hari (19 Januari 1999) tersebut kebanyakan pemuda *Mardika* justru sedang berdiri menonton perkelahian yang terjadi di antara pemuda satu kampung tersebut. Terjadi kejar mengejar hingga dekat *Desa Mardika*, namun secara tiba-tiba ada sekelompok massa yang langsung merangsek dan menyerang para pemuda *Mardika* yang sedang menonton di pinggir jalan. Merasa terjepit maka para pemuda *Mardika* tersebut membela diri dengan peralatan seadanya.⁶¹

Hal yang menarik lainnya adalah hasil wawancara dengan *Pendeta Noce Patinaya* maupun *Bapak Ustadz Ali Fauzy* (13 & 15 Agustus 2003). Dari wawancara tersebut diperoleh keterangan mengenai hal-hal yang diluar kebiasaan dalam kerusuhan tanggal 19 Januari 1999. Perkelahian antar warga, khususnya pemuda *Batu Merah* dan *Mardika*, adalah sebuah hal yang sangat lumrah. Seluruh warga *Ambon* sudah mengetahui bahwa di daerah tersebut sering terjadi konflik dan biasanya langsung rujuk. Perkelahian biasanya dimulai oleh para pemuda dan penyebabnya bisa bermacam-macam, antara lain karena pengaruh minuman keras dan berebut rejeki. Peristiwa biasa ini menjadi sangat luar biasa ketika merembet ke pengrusakan maupun penjarahan bangunan rumah tinggal, toko, sekolah maupun rumah ibadah di samping pengrusakan kendaraan seperti pembakaran becak, motor dan mobil. Kondisi kerusuhan ini diperburuk lagi dengan adanya aksi pembunuhan secara sadis seperti

⁶⁰ Wawancara Bapak *Pendeta Noce Patinaya*, *Ustadz Ali Fauzy*

⁶¹ Wawancara Bapak *Raymond*, tokoh pemuda *Mardika*

menyembelih, memotong dan membakar tubuh lawan kelompoknya.⁶²

Isu utama yang dihembuskan pada waktu itu adalah bahwa Masjid Al-Fatah dan Gereja Silo yang merupakan kebanggaan warga Maluku sudah dibakar. Isu tersebut membangkitkan fanatisme keagamaan. Dalam waktu singkat warga kedua komunitas berkumpul dan menggunakan tanda-tanda pembeda, yaitu kain warna putih bagi warga Muslim dan kain warna merah bagi warga Kristen. Persenjataan yang digunakan relatif sederhana seperti parang, tombak, batu, ketapel, bambu runcing, balok kayu, potongan besi dan lain-lain. Isu selanjutnya adalah bahwa massa masing-masing kelompok sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan ke Gereja Silo maupun Masjid Al-Fatah. Hal ini meningkatkan ketegangan antara kedua kelompok.

Kesimpang siuran berita yang terjadi memperkeruh kondisi saat itu. Kemudian banyaknya korban yang jatuh, serta kondisi korban yang mengenaskan, semakin mengentalkan solidaritas kelompok. Dengan demikian jiwa militan semakin mudah dibangkitkan khususnya di kalangan pemuda. Begitu juga dengan warga desa lain, ada rasa senasib dan sepenanggungan ketika saudaranya di daerah tertentu terkena bencana, sebagaimana telah ditunjukkan oleh sikap warga jazirah Leihitu terhadap isu pembakaran Masjid Al-Fatah.

Ditinjau dari paradigma psikologi-sosial, dapat dikatakan bahwa jenis pertikaian yang berlangsung di Ambon adalah pertikaian antar kelompok (*mass violence*), dan bukan pertikaian perorangan (*individual violence*). Dalam psikologi dikenal teori Myers (1966) yang menyatakan ada dua jenis agresi individual yaitu *hostile aggression* (yang disertai emosi, amarah dan balas dendam) dan *instrumental aggression* (tanpa emosi, agresi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan lain seperti perampokan, teroris atau pembunuh bayaran).

⁶² Hal, 79 Netralitas yang Semu

Agresi massa hanya mengenal *hostile aggression*. Penyebabnya adalah bahwa kelompok atau massa pada umumnya memang bersifat irasional, emosional, agresif dan destruktif (Le Bon, 1895). Pada tahap selanjutnya, agresi massa bisa sangat melebihi perikemanusiaan karena adanya prasangka yang berkembang terus (Baron & Byrne, 1994), yang kemudian diikuti proses dehumanisasi (penghilangan sifat-sifat kemanusiaan pada pihak lawan (Struch & Schawrtz, 1989).⁶³

Apabila ditelaah lebih jauh bahwa pertikaian antar preman yang terjadi selama ini di Ambon bisa dikategorisasikan sebagai *individual violence*. Karena ada perbedaan kepentingan, maka terjadi pertikaian perorangan (dalam kasus Usman dan Yopi). Hal yang membedakan dalam kasus Idul Fitri Berdarah ini adalah bahwa pertikaian perorangan sudah berkembang menjadi pertikaian kelompok.

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya bahwa dengan adanya isu pembakaran Masjid Al-Fatah di Ambon yang sampai ke jazirah Leihitu, menimbulkan dendam dan ingin membalas. Agresi emosional warga Leihitu memobilisasi mereka untuk bergerak masuk Ambon dan dalam perjalanannya melakukan penghancuran terhadap beberapa desa Kristen di perjalanan pergi maupun pulang kembali. Walaupun dalam kenyataannya isu tersebut ternyata tidak benar, hal ini tidak menurunkan semangat warga yang ingin membalas dendam, karena memang pada dasarnya tindakan pengrusakan serta pembunuhan tersebut memiliki alasan yang sangat irasional.

Prasangka yang berkembang mengenai kebiadaban kelompok lawan ketika menghancurkan rumah ibadat, ataupun maraknya isu tentang pembunuhan warga menumbuhkan proses dehumanisasi. Masing-masing kelompok mulai menganggap kelompok lain sebagai simbol-simbol yang harus dihancurkan

⁶³ Psikologi Malino oleh Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, 22 Mei 2002

(misalnya: kelompok Merah, kelompok Putih dan dalam perkembangan selanjutnya Obet dan Acang). Masing-masing kelompok memiliki semangat untuk menimbulkan kehancuran sebesar-besarnya bagi kelompok lain. Bukanlah suatu hal yang mengherankan bahwa penghancuran yang terjadi bagi tubuh maupun harta milik kelompok lain dilakukan semaksimal mungkin, misalnya: pembunuhan dengan mutilasi ataupun pembakaran, aksi tebas potong dua tanaman-tanaman kelompok lawan sehingga kelompok lawan tidak memiliki akses terhadap hasil sumber daya pertaniannya.

BAB IV

ANALISIS FIGUR-FIGUR YANG BERKONFLIK

IV.1. Peta Kekuatan Kelompok Yang Berkonflik

IV.1.1. Kelompok Kristen

Pada awal kerusuhan (1999-2000) perlawanan komunitas Kristen belum secara sistematis terstruktur dalam menghadapi komunitas Islam. Gerakan perlawanan yang mereka lakukan hanya berbasis di kampung di mana mereka tinggal. Gereja dalam masa ini mempunyai posisi yang sangat sentral untuk “merestui” kapan penyerangan boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Gereja juga merupakan media *crisis center* selama konflik berlangsung. Peran gereja saat itu tidak saja mencatat nama dan jumlah korban dari pihak komunitas dalam konflik tetapi juga mengumpulkan berbagai bantuan untuk korban maupun untuk mempertahankan desanya. Bantuan yang dikumpulkan oleh gereja bisa berasal dari dalam dan luar lingkungan gereja. Pendeta dari kampung yang berkonflik biasanya juga melakukan kontak dengan klasis⁶⁴ maupun sinode⁶⁵ yang terkait, dalam mengambil tindakan yang tepat, agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan kebijakan gereja dalam arti luas, termasuk dalam hal ini saat ia harus mengambil keputusan kala umatnya mendesak untuk melakukan penyerangan.

Namun pada periode 2000-2001, ketika komunitas Islam mulai mendapat dukungan dari Laskar Jihad yang dikirim dari Jawa, gerakan perlawanan komunitas Kristen tidak lagi terbatas di kampung yang bersengketa saja melainkan sudah lintas teritori. Pemuda-pemuda dari komunitas Kristen setiap saat dapat keluar dari

⁶⁴ Kesatuan unit gereja di tingkat kabupaten.

⁶⁵ Kumpulan unit gereja di tingkat propinsi.

kampungnya untuk berperang membantu umat Kristen di wilayah lain yang terancam bahaya. Pada masa ini bahkan dikenal luas apa yang disebut sebagai pasukan Agas - yang dalam bahasa setempat berarti nyamuk. Julukan Agas ini diberikan karena kelincihannya dan mobilitasnya yang tinggi dalam melakukan perlawanan terhadap komunitas Islam. Mereka merupakan segerombolan anak-anak usia antara 10-14 tahun, yang kebanyakan laki-laki. Tindakan yang mereka lakukan biasanya berupa penyusupan ke daerah lawan untuk mendapatkan informasi maupun untuk melakukan pembakaran-pembakaran di pemukiman. Gerakan kelompok ini sangat efektif untuk memenangkan sebagian perang mereka karena biasanya anak-anak usia tanggung ini jarang dicurigai, di samping mereka sendiri tidak mempunyai perasaan takut mati. Bagi mereka yang ada hanya perasaan bangga karena telah menjadi pahlawan bagi komunitasnya. Meskipun tidak sedikit dari mereka yang juga menjadi korban karena peluru nyrasar.

Terbakarnya Gereja Silo dan penyerangan besar-besaran yang dilakukan oleh komunitas Islam dengan Laskar Jihad di beberapa kampung Kristen mendorong Kelompok Kristen untuk membentuk apa yang disebut sebagai Laskar Merah. Laskar Merah dibentuk dan dipimpin oleh Agus Wattimena sampai ia meninggal pada tanggal 22 Maret 2001. Sepeninggal Agus Wattimena kepemimpinan Laskar Merah beralih ke Emang Nikijuluw, Pemmy Souissa, dan Melkianus Yusuf Tuhumury, Mereka mengorganisasikan 100-200 orang Kristen Ambon yang terbagi dalam 25 kelompok kecil untuk berperang melawan komunitas Islam. Diperkirakan hampir 60 persen anggotanya berumur antara 12-25 tahun, dan beberapa di antaranya adalah perempuan.

Tidak seperti Laskar Jihad, kelompok ini tidak mendapatkan latihan khusus untuk berperang. Mereka biasanya menggunakan senjata tradisional seperti pisau, tombak, bom ikan, senjata rakitan dan beberapa senjata organik yang didapat dari aparat polisi yang

beragama Kristen, serta senjata selundupan yang dibeli dari Kupang. Laskar Merah dipandang oleh sebagian orang sebagai cikal bakal berdirinya FKM (Forum Kedaulatan Maluku).

FKM didirikan pada tanggal 15 Juli tahun 2000, oleh Alex Manuputty di Daerah Kudamati, Ambon. Pada awalnya FKM hanya merupakan gerakan moral yang muncul ketika gelombang konflik semakin banyak, sementara peran negara dalam mengungkap akar konflik dan menyelesaikan konflik di Maluku tidak jelas. Namun gerakan ini tidak mendapatkan cukup simpati baik dari kalangan Muslim maupun Kristen. Ketiadaan dukungan dan lambannya respon Jakarta dalam menangani konflik di Maluku mengakibatkan Alex Manuputy menggunakan bendera politik lama RMS (Republik Maluku Selatan) sebagai payung gerakannya.

Penggunaan bendera RMS sendiri menurut beberapa narasumber, bertujuan untuk menarik simpati masyarakat internasional dan PBB dalam penyelesaian konflik di Maluku. Hal ini dilakukan karena mereka sudah tidak percaya lagi terhadap Negara. Bahkan pengiriman militer sebanyak kurang lebih 24 batalyon sebagai jawaban Jakarta atas konflik di Maluku hanya membuat mereka semakin apatis dengan pemerintah pusat. Namun demikian "reinkarnasi" RMS oleh beberapa orang yang pernah bergabung dalam kelompok tersebut tidak sedikitpun ada upaya menjadikan gerakan itu sebagai gerakan separatis.⁶⁶

Jika pada periode sebelumnya komunitas Kristen masih mengandalkan telepon dan berita dari mulut ke mulut, maka pada periode 2000-2001, kelompok Kristen lebih banyak memanfaatkan media *mainstream* baik cetak maupun elektronik seperti jaringan RRI (Radio Republik Indonesia), Harian Suara Maluku dan Siwalima dalam menyebarkan informasi untuk komunitasnya. Informasi-informasi tersebut biasanya berisi tentang daerah-daerah Kristen yang

⁶⁶ Wawancara dengan tokoh agama Kristen, Agustus 2003.

sedang atau telah diserang oleh Komunitas Islam, korban yang sudah jatuh dari pihak mereka, seruan bantuan logistik sampai informasi-informasi yang bernada provokasi.

Pemihakan RRI dan Suara Maluku terhadap komunitas Islam pada awalnya bukan lantaran alasan ideologis tapi lebih karena letak kantor kedua media tersebut di daerah Kristen, demikian juga karena kebanyakan wartawan yang bekerja di media tersebut beragama Kristen. Karena alasan ketidakmampuan wartawan kedua media ini meliput daerah-daerah konflik di Komunitas Islam, maka lambat laun kedua media ini hanya mampu menyiarkan berita-berita yang berasal dari komunitas Kristen. Sebelum konflik terjadi kedua media ini tergolong media yang netral. Ini terlihat dari ketiadaan keluhan dari masyarakat baik dari Islam maupun Kristen tentang berita-berita yang dimuat di media tersebut.

Berbeda dengan Suara Maluku. Harian Siwalima justru muncul dengan latar belakang pembelaan ideologis sekaligus upaya *counter* terhadap berita-berita Ambon Express yang dimiliki komunitas Islam. Jika berita-berita Suara Maluku terkesan malu-malu dalam melakukan pembelaan terhadap komunitas Kristen tidak demikian dengan Siwa Lima. Berita-berita yang diterbitkan Siwalima lebih tegas dan jelas dalam membela kelompok Kristen. Ia tidak segan-segan menyebut Laskar ihad sebagai perusuh Islam atau teroris Islam. Pilihan narasumber pun berbeda dengan Suara Maluku, jika Suara Maluku lebih memilih narasumber resmi dari pihak gereja maka Siwalima lebih banyak memberikan tempat bagi kelompok-kelompok radikal di komunitas ini, termasuk preman. Tidak mengherankan apabila nada berita Siwalima berbau kemarahan terhadap kelompok Islam.⁶⁷

⁶⁷ Disarikan dari Eriyanto, *Media dan Konflik Ambon*, (Jakarta, 68 H), 2003.

Internet juga merupakan media yang efektif bagi kelompok Kristen untuk menyebarkan informasi tentang konflik Maluku versi mereka. Selain berbahasa Indonesia, situs-situs internet yang dibangun oleh kelompok ini juga ada yang berbahasa Inggris dan Belanda. Situs ini dibuat untuk menarik simpati warga Kristen dan gereja di luar negeri. Situs yang dimiliki oleh kelompok ini ada yang bersifat informatif, hanya menampilkan klipng peristiwa dan pernyataan dari organisasi dan gereja, tetapi juga ada yang bersifat provokatif. Situs informatif misalnya Voice from Maluku (<http://www.geocities.com/choye>). Situs ini mengkompilasi berita mengenai konflik Maluku. Hampir mirip dengan situs ini adalah Maluku 2000 (<http://www.maluku2000.org>). Situs ini berisi berita dan pernyataan tentang konflik Maluku. Di samping bahasa Indonesia, situs ini juga diterjemahkan dalam bahasa Belanda.

Diantara situs yang provokatif ialah situs Ambon berdarah Online (<http://www.geocities.com/alifuru67>). Dalam situs ini terdapat berbagai klipng artikel, foto gereja yang terbakar, foto mayat dan korban dari warga Kristen, desa-desa Kristen yang rata dengan tanah, dan keadaan pengungsi Kristen. Ada juga berita dan pernyataan mengenai konflik Ambon yang dinilai sebagai konspirasi jahat untuk melenyapkan umat Kristen. Jika di pihak Islam ada situs Laskar Jihad, maka simpatisan Kristen membuat plesetan, Jahad in Ambon (<http://www.geocities.com/soija2002/jahad>). Kalau dalam situs asli banyak diuraikan mengenai keberhasilan Laskar Jihad, maka dalam situs ini digambarkan berbagai kekejian dan kekejaman Laskar Jihad. Informasi dalam situs ini juga antitesa terhadap berbagai pernyataan Laskar Jihad. Sebagai contoh, kalau dalam situs Laskar Jihad dikatakan warga Kristen sebagai pendukung dan penyokong RMS, maka di situs ini dikatakan, pendukung RMS sesungguhnya umat Islam.

IV.1.2. Kelompok Islam

Hampir sama dengan kelompok Kristen, pada masa-masa awal kerusuhan gerakan perlawanan dari kelompok Islam-pun tidak secara sistematis terstruktur. Wilayah gerakan mereka juga hanya terbatas di kampung yang bersangkutan dengan tujuan untuk membela diri. Gerakan perlawanan komunitas Islam kebanyakan dipicu oleh adanya isu maupun fakta pembakaran masjid. Bahkan isu pembakaran masjid Al-Fatah di Ambon menjadi pemicu paling besar terjadinya perang antara dua komunitas agama di wilayah Maluku Tengah. Peristiwa tersebut bahkan telah mendorong warga di sepanjang jazirah Leihitu untuk turun dan melakukan penyerangan ke desa-desa sepanjang jazirah tersebut hingga Desa Durian Patah. Meski pada akhirnya isu tersebut tidak terbukti, kemarahan komunitas Islam tersebut telah memporak-porandakan dua desa tanpa tersisa.

Jika dalam komunitas Kristen peran gereja sangat sentral, di Komunitas Islam justru Bapa Raja (Kepala Desa)-lah yang punya otoritas tertinggi dalam memberikan ijin apakah komunitas di wilayahnya boleh melakukan penyerangan atau tidak. Bahkan sebelum sekelompok pemuda dari desa tersebut melakukan pertahanan atau penyerangan mereka akan terlebih dulu dibawa ke rumah adat sekaligus untuk mendapatkan restu sang Raja. Setelah restu diberikan, baru Imam Masjid membacakan doa untuk keselamatan mereka.

Pada periode ini, dikenal apa yang disebut sebagai Laskar Linggis. Hampir sama dengan kelompok Agas yang ada di komunitas Kristen. Kelompok ini juga terdiri dari kumpulan pemuda tanggung yang berusia 12-17 tahun. Kegiatan yang mereka lakukan pada masa ini adalah melakukan penyusupan di daerah lawan serta pengrusakan hingga pembakaran pada saat terjadi konflik. Mereka tidak terorganisir, dan bergerak secara spontan. Meski mereka tidak berada di garis depan, namun informasi yang dimiliki oleh kelompok ini sangat bermanfaat bagi komunitas Islam untuk membaca daerah

lawan jika hendak melakukan serangan balasan maupun sekedar upaya pertahanan.

Menjelang pertengahan 2000, ketika pertempuran antara dua komunitas tersebut semakin membara, komunitas Islam terdorong untuk mengorganisir gerakan perlawanan mereka. Organisasi ini biasanya merupakan kumpulan sejumlah pemuda setempat yang beranggotakan 20 hingga 30 orang, dan dipimpin oleh mereka yang diyakini masih memiliki darah “panglima”, pada masa kerajaan Islam dahulu -- ini bisa dilihat dari *fam* (nama keluarga) yang dimilikinya. Selama kerusuhan tahun 1999 hingga akhir 2000 muncul beberapa kelompok pemuda dari komunitas Islam yang cukup disegani. Kelompok tersebut antara lain Kelompok Banda Eli dari Maluku Tenggara, Kelompok Leihitu yang menggorganisir pemuda dari wilayah sepanjang Jazirah Leihitu, Kelompok Batuhaha, dan Kelompok Seram Timur. Gerakan perlawanan pemuda ini sangat *mobile* dan tidak lagi terbatas pada teritori di mana mereka tinggal. Setiap saat mereka bisa berpindah tempat (bahkan antar pulau) untuk membantu mereka yang seagama melawan musuh.

“Pada waktu itu masing-masing kelompok Islam berdasarkan daerahnya sudah membentuk kelompoknya sendiri-sendiri. Ada kelompok Leihitu, Hatuhaha, Seram Timur, Banda Eli dari Maluku Tenggara...mereka sudah membentuk barisan sendiri, sehingga begitu terjadi pertentangan atau katakanlah terjadi kasus di suatu tempat mereka lantas *unblok* pergi ke tempat yang terjadi kerusuhan itu, untuk mempertahankan daerah itu...untuk membela Islam”, tutur seorang pemimpin agama.⁶⁸

Selain itu, beberapa tokoh masyarakat dari komunitas Islam juga melakukan berbagai lobby ke Jakarta untuk menggalang solidaritas sesama muslim. Salah satunya adalah Ustad Abdul Aziz

⁶⁸ Wawancara dengan Ustad Alif Fauzy, Imam Masjid Al-Fatah-Ambon, Agustus 2003.

Arbi -- yang menjabat sebagai Imam Besar di Masjid Al-Fatah. Dia berangkat ke Jakarta pada tanggal 18 Pebruari 1999, Abdul Aziz pergi ke Jakarta. Di Jakarta, Azis tidak hanya bertemu dengan tokoh-tokoh Muslim, tetapi juga memberikan kesaksian, mengadakan konferensi pers, tabligh akbar serta mengumpulkan sumbangan. Bahkan dalam satu acara saja, bisa terkumpul dana 40 juta secara spontan dan banyak sukarelawan yang mendaftarkan diri berjihad ke Ambon.

Kegiatan tabligh akbar untuk mobilisasi kelompok Islam dalam rangka membantu sesama Muslim di Maluku menjadi kegiatan yang cukup rutin di Jakarta. Bahkan beberapa diantaranya dihadiri oleh Amien Rais, Hamzah Haz, Fuad Bawazir, serta 22 organisasi Muslim militan termasuk KISDI, PPMI, FPI dan Assosiasi Muslim Maluku yang dipimpin oleh Ongen Sangaji.⁶⁹

Namun sejak awal tahun 2000 ketika komunitas Islam di Ambon dianggap tidak mampu lagi melakukan perlawanan yang seimbang terhadap komunitas Kristen, maka Laskar Jihad mulai mobilisasi secara besar-besaran dari komunitas Islam untuk melakukan penyerangan balik ke komunitas Kristen. Laskar Jihad sendiri mengirimkan sekitar 10.000 pemuda Muslim ke Maluku, yaitu 8.000 orang untuk menangani Maluku Bagian Utara dan 2.000 orang untuk menangani Maluku Bagian Selatan.

Kebanyakan para pemimpin massa yang direkrut untuk mengobarkan perang Jihad di Maluku berasal dari arus kaum militan Muslim baru, yang mengikuti ajaran-ajaran dari gerakan Wahabi. Di Indonesia gerakan ini berkembang pesat terutama sebagai gerakan tarbiyah yang membentuk jamaah-jamaah *salaf* di kalangan mahasiswa. Di beberapa universitas negeri bergengsi seperti ITB. Tujuannya adalah untuk mendirikan negara Islam.

⁶⁹ Tentang tokoh ini lihat lebih jauh dalam faktor akselelator dan analisis tentang figur konflik.

Dukungan politis yang diperoleh Laskar Jihad untuk berperang di Maluku tidak saja didapatkan secara personal namun juga secara institusional. Gerakan militan Muslim ini juga menikmati dukungan diam-diam dari berbagai faksi di Polri dan Angkatan Laut. Meskipun Gus Dur waktu itu telah memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mencegah pasukan Laskar Jihad meninggalkan Jawa, namun Kapolda Jawa Timur yang saat itu dipegang oleh Da'i Bahtiar membiarkan saja mereka berlayar. Mereka juga dibiarkan mengapalkan senjata mereka dengan KM Tanto Sakti sebanyak 2000 peti kemas amunisi dan berbagai senjata laras panjang dan pendek. Di Ambon, aparat keamanan juga membiarkan begitu saja senjata-senjata tersebut diturunkan di pelabuhan Yos Sudarso di Waihaong yang dikuasai komunitas Muslim.⁷⁰

Pada awalnya kedatangan LJ di Maluku disambut gembira oleh masyarakat Muslim Maluku. Beberapa narasumber bahkan menggambarkan kedatang LJ di Ambon saat itu secara psikologis, adalah sebuah kemenangan tersendiri bagi Umat Islam di Ambon, karena selama ini mereka selalu diintimidasi oleh orang-orang Kristen RMS yang mempunyai power lebih dibandingkan Umat Islam.

"Kedatangan LJ selain untuk membantu komunitas Islam melakukan perlawanan sekaligus juga diharapkan dapat memberantas misi kristenisasi yang kurang lebih 30 tahun dilaksanakan di Maluku oleh misionaris-misionaris Kristen, di mana kegiatan tersebut tidak hanya menggunakan cara-cara yang halus tapi juga sudah sampai pada tingkatan

⁷⁰ George Junus Aditjondro, *Di Balik Asap Mesiu, Air Mata dan Anyir Darah di Maluku dalam Zairin Salampessy dan Thamrin Husain, Editor, Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu: tragedi Kemanusiaan Maluku di Balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, dan Kepentingan Elit Politik, Tapak Ambon (Jakarta, Juli, 2000), Hal. 162-170.*

mengintimidasi kaum Muslimin yang tidak mau masuk Kristen,"⁷¹ tutur seorang narasumber dari komunitas Islam

Selain itu, kedatangan LJ juga mampu meningkatkan semangat militansi khususnya, di kalangan pemuda melalui gerakan jihadnya. Meskipun beberapa narasumber mengatakan bahwa gerakan jihad yang mereka lakukan saat itu merupakan reaksi spontan dari pembantaian kaum Muslimin di Tobelo di Daerah Popilo dan Tuguliwang, Kecamatan Tobelo, dan Kabupaten Halmahera Utara. Namun apabila kita mengamati relasi yang kuat antara panglima-panglima perang lokal (biasanya berusia 30-40 tahun) dengan pemimpin LJ, maka tidak bisa dinafikan peran LJ sangat besar dalam mengobarkan semangat militansi pemuda Maluku sangatlah tinggi, sebagaimana yang dituturkan oleh seorang narasumber:

"Saya bertambah semangat untuk berperang sejak saya diundang oleh Laskar Jihad untuk tabligh akbar di Jakarta tanggal 16 April 2000. Sejak itu saya kenal baik dengan Panglima Laskar Jihad yaitu Ustadz Ja'far Umar Thalib bahkan kita selalu berkoordinasi dengan beliau. Tetapi secara struktur komando tidak ada kaitan secara langsung, yang jelas saya dan beliau mempunyai kesamaan visi dalam gerakan jihad ini yaitu untuk memperbaiki keadaan umat Islam di Kepulauan Maluku.", ungkapnya.⁷²

Kegiatan Laskar Jihad antara lain membantu komunitas Islam dalam melawan komunitas Kristen, melakukan beberapa pelatihan dan teknik berperang kepada pemuda-pemuda setempat, termasuk membantu memberikan pasokan mesiu, amunisi dan senjata api yang berjenis AK-47 bahkan M-16,⁷³ serta membantu komunitas Islam untuk merakit senjata buatan. Selain itu, LJ juga diakui banyak

⁷¹ Abdul Aziz, Imam Besar Masjid Al-Fatah,

⁷² Wawancara dengan tokoh pemuda Islam yang juga salah satu Panglima Perang di Jazirah Leihitu.

⁷³ Wawancara dengan Imam Besar Masjid Al-Fatah.

molotov. Selain itu mereka juga mengatur pemasokan senjata dari Jawa.

"...bahkan, untuk membuat bom molotov ibu-ibu dan anak-anak kecil juga terlibat, mereka mengumpulkan botol, mengisi bensinnya sedangkan yang lain (orang dewasa) pasang sumbu. Mereka melakukan itu semua dengan gotong royong. Sedangkan untuk senjata ada tenaga-tenaga khusus yang mengaturnya untuk mendatangkan senjata-senjata dari Jawa," katanya.⁷⁸



Ibu-ibu setempat yang sedang membuat bom molotov di lingkungan Masjid Al-Fatah

Pengakuan tokoh agama ini bukanlah isapan jempol. Hasil rekaman video yang diperoleh dari aparat keamanan memperlihatkan pada kerusuhan fase ketiga, halaman belakang Masjid Al-Fatah menjadi tempat anak-anak dan ibu-ibu menyiapkan bom molotov.⁷⁹

Seksi hukum, bertugas untuk memberikan advokasi dan bantuan hukum terhadap pemuda-pemuda Islam yang dalam konflik

⁷⁸ Wawancara dengan tokoh agama Islam di Ambon

⁷⁹ VCD, Ambon Membara, Sumber Polda Maluku

tersebut harus berurusan dengan aparat keamanan. Seksi logistik bertugas untuk mengumpulkan bahan makanan, terutama untuk mereka yang berada di garis depan. Biasanya bahan makanan tersebut didapatkan dari warga secara sukarela dari rumah ke rumah dalam bentuk matang maupun bahan mentah. Tenaga pengumpul makanan tersebut biasanya terdiri dari ibu-ibu. Mereka juga yang mengirimkan logistik ini ke pemuda-pemuda yang sedang berperang. Semua kegiatan tersebut bermarkas di Masjid Al-Fatah.

Media informasi yang digunakan kelompok Islam dalam konflik tersebut antara lain Radio SPMM (Suara Perjuangan Muslim Maluku) dan Surat Kabar Harian Ambon Express. Kedua media massa ini dipergunakan oleh kelompok Islam untuk memberikan informasi yang berupa gambaran tentang daerah yang sedang konflik, korban yang jatuh maupun sebagai alat provokasi untuk membangkitkan semangat berperang bagi komunitas Muslim di Ambon.

SPMM adalah organ resmi di bawah divisi Hubungan Masyarakat Laskar Jihad. Radio dengan gelombang 105,5 Mhz FM ini, mulai berdiri pertengahan tahun 2000, tidak lama setelah gelombang kedatangan Laskar Jihad ke Ambon. Radio SPMM setiap hari mengudara setengah jam dengan program berita tiap pukul 22.00 WIT. Selain berita, radio ini juga menyiarkan secara langsung pengajian dan tabligh akbar yang pada umumnya dilakukan di Masjid Al-Fatah Ambon. Dalam acara ini, tidak jarang diwarnai dengan pernyataan kebencian kepada kelompok dan komunitas lain dan seruan perang.

Beberapa tabligh akbar yang bernada provokasi yang disiarkan secara langsung oleh radio SPMM antara lain, tabligh akbar yang dilakukan di Masjid Al-Fatah pada tanggal 3 September 2000. Panglima Laskar Jihad dalam tabligh akbar ini memberikan ceramah dan memompa semangat umat Islam Ambon dan menyerukan agar umat Islam di Ambon memerangi umat Kristen.

“...Perangilah umat Kristen sampai segala potensi mereka untuk mengganggu umat Muslim hancur lebur. Selama mereka masih mengganggu, perangilah mereka, sampai umat Islam Ambon dapat menjalankan syariat agamanya dengan tenang. Jangan coba-coba memfitnah umat Islam. Jika itu terjadi, jihad akan terus berlangsung.

Umat Islam bukan perusuh atau pengacau. Justru umat Islam yang dirusuh dan dihancurkan pemberontak Kristen RMS. Jangan terlena dengan keadaan sekarang, tapi harus waspada dan siaga, sambil memanjatkan doa kepada Allah SWT’.⁸⁰

Ceramah yang bernada provokasi tersebut tidak saja ditujukan pada masyarakat Muslim di Ambon tetapi juga pada aparat keamanan yang bertugas di wilayah ini. Selain itu, penceramah dalam tabligh akbar ini juga berasal dari tokoh-tokoh agama setempat (lokal). Sebagai contoh khotbah yang disampaikan Mohammad Attamimi seorang tokoh lokal pada tanggal 11 Mei 2001;

“Saudara-saudara sekalian ketenangan kita diusik lagi dengan peristiwa yang terjadi kemarin⁸¹, di mana tiga orang saudara dan saudari kita menjadi korban kebiadaban umat Kristen kafir. Sehingga dengan itu, adakah kita mau *baku bae*? Kita menuntut kepada para aparat yang ada di kota ini untuk mengambil orang itu, agar supaya dibunuh, kalau tidak umat Islam akan membalas. Kita tunggu 2x24 jam. Pada hari ahad kalau yang melakukan penembakan itu tidak tertangkap, maka kita kan mengambil tindakan. Dan jika 2x24 jam tidak

⁸⁰ Rekaman Pidato Jafar Umar Thalib di Masjid Al-Fatah, 3 September 2000.

⁸¹ Attamimi mengomentari peristiwa yang terjadi di Teluk Ambon pada tanggal 10 Mei 2001, yang menyebabkan tiga orang Muslim tewas tertembak. Penembak dicurigai dari kelompok Kristen.

ditangkap pelakunya maka kita tidak ada komando, bebas melakukan pembalasan,"⁸².

Atau apa yang diucapkan oleh Jafar Umar Thalib pada tabligh akbar tanggal 26 April 2002.

"...kemudian saya nasehatkan kepada Pangdam, Saudara Mustopo, takutlah kamu kepada Allah dan kutukan-Nya. Sungguh doa dari Muslim yang teraniaya akan mengena kamu. Takutlah kamu dari doa orang yang teraniaya..."

Menurut keterangan Laskar Jihad, Radio SPMM dibangun untuk mengimbangi pemberitaan media Ambon yang dikuasai oleh kelompok Kristen, yakni TVRI, RRI, dan Antara. Dalam pandangan Laskar Jihad, pemberitaan ketiga media tersebut selalu menguntungkan komunitas Kristen, dan menggambarkan pihak Islam sebagai teroris dan perusuh.⁸³ Radio ini pada awal berdiri dikelola oleh tiga orang wartawan. Namun seiring dengan memanasnya konflik hingga akhir pemulangan Laskar Jihad radio ini dikelola oleh sembilan orang reporter yang merangkap sebagai penyiar.

Selain media *mainstream*, penyebaran informasi tentang konflik di Maluku dari kelompok Islam juga memanfaatkan jaringan internet. Ada puluhan situs yang dipakai oleh kelompok Islam dalam menyebarkan informasi tentang konflik yang terjadi di Ambon dan sekitarnya. Situs-situs tersebut antara lain; Situs resmi LJ (<http://www.laskarjihad.or.id>)⁸⁴. Situs ini berisi liputan pengalaman mereka yang bertempur digaris depan dan seruan-seruan perang. Situs Karomah (<http://www.karomah.cbn.net.id>) Situs ini berisi tentang kliping peristiwa yang diambil dari situs berita atau koran nasional, foto-foto masjid yang terbakar, tentara Islam yang meninggal. Juga

⁸² Rekaman pidato Mohammad Attamimi yang disiarkan SPMM tanggal 11 Mei 2001 dan disiarkan ulang pada tanggal 12 Mei 2001.

⁸³ Situs Laskar Jihad tanggal 7 Juni 2001, [Http://www.laskarjihad.or.id/berita/jun2001/mhi10607.htm](http://www.laskarjihad.or.id/berita/jun2001/mhi10607.htm)

⁸⁴ Seiring dengan pembubaran LJ, situs ini juga diutup.

tentang kisah-kisah yang menyedihkan seperti nasib pengungsi dari kelompok ini. Situs lain yang cukup populer adalah Suara Ambon Online (<http://www.come.to/suaraambon>). Situs ini berisi perkembangan Ambon yang dilaporkan setiap hari. Berita itu selain dari kliping berita juga laporan dari warga. Situs ini juga dilengkapi dengan berbagai foto yang menguraikan mengenai “pembantaian” warga Islam, tentang masjid yang terbakar, serta pernyataan sikap dari berbagai organisasi Islam tentang Maluku dan *form* dana sumbangan untuk jihad di Maluku.

IV.1.3. Kelompok Aparat Keamanan dan Militer

Sudah bukan suatu rahasia lagi bahwa konflik di Maluku Tengah juga menyeret secara langsung dua alat keamanan negara yakni TNI dan Polri. Berbagai peristiwa seperti konflik Aruho tanggal 23 Januari 2000, penyerangan di Desa Sonya pembakaran Gereja Silo, serta pembobolan gudang senjata di markas Brimob, menunjukkan kentalnya keterlibatan Polri dalam konflik di Maluku. Meski ada sanggahan secara resmi dari kedua markas alat negara ini, namun fakta serta hasil penyidikan polisi mengukuhkan indikasi tersebut.

Hasil analisis yang dilakukan George Junus Aditjondro setidaknya menunjukkan lima agenda yang melatarbelakangi keterlibatan aparat militer dalam konflik Ambon.⁸⁵ Pertama, membalas oposisi para mahasiswa terhadap dwifungsi ABRI, dengan mengalihkan konflik vertikal menjadi konflik horizontal; Kedua, mempertahankan konsep Wawasan Nusantara; Ketiga, mempertahankan struktur teritorial TNI, khususnya Angkatan Darat;

⁸⁵ George Junus Aditjondro, Di Balik Asap Mesiu, Air Mata dan Anyir Darah di Maluku dalam Zairin Salampessy dan Thamrin Husain, Editor, *opcit.*, Hal. 162-170.

Keempat, mempertahankan kepentingan bisnis militer; Kelima, mencegah pemeriksaan dan peradilan para perwira tinggi dan purnawirawan militer yang dituduh terlibat kejahatan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Bagi Aditjondro, munculnya konflik horizontal di Maluku dan di tempat-tempat lainnya di Indonesia sedikit banyak mengindikasikan adanya keterlibatan aparat militer untuk membelokkan perhatian masyarakat mengenai penghapusan dwi fungsi ABRI yang banyak disuarakan oleh mahasiswa saat itu. Sementara agenda kedua dilakukan karena menurut analisa Aditjondro, penarikan diri militer secara terpaksa dari bumi Timor Lorosae akibat kekalahan Indonesia dalam jajak pendapat tahun 1999, telah meninggalkan satu lubang rawan dalam rantai pertahanan TNI di wilayah Timur di mana Maluku termasuk dalam wilayah tersebut. Sementara itu, sebagian besar penduduk Kristen di Maluku di mata militer dipandang kurang dapat dipercaya untuk mempertahankan sisi Tenggara wilayah RI, karena diyakini bahwa mereka mungkin memiliki kecenderungan separatistis yang sama dengan rakyat Timor Timur yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Oleh karena itu, dari sudut pandang militer perlu adanya penyesuaian demografik strategik di Maluku, berupa pengiriman ribuan anggota Laskar Jihad yang pada akhirnya diharapkan menetap di kepulauan itu. Langkah ini diharapkan dapat mencegah Maluku mengikuti jejak Timor Timur dalam melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indikasi tentang agenda militer yang ketiga yakni mempertahankan struktur teritorial TNI dilihat Aditjondro dari adanya peningkatan status Korem Pattimura menjadi Kodam, tidak lama setelah konflik di Maluku tersebut berkobar. Penguatan struktur teritorial ini bagi militer khususnya Angkatan Darat, sangat penting karena institusi ini selain menjadi instrumen pertahanan TNI, juga merupakan alat kontrol yang efektif bagi militer terhadap kehidupan sosial politik masyarakat di daerah.

Sementara agenda keempat, menurut analisis George Aditjondro, tidak terlepas dari kerisauan beberapa oknum militer terhadap penerapan otonomi daerah, di mana kekuasaan dewan perwakilan rakyat daerah akan jauh lebih besar, termasuk dalam penentuan perusahaan-perusahaan yang dapat mengelola sumber daya alam di wilayah ini.⁸⁶

Adapun jaringan kegiatan yang dilakukan oleh oknum aparat militer dalam melaksanakan agenda-agendanya adalah dengan melakukan provokasi, membantu kelompok tertentu dalam konflik serta memberikan bantuan pengadaan persenjataan maupun pelatihan bagi kelompok-kelompok berkonflik. Hasil pemeriksaan aparat keamanan terhadap beberapa provokator dan operator yang tertangkap --termasuk Berty, menunjukkan adanya kaitan yang sangat erat antara mereka dengan satuan Koppasus. Bahkan, ada beberapa perwira militer yang memberikan instruksi langsung dan melakukan provokasi secara terbuka di beberapa tempat.⁸⁷ Dari BAP-BAP Kepolisian tersebut, beberapa nama oknum militer yang terlibat dalam konflik di Maluku dari tingkat prajurit hingga tingkat perwira. Secara langsung oknum-oknum militer tersebut menyiapkan para operator lapangan dari proses rekrutmen, pelatihan, pengadaan senjata hingga pembayarannya.⁸⁸ Pelatihan yang mereka lakukan juga melibatkan anggota Laskar Jihad yang bermarkas di Kaliurang,

⁸⁶ Masa Orde Baru merupakan masa kejayaan bisnis militer. Secara langsung atau tidak langsung Soeharto banyak memberikan konsesi pengusaha-pengusaha nasional khususnya yang berasal dari kalangan non pribumi untuk melakukan kerja sama dengan militer dalam mengelola bisnis di daerah-daerah. Bahkan beberapa yayasan yang dimiliki militer secara legal diberi ijin untuk mengelola bisnis di daerah untuk kepentingan korps.

⁸⁷ Lihat Berita Acara Pemeriksaan (Saksi), Renaldo Michael Silver Kriefkhoff, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku, tgl 12 Juli 2001.

⁸⁸ Sebagian uang pembayaran yang diberikan oleh oknum militer terhadap operator lapangan merupakan uang palsu dalam bentuk pecahan lima puluh ribuan.

Yogyakarta. Selain oknum militer dalam kegiatan tersebut juga terlibat oknum dari Kepolisian.⁸⁹

Prosedur operasi yang mereka lakukan adalah dengan melakukan penyusupan dan pembusukan dari dalam pada masing-masing komunitas. Biasanya operator yang ditempatkan untuk melakukan tugas tersebut adalah mereka yang memiliki keyakinan yang sama dengan kelompok yang disusupi. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila penyerbuan desa komunitas Kristen melibatkan orang-orang yang beragama Kristen dan sebaliknya. Sementara itu, provokasi yang mereka lakukan lebih banyak dengan menggunakan media telepon yang mengabarkan seolah-olah desa tertentu telah dibumihanguskan dan meminta masyarakat desa yang ditelepon untuk melakukan pembalasan. Metode ini pada awal-awal kerusuhan saat efektif untuk membakar massa, namun meningkatnya kewaspadaan masyarakat serta luasnya pemberitaan oleh media massa, membuat mereka terpaksa mencari cara lain, sehingga pilihan yang dipakai pada fase kedua adalah keterlibatan secara fisik oknum aparat dalam konflik.

⁸⁹ Lihat lampiran Surat Tim Pengacara Gereja, Gereja Maranatha kepada Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima TNI dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Gubernur Maluku.

BAB V

PENGHENTIAN KEKERASAN DAN REKONSILIASI

Upaya penghentian kekerasan dan langkah rekonsiliasi untuk mendapat kata damai antara dua komunitas yang bertikai banyak dilakukan, baik yang disponsori oleh pemerintah maupun yang digagas oleh kelompok-kelompok masyarakat. Berbagai pertemuan formal maupun informal, hingga acara yang dibungkus simbol agama dan adat, juga diselenggarakan. Namun demikian, sampai saat ini “kedamaian sejati” belum juga singgah di bumi penghasil rempah-rempah ini, meskipun harus diakui ada beberapa kemajuan yang tidak dapat disepelekan, yang telah memberikan kontribusi bagi proses perdamaian dan rekonsiliasi.

Bab ini akan membahas upaya-upaya yang dilakukan pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat dalam proses penghentian kekerasan dan rekonsiliasi pihak-pihak yang bertikai dalam konflik di Maluku, khususnya di Maluku Tengah.

V.1. Penghentian Kekerasan dan Rekonsiliasi yang Dibangun Pemerintah

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penghentian kekerasan akibat konflik di Maluku. Sejak masa pemerintahan Habibie hingga pemerintahan Megawati berbagai cara telah dilakukan untuk menghentikan kekerasan dan menciptakan perdamaian, dan saat ini meski kondisi Maluku Tengah relatif kondusif, namun “kedamaian sejati” masih jauh dari harapan. Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan Konflik di Maluku Tengah.

Bab V – Penghentian Kekerasan dan Rekonsiliasi

Masa Presiden		
B.J Habiebie	Abdurrahman Wahid	Megawati Soekarnoputri
<p>22 Januari 1999 Atas dasar kesepakatan bersama dengan para tokoh agama di Ambon, Gubernur M. Saleh Latuconsina memutuskan memberlakukan jam malam untuk kawasan Pulau Ambon dan Maluku. Keputusan ini diambil setelah perundingan dengan Ketua MUI Maluku RR. Hasanbasri, Ketua Harian Sinode Gereja Protestan Maluku Pdt. Semmy Titaley, Uskup Ambon Mgr. Mandagi MSc, serta sejumlah tokoh agama dan masyarakat</p> <p>23 Januari 1999 Pangdam VIII/Trikora Mayjen TNI Amir Sembiring mengeluarkan perintah tembak di tempat, bila masyarakat yang membawa senjata tajam melawan serta tidak menuruti permintaan untuk menyerahkannya. Perintah tembak di tempat ini juga merupakan kesepakatan para pemimpin agama di Ambon guna mengatasi kerusuhan.</p>	<p>24 Juni 2000 Presiden Abdurrahman Wahid memberlakukan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Maluku Utara mulai 27 Juni 2000, pukul 00.00 Waktu Indonesia Timur. Pengumuman keadaan darurat sipil melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 88 Tahun 2000.</p> <p>27 Juli 2000 Pemerintah Propinsi Maluku dan Maluku Utara dalam kondisi Darurat Sipil. Penguasa Darurat Sipil, Saleh Latuconsina memberlakukan jam malam mulai pukul 20.00 hingga 06.00 pagi.</p> <p>8 Desember 2000 Sejumlah tokoh Muslim dan Kristen asal Maluku yang terdiri dari pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda, pemimpin perang, dan aktivis NGO bertemu di Yogyakarta untuk menajagi kemungkinan rujuk sosial.</p> <p>25 Januari 2001 Markas Besar TNI di Jakarta</p>	<p>11-12 Februari 2002 Sebuah pertemuan antara dua kelompok yang bertikai diselenggarakan di kota wisata Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pertemuan ini bertajuk "Pertemuan untuk Maluku". Kedua belah pihak sama-sama mengharapkan penghentian konflik dijadikan syarat mutlak untuk penyelesaian pertikaian horizontal yang telah berlangsung lebih dari tiga tahun di Maluku. Hasilnya mereka menyepakati 11 butir kesepakatan dan kedua belah pihak setuju untuk segera mensosialisasikannya.</p> <p>20 Februari 2002 Pemerintah mengirim sebuah tim yang terdiri dari jajaran Politik dan Keamanan dan Kesejahteraan Rakyat di Ambon sebagai langkah awal realisasi komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik di daerah tersebut. Komitmen pemerintah ini sesuai dengan agenda yang disepakati dalam pertemuan Malino II</p>

<p>27 Januari 1999 Kepolisian Daerah Maluku memeriksa 90 orang yang diduga menjadi penghasut dan penggerak kerusuhan. Dari pemeriksaan tersebut 37 orang diantaranya dijadikan tersangka.</p>	<p>memberangkatkan satu tim khusus pencari fakta ke Ambon. Tim ini bertugas mengumpulkan fakta di lapangan dan menyelidiki kemungkinan keterlibatan aparat keamanan dalam insiden baku tembak di kawasan Batu Merah-Ambon.</p>	<p>9 April 2002 Sesuai dengan instruksi Gubernur sekaligus Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku, kegiatan razia mulai dilakukan oleh tentara di wilayah Kota Ambon. Pemeriksaan adanya senjata api dan senjata tajam dilakukan pada sejumlah pos, terutama pada tempat yang dianggap rawan.</p>
<p>30 Januari 1999 Komnas HAM menurunkan Tim-nya yang akan memantau keadaan terakhir di Ambon. Tim Komnas HAM terdiri dari Albert Hasibuan dan Benyamin Mangkoedilaga.</p>	<p>20 Februari 2001 Tiga duta besar dan sejumlah perwakilan kedutaan negara asing, didampingi Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah , Erna Witoelar mengunjungi daerah-daerah tempat terjadinya kerusuhan di Maluku . Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi Maluku yang sesungguhnya sebelum negara luar memberikan bantuan.</p>	<p>17 April 2003 Tim Penyidik Gabungan yang dipimpin oleh Kepala Direktorat Kepolisian Daerah Maluku, Komisar Besar Jhonny Tangkudung, menangkap Ketua Front Kedaulatan Maluku (FKM), Alexander H. Manuputty. Tokoh yang bersikeras menuntut Kedaulatan Republik Maluku Selatan ini dijemput oleh polisi dari rumahnya yang terletak di Kawasan Kudamati, Kelurahan Benteng, Kota Ambon, guna dimintai keterangan sehubungan dengan rencana penaikan bendera RMS pada tanggal 25 April 2002.</p>
<p>14 Februari 1999 Presiden B.J. Habibie menugaskan Tim Khusus yang diketuai Mayjen Purn. TNI Jose Muskitta dengan anggota Des Alwi dan K. Kaplale untuk mencari fakta dan solusi. Pemerintah juga menyediakan dana Rp. 5 milyar untuk konsolidasi tingkat pertama di Ambon.</p>	<p>15-16 Maret 2001 Sekitar 2.000 warga Maluku hadir dalam sebuah dialog di Langgur, Tual, Maluku Tenggara. Mereka datang dari segala penjuru untuk mencari penyelesaian secara bersama-sama konflik di Maluku.</p>	
<p>12 Mei 1999 Para tokoh agama, masyarakat, adat, pemuda, menandatangani ikrar perdamaian di Lapangan</p>		

Bab V – Penghentian Kekerasan dan Rekonsiliasi

<p>Merdeka Ambon. Mereka bertekad membangun kembali hubungan kemanusiaan baru yang didasari rasa cinta sesama, saling menghargai dan menghormati dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, kekeluargaan dan persaudaraan.</p> <p>15 Mei 1999 Korem 174 Pattimura yang selama ini berada di bawah Kodam VIII/Trikora resmi menjadi Kodam X/Pattimura. Pangdamnya Brigjen Max Tamaela.</p>		
---	--	--

Sumber: Indonesia dalam Krisis: 1997-2002, Penerbit Buku Kompas, (Jakarta, November 2002), Hal. 321-323.

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada masa pemerintahan Habibie, energi yang dikeluarkan oleh pemerintah difokuskan untuk melakukan penghentian kekerasan antara dua komunitas yang berkonflik. Pada masa Abdurrahman Wahid, kegiatan penghentian kekerasan masih dilakukan, namun pemerintah saat itu sudah lebih maju selangkah yakni mendorong dua komunitas yang bertikai untuk melakukan berbagai pertemuan guna mencari upaya rekonsiliasi. Berbagai kegiatan dilakukan untuk mewujudkan upaya tersebut, meskipun ada beberapa di antaranya yang mengalami kegagalan.

Pada masa Megawati upaya rekonsiliasi diteruskan dengan memfasilitasi pertemuan Malino. Meskipun pertemuan ini mendapat banyak kecaman dari berbagai pihak karena ternyata utusan yang

hadir tidak mewakili seluruh pihak yang bertikai, namun demikian pertemuan yang menghasilkan sebelas (11) butir kesepakatan ini cukup membantu proses penghentian kekerasan di wilayah ini.

Perjanjian Malino II diawali dengan pertemuan informal yang dilakukan oleh Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, Gubernur Saleh Latuconsina, Menko Kesra Yusuf Kalla, dan Kapolri Da'i Bachtiar dengan dua kelompok yang bertikai pada bulan Januari 2002. Dalam pertemuan tersebut hadir kurang lebih 150 tokoh masyarakat, agama, adat, dan pemuda dari komunitas Islam dan Kristen untuk mengeluarkan segala keluhannya secara bergantian. Komunitas Kristen mendapat giliran pada pagi hari, sedangkan Komunitas Islam pada siang hari.

Pada malam harinya pertemuan informal tersebut masih dilanjutkan, kali ini delegasi dari masing-masing komunitas hanya dibatasi sebanyak 10 orang saja. Dalam pertemuan tersebut disepakati untuk melakukan proses perdamaian dan penyusunan delegasi. Pilihan tempatnya antara Makassar dan Malino. Karena penataan organisasinya lebih rapi, Komunitas Kristen dapat dengan segera penyusun komposisi delegasi di bawah pimpinan Tony Pariela yang akan diikutsertakan dalam proses perdamaian. Ini tidak terjadi di komunitas Islam. Beberapa kelompok dari komunitas Islam seperti Forum Komunikasi Ahli Sunnah Wal Jamaah, tempat LJ bernaung serta kelompok yang dimotori oleh Mohamad Attamimi (Mo Attamimi), menolak dilakukannya proses perdamaian sebelum peristiwa 19 Januari 1999 diungkap.

Lima hari setelah pertemuan tersebut, masing-masing kelompok menyertakan 15 orang untuk bertemu di Makassar. Ada beberapa pejabat tinggi yang meminta agar TNI dan Polri, serta Laskar Jihad tidak diikutsertakan dalam pertemuan tersebut, namun

permintaan tersebut ditolak.⁹⁰ Pertemuan awal ini merupakan pertemuan konsolidasi masing-masing kelompok sebelum mereka semua menandatangani kesepakatan damai. Langkah konsolidasi dari Kelompok Kristen dilakukan di Losari Beach Hotel, sedangkan kelompok Islam di Hotel Kenari. Pertemuan berikutnya dilakukan di Hotel Sedona Makassar pada tanggal 27 Januari 2002, masing-masing kelompok hanya mengirim empat utusan. Dalam pertemuan ini disepakati damai melalui proses perundingan. Pertemuan ini dihadiri Gubernur Saleh Latuconsina dan Staf Menko Kesra Basri Palaguna.

Tanggal 31 Januari 2002, delegasi kedua kelompok yang bertikai mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah fasilitator di Makassar untuk menyepakati konsep penghentian kekerasan dan rehabilitasi di Ambon untuk dibawa dalam pertemuan selanjutnya di Malino yang akan dilaksanakan pada tanggal 6-7 Februari 2002. Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Menko Kesra Dr. Farid Husain. Ada lima butir kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini. Pertama, penyelesaian konflik di Maluku melalui dialog; Kedua, penegakan supremasi hukum; Keempat, pengembalian pengungsi; Kelima, rehabilitasi ekonomi dan sarana-sarana lainnya.

Pada pertemuan tersebut delegasi dari Komunitas Kristen memberikan dua opsi tambahan; Pertama, mereka menyimpulkan bahwa konflik sosial di Maluku adalah konspirasi pemerintah pusat; Kedua, mereka menuntut agar LJ dipulangkan dari Maluku. Sementara delegasi dari Komunitas Islam, meminta hak perdata atas kepemilikan tanah pra pemerintahan kolonial yang dimiliki penduduk Muslim dikembalikan serta pembangunan Universitas Pattimura

⁹⁰ Penolakan Laskar Jihad untuk tidak ikut dalam perundingan disampaikan oleh Yusuf Kalla dengan alasan bahwa LJ merupakan bagian dari konflik sehingga harus dilibatkan dalam proses perdamaian.

dilakukan kembali dengan komposisi staf pengajar 50 persen dari kelompok Islam dan 50 persen dari kelompok Kristen.⁹¹

Komposisi Pengajar Universitas Pattimura-Ambon Berdasarkan Basis Agama

Fakultas	Islam	Kristen	Jumlah
Hukum	1	74	75
Teknik	4	71	75
Pertanian	11	161	172
Fisip	32	36	38
Ekonomi	18	37	55

Sumber: Buku Biru Universitas Pattimura Ambon, 1997

Beberapa narasumber dari Komunitas Kristen yang dihubungi saat penelitian lapangan ini menyatakan bahwa komposisi staf pengajar di Unpati saat ini memang masih didominasi oleh Komunitas Kristen, namun demikian dalam sistem rekrutmen pengajar tidak ada pembatasan yang didasarkan agama.

“Sejak awal kita tidak membatasi rekrutmen staf pengajar Unpati atas dasar agama. Kita hanya memilih orang yang *capable*. Dan proses seleksi yang kita lakukan terbuka artinya syarat yang diajukan sama saja untuk siapa saja. Saya rasa kurangnya pengajar dari Komunitas Islam karena dari kelompok ini dari tahun ke tahun memang sedikit yang mendaftar,” tutur seorang akademisi.⁹²

Penuturan yang sama juga diungkapkan oleh seorang raja yang juga pejabat birokrasi setempat yang berasal dari komunitas Islam. Menurutnya, harus diakui bahwa kurangnya staf pengajar dari Islam di Unpati karena SDM dari Komunitas Islam yang memenuhi syarat untuk diterima sebagai staf pengajar sangat terbatas. Banyak dari kalangan Islam lebih menyukai menjadi birokrat kalau sudah

⁹¹ Hingga kini komposisi staf pengajar Universitas Pattimura-Ambon masih didominasi oleh staf pengajar yang beragama Kristen. Wawancara dengan tokoh masyarakat dari Komunitas Islam Ambon, Agustus 2003

⁹² Wawancara dengan tokoh akademisi di Ambon, Agustus 2003

sarjana ketimbang mengajar. Mereka juga jarang yang melanjutkan ke jenjang S2, seperti pemuda-pemuda dari komunitas Kristen. Persoalan ini lanjutnya, tidak terlepas dari politik yang diterapkan oleh Belanda di mana kelompok Kristen lebih banyak mendapatkan fasilitas untuk pendidikan dibandingkan kelompok Islam.

“Pada masa terbuka seperti sekarang, harusnya kita justru bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan terutama menyiapkan SDM yang kuat khususnya di bidang pendidikan. Sehingga masa datang kita bisa duduk sejajar dalam hal pendidikan dengan saudara kita yang Kristen,” katanya.⁹³

Sementara itu, satu kelompok Muslim yang bernama Forum Silaturahmi Umat Islam Maluku (FSUIM) dalam forum Malino II juga mengeluarkan tiga tuntutan. Pertama, harus ada penegakan hukum atas siapa yang bersalah mengawali kerusuhan di Ambon dan sekitarnya. Kedua, Pemerintah dituntut untuk menyatakan RMS dan FKM sebagai organisasi terlarang dan dinyatakan bertindak makar. Ketiga, kelompok Kristen juga harus mengutuk dan memerangi RMS dan FKM. Kelompok FSUIM ini terdiri atas Pengurus Besar Front Pembela Islam Maluku, Pusat Komando Jihad Maluku, Satgas Amar Ma’ruf Nahi Munkar Muslim Maluku, Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Maluku, Yayasan Al Khairat Maluku, dan Pengurus Besar Persaudaraan Muslim Nusa Ina. Mereka juga menolak ikut terlibat dalam proses perundingan sebelum penegakan hukum dilaksanakan.

Pertemuan Malino yang sedianya dilakukan 6-7 Februari, akhirnya ditunda hingga tanggal 11-12 Februari dengan alasan untuk memberikan waktu kedua kelompok yang bertikai untuk melakukan persiapan. Tanggal 11 Februari 2002, sesuai jadwal, pertemuan Malino dilaksanakan di Celebes Villa & Resort. Pertemuan tersebut diikuti 70 delegasi dari kelompok Islam dan Kristen. Dari Kelompok

⁹³ Wawancara dengan Raja Negeri Lima

Islam terdiri dari 11 orang dari unsur organisasi dan 24 orang pimpinan kelompok/aksi. Dari pihak Islam antara lain hadir: H.A. Wahab Polpoke (ketua MUI Maluku), Thamrin Elly (Ketua BIMM), Ir. M. Natzir Rahawarin (Sekjen BIMM), Drs. Idrus Tatuhey, MS (Ketua Muhammadiyah Maluku), Ir. Hasan Ohorella (Sekretaris Satgas Amar Ma'ruf Nahi Mungkar), Abdul Aziz Fidmatan, S.Sos. (Sekjen FPIM), Husein Toisuta (Ketua FPI), Daud Sagadji, SE (Ketua BIMM Kota), Yisif Laisoe (Sekretaris BIMM Kota), Drs. S. Hasbullah Toisuta (akademisi), Daud lalana (Pemuda Leihitu), Drs. Yunus Serang (tokoh Banda Ely), dan Jafar Tuanani (Tokoh Kailolo).

Sementara dari Kelompok Kristen yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah antara lain: Pdt. I.W.J. Hendriks (Ketua Sinode GPM), Tonny Pariela (akademisi), Pdt. S.J Mailoa (Sekum BPH Sinode GPM), Mgr. P.C. Mandagi, Msc (Uskup Amboina), Pdt. Henry Lolain (Ketua PGPI Maluku), Pdt. Ricky Hitipeuw (Ketua BPD GBI Maluku), Raja Waraka (Ketua Latu Pati Kecamatan Amahai), Raja Emus Dias Ema (Raja Kota Ambon), Raja Tuhaha (Ketua Latu Pati Kecamatan Saparua), Sr. Briggita Renyaan PBHK (tokoh Perempuan), Emang Nikijuluw, Femy Souisa, dan Yongkie Siahaya (ketiganya mewakili kelompok akar rumput), dan Hengky Hattu, SH (dari LSM).

Dalam pertemuan tersebut kedua delegasi ditawarkan sejumlah agenda yang dibagi dalam dua komisi, yakni Komisi Keamanan dan Hukum serta Komisi Sosial dan Ekonomi. Komisi Keamanan dan Hukum membahas soal penyerahan senjata, kedamaian di tingkat desa, penarikan kelompok-kelompok, sanksi-sanksi pelanggaran, dan tim pengawas. Sedangkan Komisi Sosial dan Ekonomi membahas soal sosialisasi hasil pertemuan Malino II dan masalah rehabilitasi fasilitas umum yang rusak selama konflik.

Seperti halnya dengan perundingan Malino I (Poso), dalam perundingan Malino II ini, pemerintah pusat juga mengajukan tiga opsi; *Pertama*, perang berlangsung terus dengan korban terus berjatuhan, segala penderitaan berlanjut. Rakyat Maluku menjadi

masyarakat yang terbelakang akibat pendidikan tidak berjalan, dan ekonomi yang hancur; *Kedua*, pemerintah melakukan tindakan refresif; *Ketiga*, semua duduk berunding untuk menyelesaikan konflik melalui dialog. Opsi ketiga ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Jika berhasil, proses panjang akan dimulai dengan memperbaiki situasi, menegakkan hukum, rehabilitasi sarana dan prasarana, perbaikan ekonomi, pendidikan, hingga harkat warga Maluku kembali seperti semula.

Pertemuan hari pertama tersebut tidak terlepas dari hujan interupsi dari para peserta, baik yang bersifat hujatan maupun keberatan. Delegasi Islam misalnya, masih menuntut agar segera dibentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut segala hal yang berkaitan dengan kerusuhan Maluku termasuk insiden 19 Januari 1999. Selain itu, LJ tidak harus diusir begitu saja dari Maluku.

“Yang penting sebenarnya dari pertemuan ini adalah penghentian konflik dan tindak kekerasan. Setelah itu baru proses penegakan hukum. Setelah semua hal tuntas barulah kita bicarakan soal perdamaian di Maluku. Kami juga meminta agar pemerintah segera membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut segala hal yang berkaitan dengan kerusuhan Maluku termasuk insiden 19 Januari 1999, dan keterlibatan RMS,” tutur Thamrin Ely.⁹⁴

Pada hari kedua pertemuan Malino II (12 Februari) diajukan beberapa persoalan yang belum juga mendapatkan titik temu dari dua kelompok yang berkonflik. Persoalan yang krusial yang tidak disepakati oleh dua kelompok tersebut adalah soal sipil bersenjata. Delegasi kelompok Kristen menilai yang dimaksud dengan kelompok sipil bersenjata adalah Laskar Jihad (LJ). Mereka juga meminta agar LJ sesegera mungkin dikeluarkan dari Maluku. Sementara delegasi kelompok Islam menolak permintaan pengeluaran LJ dari Maluku,

⁹⁴ Proseding pertemuan Malino II

sebaliknya mereka meminta agar RMS tidak ikut campur dalam konflik Maluku.

“Kami tidak bisa memenuhi permintaan kelompok Kristen untuk memulangkan LJ. Mereka sudah berada di Maluku sejak Mei dua tahun lalu. Mereka sangat membantu warga, seperti perbaikan sarana umum, perbaikan pendidikan, dan memperbaiki jalan-jalan. Mereka tidak berbeda dengan LSM lain yang masuk di Maluku,” kata Thamrin Ely.⁹⁵

Meski masih banyak hal-hal yang belum mendapat kata sepakat dari dua kelompok yang bertikai, namun kedua kelompok itu akhirnya sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian Maluku di Malino (Malino II). Kesepakatan tersebut dibacakan oleh Yusuf Kalla, pada tanggal 12 Februari sore. Isi kesepakatan Perjanjian Maluku di Malino adalah:⁹⁶

1. Mengakhiri semua bentuk konflik dan kekerasan.
2. Menegakkan supremasi hukum secara adil, tegas, jujur, tidak memihak, dengan dukungan seluruh masyarakat. Karena itu, aparat penegak hukum harus bersikap profesional dalam menjalankan tugas.
3. Menolak, menentang dan menindas segala gerakan separatisme yang mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI, antara lain RMS.
4. Sebagai bagian dari NKRI maka rakyat Maluku berhak untuk berada, bekerja, dan berusaha di seluruh wilayah Republik Indonesia, begitu pula sebaliknya, rakyat Republik Indonesia dapat berada, bekerja, dan berusaha di wilayah Propinsi Maluku secara sah dan adil dengan memperhatikan dan mentaati budaya setempat.

⁹⁵ Proseding pertemuan Malino II

⁹⁶ Proseding Pertemuan Malino II

5. Segala bentuk organisasi, satuan, kelompok atau laskar yang bersenjata tanpa izin di Maluku, dilarang dan harus menyerahkan senjata atau dilucuti dan diambil tindakan hukum yang berlaku. Bagi pihak-pihak luar yang mengacau Maluku, wajib meninggalkan Maluku.
6. Membentuk tim investigasi independen nasional untuk mengusut tuntas peristiwa 19 Januari 1999, FKM, RMS, Kristen RMS, Laskar Jihad, pengalihan agama secara paksa dan pelanggaran HAM, dan lain sebagainya, demi tegaknya hukum.
7. Mengembalikan pengungsi ke tempat semula dan pengembalian segala hak-hak keperdataannya secara bertahap sesuai situasi dan kondisi.
8. Pemerintah akan membantu masyarakat untuk merehabilitasi mental, sosial, sarana ekonomi dan sarana umum, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan agama serta perumahan rakyat, agar masa depan seluruh rakyat dapat maju kembali keluar dari kesulitan. Sejalan dengan itu, segala bentuk pembatasan ruang gerak penduduk dibuka sehingga kehidupan ekonomi dan sosial berjalan baik.
9. Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan seluruh wilayah dan masyarakat, kekompakan dan ketegasan TNI/Polri sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing, mutlak perlu. Sejalan dengan itu, berbagai fasilitas TNI/Polri harus dibangun, dilengkapi dan difungsikan kembali.
10. Untuk menjaga hubungan dan harmonisasi antar seluruh masyarakat pemeluk agama di Maluku, maka segala upaya dan usaha dakwah dan penyiaran agama harus

tetap menjujung tinggi kemajemukan dengan mengindahkan budaya setempat.

11. Mendukung rehabilitasi Universitas Pattimura dengan prinsip untuk kemajuan bersama, karena itu, rekrutmen dijalankan secara terbuka dengan prinsip keadilan dengan tetap memenuhi syarat kualitas yang ditentukan.

Seusai penandatanganan perjanjian tersebut, kepulauan delegasi disambut secara berbeda antara satu dengan yang lainnya oleh komunitas masing-masing. Sementara delegasi Kristen dapat langsung melakukan konsolidasi untuk sosialisasi dan melakukan langkah-langkah implementasi dari isi perjanjian tersebut, namun tidak demikian dengan delegasi dari kelompok Islam. Delegasi dari kelompok Islam, banyak mendapat kecaman dari komunitasnya karena mereka yang datang dalam pertemuan di Malino dianggap tidak representative. Selain karena mereka tidak memiliki basis pada akar rumput, perilaku mereka selama ini juga dianggap kurang membawa aspirasi umat Islam. Kelompok yang melakukan penolakan tersebut antar lain Forum Pemuda Muslim Baguala (FPMB) dan Forum Silaturahmi Umat Islam Maluku (FSUIM).

Meski dalam pertemuan di Malino tersebut ada utusan dari dua organisasi ini, namun mereka menyatakan bahwa teman yang hadir dalam pertemuan tersebut bertindak atas nama perorangan dan bukan utusan resmi organisasi. Bahkan beberapa tokoh dari kelompok Islam ini setiba di Ambon mendapat sambutan demonstrasi dari komunitasnya. Kendaraan milik salah satu delegasi yang juga Ketua Badan Imarat Muslim Maluku Kota Ambon, Daud Sangaji, dilempari massa Muslim. Massa yang tidak puas berkumpul di Masjid Raya Al-Fatah untuk melakukan protes. Meski tidak ada satupun delegasi dari kelompok Islam terluka dalam insiden tersebut, namun demonstrasi massa tak urung menjadikan sebagian anggota delegasi

takut pulang ke rumahnya dan memilih menginap di Pendopo Gubernur Maluku.⁹⁷

Tanggapan masyarakat sendiri terhadap pertemuan Malino masih terbelah hingga penelitian ini dilakukan. Studi yang dilakukan oleh YPPM pada bulan Mei dan Juni 2003, di tiga wilayah yakni: *Pertama*, wilayah I meliputi Lokasi Mardika dan Desa Batu Merah. Wilayah ini dipilih untuk mewakili daerah/desa awal terjadinya konflik. *Kedua*, wilayah II yang terdiri dari Kecamatan Salahatu, dengan lokasi di Desa Suli, Waai, Tial, Tenga-tenga, Tulehu, Liang, Dusun Jembatan II dan Dusun Hurnala. Wilayah II mewakili daerah-daerah yang sudah terjadi poses rekonsiliasi. *Ketiga*, wilayah III yang meliputi Kecamatan Haruku, (Desa Kailolo, Ori, Rohomony, abauw, Sameth, Haruku, Oma, Wassu, Aboru, Kariuw dan Hulalui), dan Kecamatan Saparua (Desa Kulur, Siri-sori Islam, Porto, Haria, Saparua, Tiouw, Paperu, Booi, Siri-sori Amalatu, Ulath, Ouw, Tuhaha, Mahu, Ihamahu, Nolloth dan Itawaka. Daerah-daerah tersebut mewakili daerah yang tingkat eskalasi konfliknya tinggi dan hingga kini proses rekonsiliasi antara dua komunitas belum ada titik temu. Adapun jumlah responden dalam penelitian tersebut sebanyak 1999 orang.⁹⁸

Hasil penelitian yang dilakukan oleh YPPM memperlihatkan bahwa 63% (1265 responden) mendukung perjanjian Malino II, sedangkan 27% sisanya menyatakan tidak mendukung. Alasan dukungan tersebut antara lain karena dukungan perjanjian Malino II perlu agar konflik cepat berakhir dan masyarakat bisa hidup normal. Selain itu, dukungan perlu dilakukan karena perjanjian Malino II merupakan upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik Maluku. Sementara yang tidak setuju beranggapan bahwa isi perjanjian Malino II tidak mengaspresiasi keinginan masyarakat. Namun

⁹⁷ Harian Kompas dan Siwa Lima, tgl. 13 februari 2002.

⁹⁸ YPPM (Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat), Hasil tabulasi serta analisa data dan informasi: Assessment Pasca Konflik Maluku menuju Masyarakat Maluku Baru yang Damai, Ambon, Agustus 2003.

demikian, dari total reponden yang mengisi *questioner* tersebut hanya 44,42 % yang menyatakan optimis bahwa perjanjian tersebut dapat menyelesaikan konflik. Sedangkan 55,58 % sisanya bersikap pesimis. Menurut sebagian besar reponden tersebut, upaya yang paling penting dalam penyelesaian konflik Maluku adalah adanya sikap tegas dari pemerintah dalam penegakan hukum, dengan menangkap aktor dan pelaku kerusuhan. Selain itu, langkah lain yang penting dalam penyelesaian konflik di Maluku Tengah antara lain: melakukan sosialisasi perdamaian di tingkat *grassroot*, lebih memperhatikan kehidupan masyarakat, pengembalian pengungsi, dan mengungkapkan akar masalah peristiwa 19 Januari 1999.

V.2. Model Rekonsiliasi Kelompok Masyarakat/Individu

Model rekonsiliasi yang terjadi selama kerusuhan maupun posko kerusuhan sangat bervariasi. Sejak awal kerusuhan sudah dilakukan upaya mendamaikan antar warga yang bertikai.⁹⁹ Beberapa model yang dilakukan antara lain dengan menggunakan adat sebagai "entry point" kegiatan rekonsiliasi. Dalam hal ini tampak bahwa lembaga-lembaga keagamaan/LSM maupun masyarakat sendiri sebenarnya tidak tinggal diam dalam upaya mendukung timbulnya suasana kondusif bagi perdamaian.

⁹⁹ Pada bulan Januari 1999, warga Mardika yang diwakili oleh Willem Tuhumena selaku ketua RT dan warga Batu Merah yang diwakili oleh tokoh setempat melakukan kesepakatan damai dan sepakat untuk tidak mau ikut dalam kerusuhan missal, namun kesepakatan tidak diindahkan warga. hal 80 (netralitas yang Semu PSPK)

Bab V - Penghentian Kekerasan dan Rekonsiliasi



Diskusi dengan pemuka masyarakat di Kailolo tentang proses rekonsiliasi Maluku



Kondisi Maluku paska konflik

V.2.1. Model Rekonsiliasi Secara Adat

Kebanyakan model menggunakan tata cara adat sebagai *entry point* dari kegiatan rekonsiliasi. Pada awal kerusuhan, misalnya, sudah dilakukan upacara panas adat, yang sifatnya merekatkan budaya pela gandong antara desa-desa yang memiliki hubungan pela. Kegiatan ini antara lain dilakukan oleh Desa Passo (Kristen) dan Batu Merah (Islam) di bulan Januari tahun 1999. Selain itu juga diadakan pesta makan Patita (Makan sedulang bersama) yang dilakukan beberapa kali, terutama pada awal kerusuhan. Acara Patita tersebut misalnya dilakukan oleh warga Ambon setelah insiden terminal Mardika (2 Februari 1999) maupun warga Desa Kairatu di Seram Barat setelah adanya kerusuhan di daerah tersebut pada bulan Februari 1999. Namun terbukti bahwa acara tersebut tidak efektif karena acara yang sedianya dilakukan untuk memperat hubungan malah dijadikan ajang peperangan.¹⁰⁰

V.2.2. Model Rekonsiliasi Lembaga Keagamaan

Pada periode pra kerusuhan sudah dilakukan upaya mempertemukan kedua kelompok sebagai tindakan preventif agar kerusuhan tidak merembet ke Maluku. Dari wawancara dengan narasumber, misalnya diketahui bahwa pada waktu pra kerusuhan 19 Januari 1999 sudah ada upaya dialog antar organisasi pemuda Muslim dan Kristen khususnya dalam menyikapi kasus Situbondo. Ketika pecah kasus Ketapang, pemuka agama dikumpulkan oleh PEMDA setempat, khususnya untuk menyikapi banyaknya preman Ambon dari Jakarta yang masuk ke Ambon.¹⁰¹ Pemuka agama serta

¹⁰⁰ Setelah Insiden Terminal Mardika (2 February 1999), pukul 14.00 diadakan acara makan Patita sambil melakukan perjanjian untuk tidak saling menyerang, atas inisiatif pihak Kristen. Namun kelompok Kristen yang sudah membawa senjata tajam melakukan penyerangan (hal. 74) Netralitas Yang Semu - PSPK

¹⁰¹ Wawancara Pendeta Noce Patinaya

PEMDA setempat mulai melakukan antisipasi terhadap perkara-perkara kriminal yang mungkin timbul. Oleh karena itu sesudah terjadi peristiwa di Wailete dan Dobo, maka dilakukan acara doa bersama dan membuat kesepakatan agar kerusuhan tersebut jangan sampai terjadi di Ambon. Pada saat itu sudah ada antisipasi di kalangan yang berkumpul supaya agama jangan sampai dijadikan alat konflik.

Setelah peristiwa Idul Fitri Berdarah, pada tanggal 21 Januari 1999 juga sudah dibuat kesepakatan di Tugu Trikora antara warga Muslim dan Kristen untuk tidak melanjutkan kerusuhan apalagi mengingat banyaknya korban yang jatuh. Pada bulan Februari 2000, bapak pendeta Noce Patinaya bersama beberapa tokoh Islam dan Kristen menerima undangan ke Belanda atas undangan Management Team Dialog and Netherland Institute of International relation Clingendael untuk menghadiri seminar *"The Mollucas, How To Build Peace and Cooperation"* dan pada kesempatan tersebut sebenarnya sudah dihasilkan kesepakatan penanganan konflik, membangun kerjasama untuk membangkitkan kerukunan, penyusunan program-program. Beberapa isu peting yang dibicarakan antara lain adalah masalah keamanan, kesejahteraan, rekonsiliasi dan rekonstruksi. Peserta sepakat bahwa proses perdamaian dan rekonsiliasi tidak berarti apabila persoalan keamanan dan kesejahteraan tidak ditangani dengan baik. Tokoh-tokoh wakil agama kemudian pulang ke Ambon dan berupaya untuk menindaklanjuti kesepakatan yang sudah dibuat di Belanda. Namun hal ini terhalang dengan masuknya Laskar Jihad di Ambon. Komunikasi yang sudah terjalin menjadi putus sama sekali, dan kesepakatan yang dibuat di Belanda tidak dapat ditindak lanjuti.

Upaya rekonsiliasi lainnya adalah dengan membuat suasana perkabungan dan doa selama 3 hari (20-22 November 2001) untuk menimbulkan kesadaran di antara para warga atas dosa-dosa yang selama ini dibuat. Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan acara

ibadat di gedung gereja, rumah bahkan tengah jalan. Akan tetapi bagi kelompok Islam, acara ini dianggap sebagai salah satu bentuk provokasi dan bahkan beberapa pegawai negeri yang beragama Islam mengajukan protes kepada Gubernur terhadap aksi tersebut karena merugikan ekonomi dan pelaksanaan kerja pegawai negeri.

Pada awal-awal kerusuhan sudah dibentuk Tim Pengacara Gereja Sinode GPM, yang tugasnya melakukan advokasi terhadap korban kerusuhan termasuk melakukan pencatatan dan pemantauan terhadap para pengungsi. Pada bulan Juli 1999, kelompok warga Katolik membentuk sebuah *Crisis Centre* yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan koordinasi berbagai kegiatan berkaitan dengan kerusuhan antara lain bidang Sosek, Sekretariat, Evakuasi Pengungsi, Pendidikan, Pembinaan keagamaan, rekonsiliasi/HAM, kesehatan, hubungan masyarakat. Selain itu juga Uskup Ambon, C. Mandagi, aktif melakukan advokasi mengenai kondisi yang terjadi selama kerusuhan.

Di pihak lain, MUI cabang Ambon juga berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi, antara lain melalui keikutsertaan MUI dalam berbagai deklarasi yang intinya berupaya untuk menghentikan kerusuhan. Bahkan MUI cabang Ambon juga pernah meminta agar LJ dapat ditarik keluar dari Ambon. Upaya kerjasama dengan GPM (Gereja Protestan Maluku) sudah pernah dilakukan walaupun tindakan ini mendapatkan tentangan yang hebat dari kelompok Islam fundamentalis. Bahkan rumah pejabat MUI yang mengupayakan rekonsiliasi tersebut dilempari batu oleh kelompok yang tidak dikenal.

Pada tanggal 19-21 Juni 2001 dibentuk BIMM (Badan Immarah Muslim Maluku) yang merupakan sebuah upaya konsolidasi dan rekonsiliasi intern dari semua fraksi dan kumpulan Islam yang ada di Maluku. Menurut ketua umumnya, KH Ali Fauzi, BIMM bertujuan menyatukan semua komunitas, kelompok dan organisasi Islam dalam satu wadah besar, sehingga tidak ada yang berhak bicara mengatasnamakan Muslim selain BIMM. Namun BIMM

memiliki sebuah tujuan lain yaitu membasmi RMS, dipercaya bahwa tidak mungkin melakukan perdamaian dengan antek-antek RMS. Musyawarah ini tidak membahas langkah-langkah rekonsiliasi dengan pihak Kristen.

V.2.3. Model Rekonsiliasi LSM

Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) melakukan assessment paska konflik Maluku dalam upaya menuju masyarakat Maluku baru yang damai. YPPM juga mendorong timbulnya dialog antar raja dalam setiap pertemuannya, dan juga melakukan upaya pemulangan pengungsi ke daerah asalnya. Pengungsi merupakan sebuah isu sentral dalam kondisi paska kerusuhan ini, dalam sebuah pertemuan yang dilakukan di Hotel Ambon Manise, YPPM juga mengundang pihak lain yang terkait seperti misalnya Departemen Pekerjaan Umum sehingga dapat menjelaskan program pembangunan rumah yang didanai oleh pemerintah. Para raja yang berkumpul mendapatkan kesempatan untuk melakukan tanya jawab dengan pejabat yang terkait, sehingga informasi bisa menjadi lebih akurat

Pusat Rujuk Sosial (PRS) yang beranggotakan 88 orang dari dua kelompok yang bertikai, kiai, tokoh parpol, anggota DPRD dan unsur pemerintahan juga berupaya untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat baik melalui khotbah di gereja, masjid atau terjun langsung ke tengah massa

V.2.4. Model Rekonsiliasi Gerakan Akar Rumput

V.2.4.1. Gerakan Baku Bae

Gerakan Baku Bae, merupakan gerakan masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam upaya penghentian kerusuhan Ambon. Penggerak/inisiator gerakan adalah beberapa wakil LSM, masyarakat

yang menjadi korban dan juga pihak yang berperan dalam konflik. Pada awalnya gerakan peserta hanya melibatkan sejumlah 12 orang peserta, enam dari kelompok Islam dan 6 orang dari kelompok Kristen. Akan tetapi sekarang jumlah mereka yang terlibat langsung dalam gerakan Baku Bae sudah lebih dari 200 orang. Gerakan Baku Bae memiliki beberapa tujuan strategis yaitu: (1) Penghentian Kekerasan, (2) Pemberdayaan Masyarakat: ekonomi kecil, pembenahan pendidikan dasar, penyediaan sarana kesehatan minimal dan penyediaan sarana informasi dan komunikasi rakyat, (3) Penegakan Hukum. Ichsan Malik, penggagas gerakan Baku Bae menyatakan bahwa gerakan ini memberikan kontribusi sebesar lebih kurang 25% terhadap proses rekonsiliasi yang saat ini terjadi di Ambon.¹⁰²

Baku Bae juga mendorong timbulnya zona-zona netral bagi kegiatan perekonomian, pendidikan serta pelayanan kesehatan, misalnya dengan terbentuknya pasar Baku Bae. Dari hasil polling II pada bulan November 2000 bagi 9000 responden warga Ambon dan Pulau Lease, terdapat hal-hal menarik mengenai karakter konflik Maluku: misalnya dalam menentukan karakter konflik Maluku. Sebanyak 42.1% dari total responden menyatakan bahwa konflik yang terjadi selama ini adalah konflik elit politik. Namun apabila digali secara lebih mendalam terdapat perbedaan yang signifikan antara responden kelompok Islam dan Kristen, di mana 73.3% responden kelompok Kristen menyatakan bahwa konflik Maluku merupakan konflik elit politik, sedangkan di kelompok Islam hanya 11.6%. Sebagian besar responden kelompok Islam (34.2%) menyetujui isu separatis RMS sebagai penyebab konflik Maluku.¹⁰³ Adanya perbedaan yang signifikan tersebut sangat menarik untuk dipelajari lebih lanjut, terutama ketika harus membicarakan proses rekonsiliasi yang terjadi. Perbedaan persepsi harus disikapi sehingga penanganan

¹⁰² Wawancara Ichsan Malik, 2003

¹⁰³ Jajak pendapat Masyarakat Maluku, Maret-April 2002

masing-masing kelompok harus disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Gerakan rekonsiliasi lain yang lebih bersifat lokal, misalnya:

1. Pembentukan Tim 24, yang dipimpin oleh Abdullah Tuasikal (tokoh pemuda Islam). Tim ini adalah tim perdamaian yang dibentuk oleh kedua belah pihak yang bertikai dan diwakili oleh 12 orang Kristen dan 12 orang Islam. Kegiatan mereka sempat terhenti dan baru berjalan lagi setelah difasilitasi oleh Komnas HAM.
2. Tim Investigasi Haruku – Sameth, terdiri dari warga Haruku Sameth yang berdomisili di Ambon.
3. Bulan April – Mei 2000 terjadi upaya rekonsiliasi Waihaong (Islam) dengan Kudamati (Kristen) yang pada mulanya berjalan mantap tapi kemudian menjadi tegang kembali karena insiden penyanderaan dan pembunuhan terhadap 8 orang di Waihaong.
4. Tim rekonsiliasi dan rehabilitasi – T2R, Kecamatan Nusaniwe (Juni 2001), terdiri dari pemuda/i Islam dan Kristen, tujuannya memperhatikan bersama kebutuhan pengungsi dan semua orang lain yang menderita akibat kerusuhan, mempromosikan dialog antar kedua belah pihak, peningkatan keamanan, kemajuan ekonomi dan perbaikan infrastruktur.
5. FORKONUSI (Forum Komunikasi Nusaniwe – Sirimau) dibentuk oleh orang Islam dan Kristen untuk menunjang perdagangan antar kedua kelompok. Kelompok yang sudah ada sebelumnya misalnya kelompok supir truk, dilebur ke dalam forum ini.
6. Pelaku usaha juga tidak tinggal diam, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Marten Sarimanella selaku tokoh pemuda Passo yang memiliki usaha minyak (wawancara tanggal 13 Agustus 2003). Dalam perkembangan selanjutnya pelaku usaha ini menjadi

motor gerakan rekonsiliasi yang diinisiatifkan oleh Gerakan Baku Bae.

Bapak Marten (atau Ateng sebutan akrabnya) menyampaikan bahwa suatu hal yang sangat menguntungkan adalah heterogenitas pemain bola yang ada di klubnya. Ketika komunikasi di antara 2 kelompok sudah terputus sama sekali, para pemain bola ini tetap mempertahankan jalur komunikasi mereka dan berita-berita yang disampaikan biasanya bukan isu belaka. Ketika di Ambon masih dalam kondisi genting kelompok ini bahkan masih bisa bertanding sepak bola di Maluku Tenggara dalam rangka perebutan piala Gubernur.

V.2.4.2. Model Rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kaum Perempuan.

Selama masa kerusuhan kaum perempuan dan anak-anak merupakan korban yang paling besar. Mengingat hal tersebut maka kaum perempuan Maluku tidak tinggal diam. Pada bulan Agustus 1999 muncul Gerakan Perempuan Peduli (GPP). Mulanya gerakan ini hanya dilakukan oleh perempuan Katolik dan Protestan, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya timbul kegiatan sejenis di kalangan perempuan Islam. Kegiatan yang pernah dilakukannya antara lain melakukan aksi demonstrasi damai pada tanggal 4 September 1999 di depan kantor Gubernur Maluku. Pada kegiatan tersebut dibacakan deklarasi "SUARA HATI KAUM PEREMPUAN".

Gerakan ini juga melakukan sosialisasi penghentian aksi kekerasan dengan menggunakan pita kain hijau muda yang bertuliskan "Hentikan Pertikaian". Pelbagai kegiatan lain yang dilakukan oleh GPP adalah pendampingan terhadap para pengungsi, terus melakukan perjuangan untuk menghentikan pertikaian serta mendorong aksi rekonsiliasi untuk mewujudkan Maluku yang damai.

Gerakan perempuan lokal lainnya dalam melakukan advokasi penghentian konflik, misalnya dilakukan oleh puluhan perempuan

asal Ahuru. Pada tanggal 18 Mei 2000, puluhan perempuan Ahuru melakukan demonstrasi di kantor Gubernur dan mendesak Gubernur untuk mengambil sikap tegas untuk memulangkan LJ Ke Jawa. Dikatakan bahwa Gubernur harus bertanggung jawab atas pernyataannya yang menyatakan bahwa kedatangan LJ di Maluku adalah untuk dakwah dan misi sosial, sementara kenyataan di lapangan LJ berperan aktif dalam berbagai aksi pembakaran, penjarahan dan pembunuhan.¹⁰⁴

V.3. Penyelesaian Jangka Panjang

Untuk mencari penyelesaian konflik Maluku dalam perspektif jangka panjang, perlu dipikirkan upaya yang bersifat konseptual maupun hal-hal yang bersifat praktis. Yang konseptual tentunya diharapkan untuk dapat memberi landasan kebersamaan yang kokoh, yang tidak mudah digoyang dengan provokasi yang sesaat. Sementara hal-hal yang bersifat praktis dibutuhkan untuk merekat kebersamaan tadi dalam kehidupan yang aktual dan faktual.

Di antara kedua hal tadi, pengembangan platform yang bersifat konseptual bukan merupakan persoalan mudah. Apalagi ketika konsep yang merupakan landasan dari platform tadi sempat tergoncang sangat berat pada saat kerusuhan Maluku sejak awal 1999. Tantangan untuk membuat platform yang cukup ideal tapi masih diterima oleh masyarakat yang sedang bertikai tentu bukan persoalan mudah.

Pengembangan model-model kebersamaan merupakan sesuatu yang lebih mudah, karena bisa dipilih area atau kelompok yang paling kondusif untuk menerima model kebersamaan tadi. Masalahnya adalah membuat benang merah dengan platform baru

¹⁰⁴ Siwalima 23 Mei 2000.

yang ingin dikembangkan. Kalau tidak, model kebersamaan ini hanya merupakan model-model sporadis yang kurang berakar.

Di samping kedua hal tadi, penyelesaian konflik Maluku dalam perspektif jangka panjang harus mampu melakukan dua hal lagi. Pertama, meredam potensi konflik yang masih ada. Dan kedua, membagi peran menyongsong masa depan. Dalam meredam potensi konflik, diharapkan dapat dilakukan penuntasan masalah yang ada dan upaya untuk menghindari masalah-masalah baru. Sementara pembagian peran sangat diperlukan untuk meringankan tugas penyelesaian konflik ini, di samping untuk menebar kebersamaan dalam bentuk yang lebih kokoh.

Dalam mencari platform untuk penyelesaian konflik Maluku dalam perspektif jangka panjang, ada empat hal yang kiranya perlu mendapat perhatian, yaitu aspek-aspek: kemanusiaan, kebangsaan, adat, dan agama. Idealnya, keempat hal ini dapat menjadi basis atau platform bagi penyelesaian jangka panjang, tetapi konflik Maluku telah menjadikan keempat aspek tadi sebagai faktor yang memisahkan dan bukti kesalahan bagi pihak yang dianggap lawan.

Apa yang harus dilakukan ketika slogan kemanusiaan dipakai untuk meminta pihak asing turut campur dalam penyelesaian konflik Maluku, atau slogan kebangsaan dipakai untuk memojokkan satu kelompok sebagai RMS atau separatis. Sementara ikatan adat dan kebersamaan sebagai orang Maluku hendak dipakai untuk menolak para pendatang, yang notabene masih bangsa Indonesia juga. Apalagi slogan dan bendera keagamaan yang seakan memberi legitimasi untuk berperang mempertahankan sebuah keyakinan.

Tampaknya kita harus mulai membenahi pemahaman kita akan aspek-aspek kemanusiaan, kebangsaan, adat, dan keagamaan kita. Kita harus menjadikan keempat aspek ini menjadi perekat kebersamaan kita, atau setidaknya untuk memahaminya sebagai apresiasi akan adanya perbedaan dan keragaman. Kemanusiaan dan kebangsaan tentunya merupakan platform yang kokoh untuk merekat

kebersamaan kita sebagai umat manusia dan bangsa Indonesia. Maka hendaknya adat dan agama bisa menyumbangkan kearifan dan spiritualitas untuk memaknai kebersamaan tadi.

Adat atau filsafat orang Maluku yang mengenal keberadaan Islam-Kristen dalam masyarakatnya sebagai suatu pasangan yang merupakan keniscayaan. Perbedaan antara Islam dan Kristen yang mencolok, bukannya disikapi sebagai sesuatu yang berlawanan, tetapi sebagai sesuatu yang berpasangan. Sama seperti pasangan antara gelap dan terang, langit dan bumi, lelaki dan perempuan. Pasangan kedua agama ini di Maluku dikenal sebagai Siwalima, di mana Siwa mewakili kelompok Kristen sedangkan Lima mewakili kelompok Islam.

Tinggalah aspek agama. Mungkinkah dia menjadi perekat kebersamaan orang Maluku ? Kalau saja kasih orang Kristen bukan sekedar hiasan bibir, dan penghormatan akan jiwa manusia bagi umat Islam dibuktikan dalam perbuatan maka kebersamaan kedua agama ini bukan hal yang mustahil. Kalau saja dapat dikembangkan program-program bersama, bukan tidak mungkin kedua umat beragama ini akan bersatu padu. Ada banyak hal yang semestinya menjadi musuh bersama : kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, kriminalitas, dan kebobrokan moral. Dan ada banyak hal yang mestinya dapat dijadikan cita-cita bersama: Maluku yang mandiri, sejahtera, cerdas, dan setara dengan propinsi lain di Indonesia ini.

V.3.1. Program Kebersamaan

Adalah sangat menarik untuk mencari musuh bersama yang dapat diperangi oleh semua agama yang ada: kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, kriminalitas, dan kebobrokan moral. Rasanya semua agama akan mudah menyepakati kelima hal tadi sebagai musuh bersama, yang memungkinkan agama-agama untuk dapat bekerja sama. Untuk memberantas kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan kita terbiasa dengan program-

program pembangunan sektoral yang dulu dipelopori dan dibiayai oleh pemerintah.

Dua musuh terakhir : kriminalitas dan kebobrokan moral bisa diberantas dengan penegakan hukum dan sekaligus penegakan moral. Penegakan moral inilah yang seyogyanya menjadi tugas gerakan moral yang bernama agama. Dan upaya ini akan menjadi efektif bila dilakukan secara bersama oleh semua agama dan bukan secara sendiri-sendiri. Apalagi kalau ada upaya mendorong kriminalitas dan kebobrokan moral yang berlangsung di kelompok agama yang lain agar meruntuhkan kekuatan agama yang lain itu. Sungguh suatu keadaan yang akan menghancurkan seluruh tatanan masyarakat tanpa peduli siapa yang ada di sana.

Kebersamaan dalam memerangi kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan dapat dirinci dalam beberapa program berikut: Pertama, pengembangan kemandirian; Kedua, pengembangan aktivitas ekonomi; Dan ketiga, pengembangan kegiatan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Pengembangan kerjasama dan kemandirian merupakan basis agar kedua program lain dapat berlangsung tanpa terlalu tergantung pada pihak lain. Hal ini penting untuk dapat memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki seoptimal mungkin.

Pengembangan aktivitas ekonomi, misalnya, dapat dimulai dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari semacam gula atau minyak kelapa. Untuk mengembangkan kemandirian dan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi, maka penggunaan minyak kelapa dan gula aren hasil produksi sendiri perlu digalakkan. Upaya pemanfaatan hasil laut, hutan, dan perkebunan untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat perlu mendapat perhatian. Di sini lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, dan lembaga keagamaan bisa mengambil peran yang sangat positif.

Setelah aktivitas ekonomi yang berbasis kemandirian itu bisa dikembangkan, maka masyarakat akan memiliki kemampuan untuk

melakukan kegiatan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Di sinipun upaya yang berbasis kemandirian perlu dilakukan. Pendirian bangunan pendidikan dan keagamaan yang menggunakan sebanyak mungkin sumberdaya lokal adalah contoh pengembangan kegiatan yang berbasis kemandirian itu. Dengan mencanangkan tekad kemandirian itu, banyak hal yang dapat dikembangkan, sepanjang ada kemauan dan kreativitas.

V.3.2. Meredam Potensi Konflik

Ada setidaknya lima potensi konflik yang masih membayangi masa rekonsiliasi dan rehabilitasi di Maluku, yaitu: pengungsi, lahan, pendatang, ketidakadilan dan kesenjangan, serta ketergantungan. Masalah ketergantungan kiranya bisa diatasi dengan mengembangkan program-program kebersamaan yang berbasis kemandirian. Sedangkan masalah pengungsi, lahan, pendatang, ketidakadilan, dan kesenjangan memerlukan pendekatan dan upaya-upaya yang agak khusus.

Ada setidaknya empat pendekatan atau upaya yang dapat dilakukan, yaitu: penegakan hukum, penuntasan masalah, pengurangan kesenjangan dan ketidakadilan, dan peningkatan saling pengertian. Keempat upaya atau pendekatan ini bukanlah pekerjaan mudah, karena kompleksitas masalah yang dihadapi.

Yang pertama harus dilakukan adalah penegakan hukum, atau barangkali lebih tepat pemberian kepastian hukum. Hal ini akan sangat menentukan dalam penanganan masalah lahan dan pengungsi. Dengan pemberian kepastian hukum itu, maka hak dan kewajiban dari masing-masing pihak bisa dideskripsikan dengan jelas. Hal ini juga berkaitan dengan upaya kedua yang berupa penuntasan masalah. Masalah yang dibiarkan menggantung dan tidak tuntas bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Upaya berikut adalah mengurangi ketidak-adilan dan kesenjangan. Kearifan dari pemerintah dan tokoh masyarakat serta gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan akan sangat membantu upaya ini. Akhirnya, pendekatan dan upaya ini akan menjadi lengkap kalau secara terus menerus dilakukan upaya untuk meningkatkan kerjasama dan saling pengertian. Suatu kesadaran untuk melihat begitu banyaknya masalah dan garapan yang harus dilakukan secara bersama. Kalaulah ada musuh yang harus diperangi, itu adalah kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, kriminalitas, dan kebobrokan moral.

V.3.3. Membagi Peran

Di masa Orde Baru, peran membangun masyarakat seakan menjadi monopoli pemerintah. Kini monopoli peran itu terasa tidak realistis lagi. Bukan saja karena akan menjadi beban yang tak bertanggung bagi pemerintah, tetapi juga hasilnya akan kurang menggembirakan. Masyarakat tidak merasa memiliki dan tidak terdorong untuk memberi kontribusi yang optimal pada kegiatan-kegiatan tadi.

Kesadaran untuk membagi peran ini akan menghidupkan kegiatan dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti : lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Lembaga adat dan lembaga keagamaan sering mampu menggerakkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat swadaya, karena di dalamnya ada ikatan adat dan agama yang menumbuhkan keinginan saling tolong menolong secara tulus. Pembagian peran kegiatan sosial kemasyarakatan pada lembaga adat dan keagamaan adalah langkah yang sangat efektif.

Lembaga swadaya masyarakat, di luar lembaga adat dan keagamaan, diharapkan mampu mengambil peran yang inovatif atau peran-peran lain yang membutuhkan respons yang cepat. Pemberian

peran ini dikarenakan bahwa lembaga swadaya masyarakat ini seyogianya memiliki akses informasi dan jaringan yang mampu melakukan kedua hal tadi. Dengan peran ini, lembaga swadaya masyarakat bisa membantu melengkapi fungsi lembaga adat dan keagamaan dengan memberikan gagasan-gagasan baru dan dinamisasi kehidupan masyarakat.

Untuk mencari penyelesaian konflik dalam perspektif jangka panjang ada satu kelompok yang perannya tidak bisa dilupakan, yaitu kelompok perempuan. Ada paling tidak tiga hal yang terkait dengan peran perempuan ini: Pertama, karena perempuan adalah korban konflik yang paling menderita, maka tentunya kaum perempuanlah yang paling tidak menghendaki terjadinya konflik. Kedua, perempuan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan untuk meredam atau mengurangi penderitaan dan trauma akibat konflik. Ketiga, perempuan memiliki kemampuan untuk mengawali kegiatan-kegiatan ekonomi di masa rehabilitasi dengan biaya murah. Dengan ketiga pertimbangan tadi, peranan perempuan dalam penyelesaian konflik Maluku perlu lebih mendapat perhatian.

BAB VI

PENUTUP

VI.1. Kesimpulan

Sumber konflik Maluku memiliki berbagai sisi yang menarik untuk diteliti, antara lain: sumber atau akar permasalahan yang beragam, sumber yang bersifat laten tetapi siap menjadi ketegangan dan permusuhan pada kondisi tertentu, serta berbaurnya antara fakta dan opini.

Sumber dan akar permasalahan konflik Maluku dapat ditelusuri dari sisi sejarah dan sikap Kolonial Belanda, dominasi Pemerintah Pusat paska kemerdekaan khususnya di era Orde Baru, sisi agama, budaya, kemasyarakatan, hingga sisi ekonomi dan pembagian sumberdaya. Sisi lain adalah sisi politik dan perebutan kekuasaan yang juga mengalami perubahan menyolok di era akhir Orde Baru tahun 1990 an yang dilanjutkan dengan era reformasi yang penuh gejolak.

Akar permasalahan yang tak pernah terselesaikan kemudian menjadi suatu bahaya yang laten yang siap meledak setiap saat. Hal ini lebih diperparah dengan munculnya pandangan stereotipe baik dari pihak Islam maupun pihak Kristen. Pihak Kristen menganggap kebangkitan umat Islam yang didukung oleh kedatangan migran muslim, khususnya BBM, sebagai ancaman. Kecurigaan pada pihak Islam ini menjadi lebih parah kalau dikaitkan dengan Islam politik yang dianggap radikal. Sementara pihak Islam melihat adanya pihak Kristen yang berpolitik dan ingin kembali merebut hegemoni yang mereka miliki di zaman kolonial pra 1990-an. Pandangan terhadap kelompok Kristen politik ini lebih parah bila dihubungkan dengan gagasan RMS.

Betapapun, pemahaman tentang sumber konflik akan sangat membantu mencari penyelesaian jangka panjang. Perasaan diperlakukan tidak adil dan kekecewaan yang berkepanjangan, terbatasnya aktivitas positif yang menunjang kehidupan, serta kurangnya wacana yang secara tulus dapat menumbuhkan kerjasama, adalah hal-hal yang dapat menyulut dan memperbesar konflik. Upaya yang serius mengatasi masalah-masalah tadi kiranya akan dapat meredam potensi konflik untuk tidak berkembang ke mana-mana.

Namun demikian, kerusuhan berantai di Maluku Tengah pada pada akhirnya tidak lagi ditentukan oleh ada-tidaknya insiden pemicu melainkan oleh adanya kekuatan politik-militer yang berusaha melanggengkan konflik di dalam masyarakat. Kekuatan ini mengkondisikan masyarakat untuk tetap rentan dan berperan sebagai pelaku aksi-aksi kekerasan di lapangan. Kekuatan itu dapat terukur dari adanya distribusi senjata kepada masyarakat, adanya bias sikap aparat dalam mencegah kerusuhan ataupun terlibat langsung dalam kekerasan massa, masih dipakainya simbol-simbol agama untuk menguatkan masyarakat bereaksi terhadap konflik dengan cara kekerasan, adanya mobilisasi massa penyerang, tidak adanya penanganan korban kerusuhan secara baik, dan lain-lain.

- Kerusuhan di Maluku murni tidak lagi menjadi konflik lokal setelah adanya bantuan intervensi massa Jihad dari luar Maluku dan adanya politisasi konflik Maluku sebagai konflik agama. Upaya untuk menggeserkan motif kerusuhan di Maluku utara dari persoalan adat dan wilayah ke persoalan sentimen agama, merupakan contoh jelas sebuah rekayasa konflik yang dimainkan oleh pihak tertentu. Demikian pula rekayasa ini terlihat dalam reaksi atas kerusuhan di Maluku oleh berbagai kelompok dan partai-partai Islam yang tidak lagi proporsional. Berbagai opini dan reaksi terkini terhadap konflik di Maluku tidak lagi terfokus pada persoalan kemanusiaan ataupun persoalan penegakan

hukum dan keadilan melainkan pada persoalan eksistensi umat Islam di Indonesia. Dengan demikian, perkembangan opini ini pada akhirnya tidak mengedepankan penyelesaian konflik bagi kepentingan masyarakat Maluku melainkan bagi kepentingan golongan dan kelompok tertentu.

- Terjadi krisis kepemimpinan dalam masyarakat Maluku secara keseluruhan, yang menyulitkan terselenggaranya upaya penghentian aksi kekerasan dan rekonsiliasi. Krisis kepemimpinan ini terjadi sebagai akibat begitu kuatnya distorsi politisasi kepentingan dan pendekatan kekerasan yang menyebabkan masyarakat tidak lagi menghormati dan percaya pada kredibilitas pihak-pihak yang selama ini dianggap memiliki otoritas atas mereka seperti aparat keamanan, pemerintah, parlemen hingga para pemuka agama sekalipun.
- Secara umum, para elit agama di Maluku belum mampu mengendalikan massanya untuk mengatasi kerusuhan sebagai akibat adanya distorsi yang kuat di dalam tubuh organisasi keagamaan tersebut. Dalam kaitan ini ada perbedaan posisi elit agama antara Islam dan Kristen. Para elit Islam bersikap proaktif terhadap konflik kekerasan sebagai akibat adanya pembenaran tafsiran teologis atas JIHAD, sedangkan pihak elit Kristen condong bersikap dilematis (antara menggunakan kekerasan atau tidak) maupun reaktif terhadap aksi-aksi kekerasan yang terjadi.

Opsi para elit Islam terhadap Jihad sebagai jalan keluar dari konflik di Maluku pada satu sisi menguntungkan konsolidasi kekuatan kaum muslim dalam mengambil posisi ofensif yang jelas dalam konflik, sementara pada sisi lain opsi kekerasan (Jihad) berdampak negatif bagi upaya penghentian kekerasan, apalagi semakin jelas ada kepentingan-kepentingan politis pihak tertentu yang memperalot simbol-simbol Islam. Pada gelombang ketiga ini, pemantapan opsi Jihad secara nasional semakin menguat dan cukup berdampak politis bagi pemerintah Indonesia sebab opsi ini juga mendorong terjadinya

proses konsolidasi berbagai aliran dan kekuatan umat muslim se-Indonesia untuk memberi sikap radikal terhadap persoalan umat Islam di Indonesia.

VI.2. Rekomendasi

Dari uraian terdahulu dapat dirangkum empat hal yang penting untuk diupayakan dalam penyelesaian konflik Maluku, khususnya dalam perspektif jangka panjang. Keempat hal itu adalah :

1. Dalam mencari platform untuk penyelesaian konflik Maluku dalam perspektif jangka panjang, aspek-aspek : kemanusiaan, kebangsaan, adat, dan agama perlu mendapat peran dan pemahaman baru yang mengarah pada persatuan dan kebersamaan.
2. Pengembangan model-model kebersamaan merupakan sesuatu yang lebih mudah, karena bisa dipilih area atau kelompok yang paling kondusif untuk menerima model kebersamaan tadi. Masalahnya adalah membuat benang merah dengan platform baru yang ingin dikembangkan.
3. Untuk meredam potensi konflik, ada setidaknya empat pendekatan atau upaya yang dapat dilakukan, yaitu : penegakan hukum, penuntasan masalah, pengurangan kesenjangan dan ketidakadilan, dan peningkatan saling pengertian
4. Akhirnya, penyelesaian konflik Maluku dalam perspektif jangka panjang perlu membagi peran, antara pemerintah dengan lembaga-lembaga dan kelompok yang ada, seperti : lembaga adat, lembaga keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat. Peran wanita tampaknya juga perlu mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George J., "Orang-orang Jakarta dibalik tragedi Maluku", 7 Juni 2001 (didownload dari situs Help Ambon In Nood)
- Bake, Jamal; Abas, Muhammad, dan Rinusu, *Netralitas yang Semu: Mengungkap Keberadaan Aparat Keamanan Dalam Berbagai Konflik Etnik Di Indonesia*. Pusat Studi Pengembangan Kawasan. Jakarta, 2000
- Bartels, Dieter, "Hubungan 'Pela' Di Maluku-Tengah Dan Di Nderland", Yavapai College, Arizona, 2001
- Chauvel, Richard, *Nationalists, Soldiers and Separatists*, KITLV Press, Leiden, Netherlands, 1999
- Eriyanto, *Media dan Konflik Ambon, Media, Berita dan Kerusuhan Komunal Ambon 1999-2002*. Kantor Berita radio 68H, Majalah Pantau dan Media Development Loan Fund. Jakarta, 2003
- Hylland, Thomas Eriksen, *Ethnicity & Nationalism: Antropological Perspective*, London Boulder, Colorado, Pluto Press, 1993
- Huliselan, Mus, "Pemberdayaan Kebudayaan Maluku Tengah : Untuk Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru", Makalah dalam "Dialog Nasional tentang Pemberdayaan Kebudayaan Lokal demi Rehabilitasi dan Pengembangan Masyarakat Maluku Menuju Indonesia Baru, The Go-East Institute, Crisis-Center-Ambon, Pemda Tingkat I Maluku, di Langgur, Maluku Tenggara, 14-17 Maret 2001
- ICG, Indonesia Briefing Paper Indonesia's Maluku Crisis: The Issues, 19 July 2000. Jakarta/Brussels
- ICG: Indonesia The Search For Peace, ICG Asia Report no. 31, February 2002

Daftar Pustaka

- ICG, Indonesia: Overcoming Murder and Chaos in Maluku. ICG Asia Report No. 10, 19 Desember 2000
- Kiesberg, Louis, *Sosial Conflict*, Second Edition, Englewood Clifft, N.Y.: Prentice Hall, Inc, 1982
- Klinken, Gerry van, *The Maluku Wars: Bringing Society Back In*, The Indonesia No., 17, April 2001
- Kota Ambon dan Angka, BPS, 2001
- Malik, Ichsan, 'Menganyam Masa Depan Maluku' dalam semiloka *Rekonstruksi Resolusi Konflik Sosial Ambon*, 22 Mei 2002. Jakarta
- Maluku Tengah dalam Angka, BPS, 2001
- Margawati, Margaretha & Aryanto, Toni, "Konflik Antaragama atau Politisasi Agama?", *Jurnal Antropologi Indonesia* 62. 2000
- Proseding pertemuan Malino II
- Salampessy, Zairin dan Husain, Thamrin (eds), *Ketika Semerbak Cengkeh Tergusur Asap Mesiu: Tragedi Kemanusiaan Maluku di Balik Konspirasi Militer, Kapitalis Birokrat, dan Kepentingan Elit Politik*, Tapak Ambon, Jakarta, Juli, 2000.
- Sarwono, Prof. Dr. Sarlito Wirawan, 'Psikologi Malino' dalam *Semiloka Rekonstruksi Resolusi Konflik Sosial Ambon*, 22 Mei 2002. Jakarta
- Tadjoeddin, Mohammad Zulfan (2002) "Database on Social Violence in Indonesia (1990-2001)", United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR), Jakarta, April 2002.

Daftar Pustaka

Tim Peneliti Ambon-Maluku, *Keberadaan TNI dalam Konflik antar Etnik di Indonesia (Kasus Ambon – Maluku)*, Kerjasama OTI/USAID dengan Pusat Studi Pengembangan Kawasan (PSPK) dan Yayasan Pengembangan Kawasan (YPK), Jakarta, 2000.

Triyono, Lambang, *Keluar dari Kemelut Maluku*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001

YPPM (Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat), *Hasil tabulasi serta analisa data dan informasi: Assessment Pasca Konflik Maluku menuju Masyarakat Maluku Baru yang Damai*, Ambon, Agustus 2003

Majalah :

Tempo Edisi 11-17 November 2002

Tempo edisi kemerdekaan

SKH

Harian Kompas, 5 September 2003

Kompas, Jumat, 05 September 2003

Harian Kompas dan Siwa Lima, tgl. 13 februari 2002

URL :

<http://www.fica.org/hr/ambon/idRusuh1.html>

<http://www.tempointeraktif.com/harian/kolom/25082000-1.html>

http://www.geocities.com/chosye/Themes/Prahara_Maluku_1.htm



GLOSSARY

Acang	Sebutan untuk Muslim
Agas	Pejuang anak kelompok Kristen. Agas adalah nyamuk kecil yang sakit gigitannya
AJI	Aliansi Jurnalis Indonesia
Akar Rumput	Organisasi massa FKM, yang dipimpin oleh Agus Wattimena
Baku Bae	Gerakan rekonsiliasi
BIMM	Badan Imarah Muslim Maluku. Persatuan kelompok Muslim di Maluku, yang didirikan pada bulan Juni 2001
Coker	Cowok Keren/Kerempeng - kelompok preman Ambon, pada waktu kerusuhan dipelesetkan menjadi Cowok Kristus
Familie	Hubungan bilateral di suatu mata rumah yang terjalin dalam suatu pernikahan
FKASWJ / FKAWJ	Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jamaah – memiliki ormas Laskar Jihad
FKM	Forum Kedaulatan Maluku
GMKI	Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia.
GPM	Gereja Protestan Maluku
GPP	Gerakan Perempuan Peduli
Hakikil	Pekerja perempuan yang mengabdikan secara personal kepada Raja
Hasilgeld	Persentase hasil panen cengkeh yang dibayarkan untuk raja pada masa monopoli
Hongitochten	Ekspedisi tahunan untuk melindungi monopoli rempah-rempah
ICMI	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
Jl	Jamaah Islamiyah.
Kardjo Trop	Pelayan dewan raja dalam pemerintahan desa muslim

Glossary

Kewang	Institusi tradisional yang bertanggung jawab terhadap pengolahan sumber daya alam & ekonomi, dan mengontrol pelaksanaan hukum adat
KISDI	Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam
Kontras	Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Kopassus	Komando Pasukan Khusus
KPK2KM	Komite Penyidik Pelanggaran HAM dan Mediasi Maluku
KPPMM	Komite Penyidik Pelanggaran HAM dan Mediasi Maluku
Kwartodienst	Pekerja laki-laki yang mengabdikan secara personal kepada Raja dan keluarganya
LJ	Laskar Jihad, kelompok milisi yang melakukan jihad di Ambon merupakan ormas dari FKASWJ
Laskar Mujahidin	Kelompok milisi yang melakukan jihad di Ambon
Laskar Yesus	Kelompok milisi Kristen, dibentuk oleh Buce Serpara
Linggis	Kelompok pejuang anak Muslim.
Mata rumah	Kelompok Perkawinan campuran yang mendasarkan pada Patrilineal
Obed	Sebutan untuk Kristen
PDS	Penguasa Darurat Sipil – Presiden
PDSD	Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku – Gubernur
PGI	Persekutuan Gereja Indonesia
Pittsgeld	4% dari nilai hasil panen cengkeh yang dibayarkan kepada raja pada saat monopoli
PPMI	Persaudaraan pekerja Muslim Indonesia
RMS	Republik Maluku Selatan

Glossary

SAMNM	Satgas Amar Maruf Nahi Munkar yang dipimpin oleh Muhamad Attamimi, Rustam Kastor dan Ustad Bahasoan
SPMM	Radio Suara Perjuangan Muslim Maluku – didirikan oleh laskar Jihad
STIAN	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
TAPAK Ambon	Team Advokasi Penyelesaian Kasus Ambon
Toelage	Kontribusi pemerintah yang dibayarkan untuk raja sebagai pengganti pembayaran di bawah monopoli rempah-rempah
TPG	Tim Pengacara Gereja (GPM)
TPM	Tim Pengacara Muslim
UKIM	Universitas Kristen Indonesia
Unidar	Universitas Darussalam berlokasi di Tulehu, Ambon
Unpatti	Universitas Pattimura
Volksraad	Dewan Rakyat
YonGab	Batalyon Gabungan





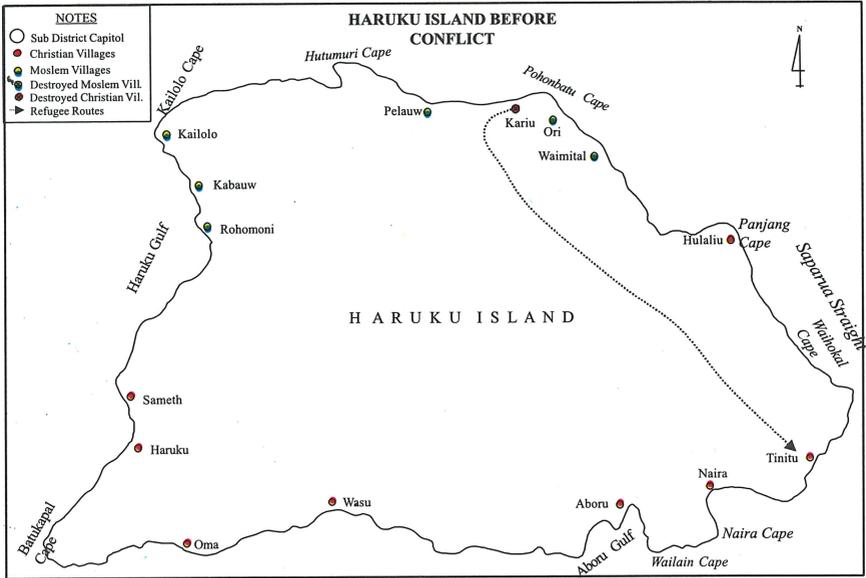


Figure 19 Haruku Island Before Conflict

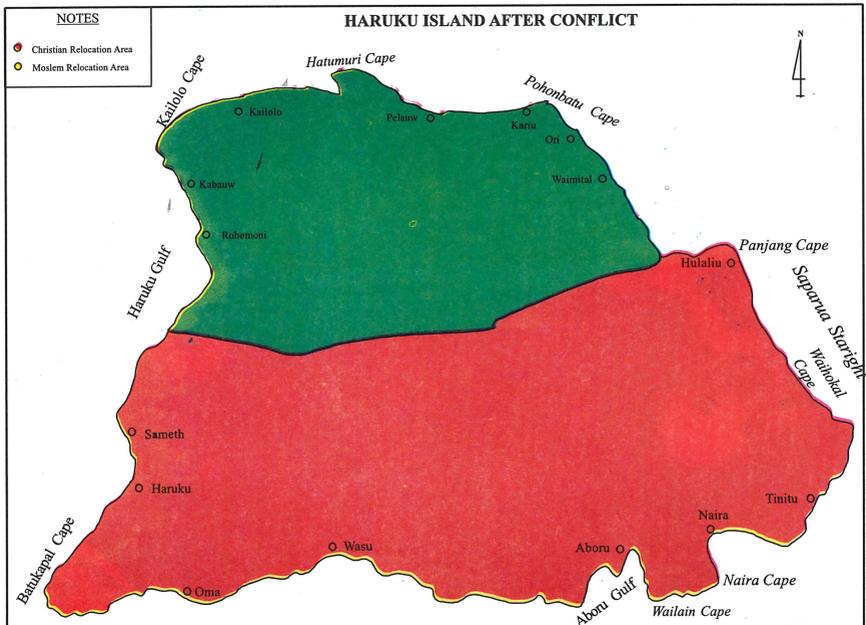


Figure 20 Haruku Island After Conflict



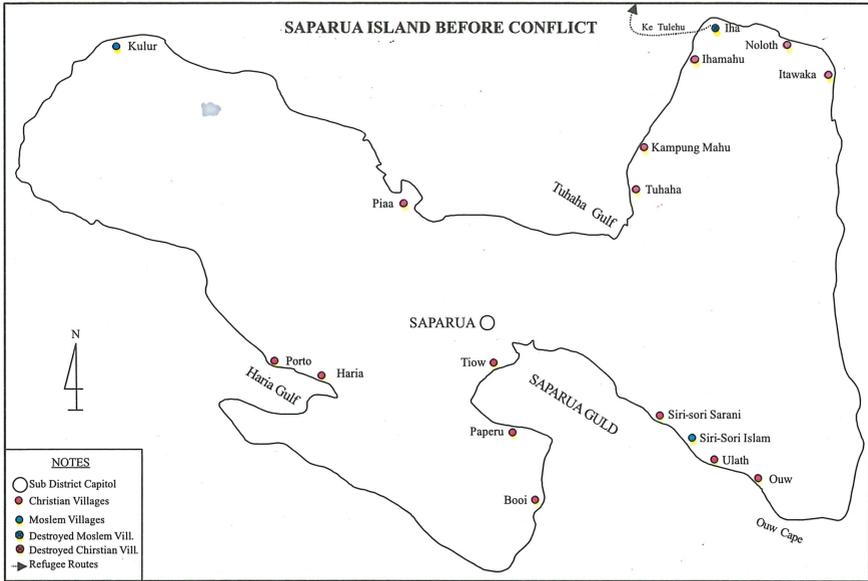


Figure 21 Saparua Island Before Conflict

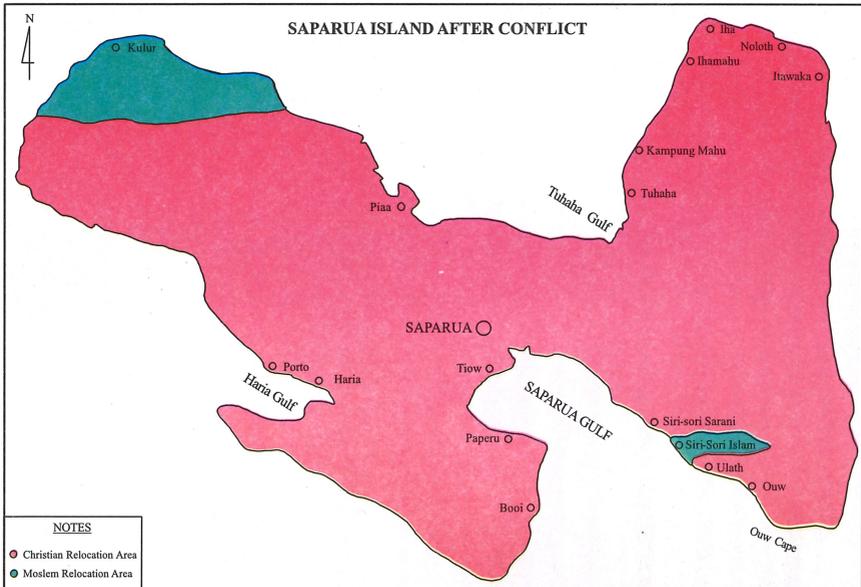


Figure 22 Saparua Island After Conflict

